

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018**

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2018 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Januari 2019
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Visi tersebut yakni sebagai "Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan", yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 483.181.721.020,- dengan Realisasi sebesar Rp. 439.317.857.318,86,- (90,92%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 16 (enam belas) program, Kegiatan sebanyak 116 (seratus enam belas) kegiatan dan Paket Kegiatan sebanyak 202 (dua ratus dua) paket kegiatan.

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.060.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.424.670.430,- (134,40 %).

Tabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

| No. | Restribusi | Anggaran | Realisasi | % |
|-----|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 1. | Laboratorium | 210.000.000 | 624.571.420 | 297,41 |
| 2. | Alat-alat berat | 850.000.000 | 800.099.000 | 94,12 |
| | Jumlah | 1.060.000.000 | 1.424.670.430 | 134,40 |

Dana APBD SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar :

Tabel Pagu Dana DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

| No. | Uraian | Rencana | Realisasi | Sisa | % |
|-----|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 28.672.808.958,10 | 28.434.304.816,00 | 238.504.142,10 | 99,17 |
| 2. | Belanja Langsung | 454.508.912.062,00 | 410.883.552.502,86 | 43.625.359.733,14 | 90,40 |
| | Jumlah | 483.181.721.020,10 | 439.317.857.318,86 | 43.863.863.701,24 | 90,92 |

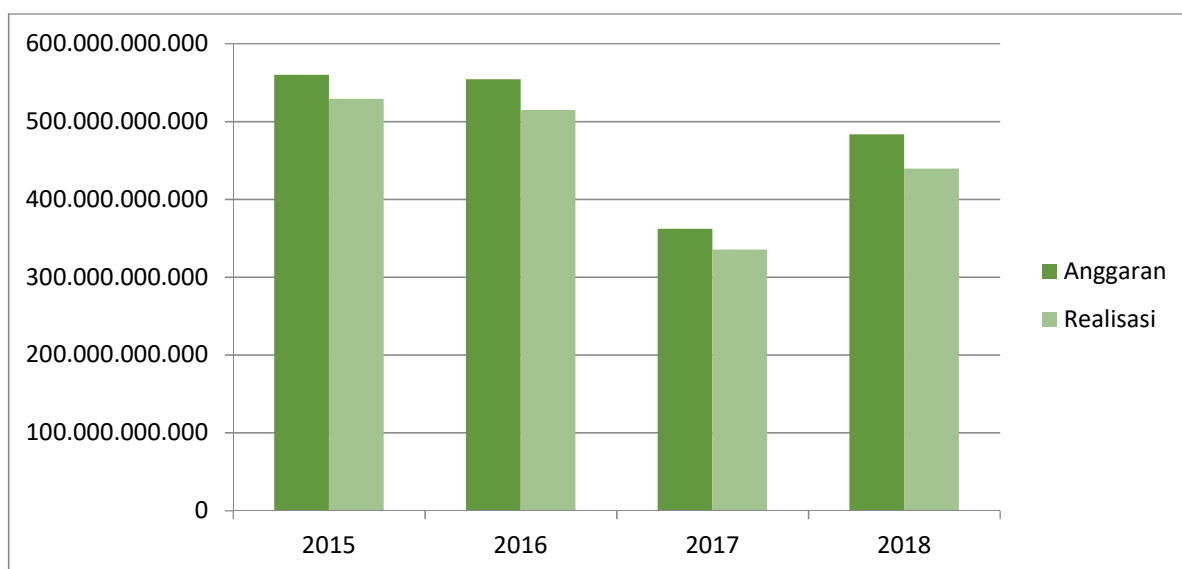
Dari tahun ketahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD daerah yang dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel Rencana dan Realisasi 2015, 2016, 2017 dan 2018

| Tahun Anggaran | Jenis Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| | | | Fisik | Keuangan | |
| | | | | Rp. | % |
| 2015 | Belanja Tidak Langsung | 37.480.605.967 | 100 | 36.493.101.212 | 97,37 |
| | Belanja Langsung | 522.500.980.922 | 97,53 | 492.682.424.909 | 94,29 |
| | Total | 559.981.586.909 | 97,66 | 529.175.526.121 | 94,49 |
| 2016 | Belanja Tidak Langsung | 37.061.878.434 | 97.19 | 36.020.421.451 | 97.19 |
| | Belanja Langsung | 517.082.402.944 | 93.49 | 478.458.421.866 | 92.53 |
| | Total | 554.144.281.378 | 95.34 | 514.478.843.317 | 92.84 |
| 2017 | Belanja Tidak Langsung | 34.679.823.067 | 100 | 34.403.521.642 | 99,20 |
| | Belanja Langsung | 327.278.750.237 | 96.97 | 300.920.427.617 | 91,95 |

| Tahun Anggaran | Jenis Belanja | Anggaran (Rp.) | Realisasi | | |
|----------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|
| | | | Fisik | Keuangan | |
| | | | | Rp. | % |
| | Total | 361.958.573.304 | 98,51 | 335.323.949.259 | 92,64 |
| 2018 | Belanja Tidak Langsung | 28.672.808.958,10 | 100 | 28.434.304.816 | 99,17 |
| | Belanja Langsung | 454.508.912.062,00 | 97,64 | 410.883.552.502,86 | 90,40 |
| | Jumlah | 483.181.721.020,10 | 98,82 | 439.317.857.318,86 | 90,92 |

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan pendanaan yang didapat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015, 2016 ,2017 dan 2018 sebagai berikut:



Gambar Diagram Rencana dan Realisasi 2015 s/d 2018

Secara rinci hasil *evaluasi capaian kinerja fisik* terhadap 16 (enam belas) program dinas, diketahui bahwa terdapat 15 (lima belas) program hasil evaluasi capaian kinerja sangat baik dan 1 (satu) program yang berkinerja baik.

Dari hasil *evaluasi capaian kinerja keuangan* terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program yang berkinerja sangat baik , 1 (satu) program yang berkinerja baik , 1 (satu) program yang berkinerja cukup dan 1 (satu) program yang berkinerja kurang.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 terdapat 16 (enam belas) program terdiri dari 11 (sebelas) program strategis dan 5 program pendukung. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi / keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Ringkasan Eksekutif..... | ii |
| Daftar Isi..... | v |
| Daftar Tabel | vii |
| Daftar Gambar | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 2 |
| 1.3 Sumber Daya Manusia Organisasi | 6 |
| 1.4 Aspek Strategis Organisasi | 8 |
| 1.5 Isu Strategis..... | 10 |
| 1.6 Dasar Hukum..... | 10 |
| 1.7 Sistematika Laporan | 12 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 13 |
| 2.1 Rencana Strategis | 18 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 23 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 25 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... | 25 |
| 3.2 Capaian Kinerja Bidang / UPT..... | 26 |
| 3.3 Perbandingan Kinerja Organisasi | 84 |
| 3.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan | 85 |
| 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya | 94 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 3.6 Realisasi Anggaran..... | 96 |
|-----------------------------|----|

| | |
|----------------------|-----|
| BAB IV PENUTUP | 121 |
|----------------------|-----|

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II
2. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
3. Penghargaan – penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah selama tahun 2018
4. Print Out Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 dari aplikasi E-Sakip

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Tahun 2018 | 5 |
| Tabel 1. 2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan tingkat pendidikan | 5 |
| Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin | 6 |
| Tabel 2. 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021..... | 16 |
| Tabel 2. 2 Strategi dan Kebijakan Sasaran 1 | 20 |
| Tabel 2. 3 Strategi dan Kebijakan Sasaran 2 | 20 |
| Tabel 2. 4 Strategi dan Kebijakan Sasaran 3 | 21 |
| Tabel 2. 5 Strategi dan Kebijakan Sasaran 4 | 21 |
| Tabel 2. 6 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... | 22 |
| Tabel 2. 7 Indikator Perjanjian Kinerja | 22 |
| Tabel 2. 8 Pagu Anggaran per Program Tahun 2018..... | 22 |
| Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018..... | 25 |
| Tabel 3. 2 Capaian Target Kinerja Tahun 2018 | 25 |
| Tabel 3. 3 Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja..... | 28 |
| Tabel 3. 4 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Barat (Status Desember 2018)..... | 33 |
| Tabel 3. 5 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional..... | 48 |
| Tabel 3. 6 Sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | 53 |
| Tabel 3. 7 Target dan Capaian Indikator Persentase Air Minum Tahun 2018 | 55 |
| Tabel 3. 8 Program dan Kegiatan Pendukung Cakupan Air Minum Tahun 2018..... | 56 |
| Tabel 3. 9 Data Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota Tahun 2018 | 56 |
| Tabel 3. 10 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional | 57 |
| Tabel 3. 11 Indikator Cakupan Sanitasi | 58 |
| Tabel 3. 12 Data Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun 2018 | 59 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 3. 13 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional..... | 59 |
| Tabel 3. 14 Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Bidang Penataan Ruang..... | 61 |
| Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja | 62 |
| Tabel 3. 16 Kesesuaian Program RTRW Provinsi dengan Rencana Pembangunan | 78 |
| Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Bidang Bina Marga | 81 |
| Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya | 83 |
| Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang | 84 |
| Tabel 3. 20 Capaian Indikator Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan | 86 |
| Tabel 3. 21 Capaian Indikator Kinerja UPTD PIP2B | 86 |
| Tabel 3. 22 Perbanding Kinerja Organisasi Tahun Lalu | 87 |
| Tabel 3. 23 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Renstra | 88 |
| Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional | 89 |
| Tabel 3. 25 Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2018 | 102 |
| Tabel 3. 26 Realisasi Keuangan Tahun 2018 | 104 |
| Tabel 3. 27 Kendala Tahun 2018 | 116 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 | 6 |
| Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 berdasarkan Tingkat Pendidikan | 6 |
| Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2018 | 8 |
| Gambar 3. 1 Pembangunan Jalan Provinsi..... | 27 |
| Gambar 3. 2 Target dan Realisasi Per Tahun Jalan Mantap Menurut Renstra Tahun 2016-2021..... | 31 |
| Gambar 3. 3 Jembatan Lolong..... | 31 |
| Gambar 3. 4 Perbandingan Kemantapan Jalan Nasional dengan Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2015 – 2018 | 46 |
| Gambar 3. 5 Gedung Kebudayaan sebagai Salah Satu Gedung Strategis | 51 |
| Gambar 3. 6 Digaram Target dan Capaian Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2016 – 2021 | 62 |
| Gambar 3. 7 Capaian Kinerja Indikator | 90 |
| Gambar 3. 8 Persentase Belanja Tahun Anggaran 2018 | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PU dan Penataan Ruang dibentuk pada berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PU dan Penataan Ruang sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan

keuangan program kerja perangkat daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebanyak 16 program dan 116 kegiatan.

Dalam penyusunan Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

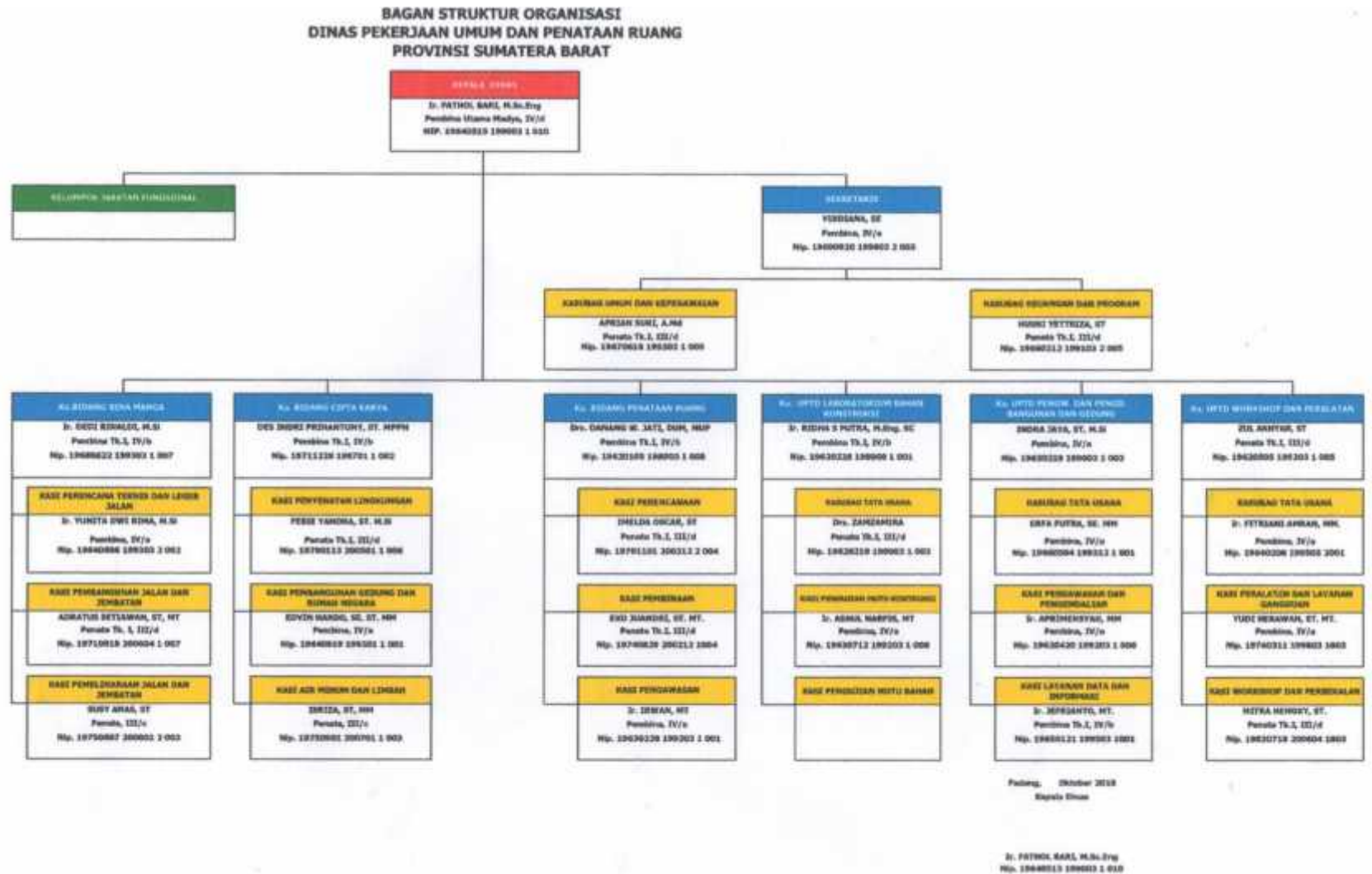
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Marga
 - 3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan

- 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4. Bidang Cipta Karya
 - 4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - 4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara
 - 4.3. Seksi Air Minum dan Limbah
5. Bidang Penataan Ruang
 - 5.1. Seksi Perencanaan
 - 5.2. Seksi Pembinaan
 - 5.3. Seksi Pengawasan
6. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan
 - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 6.2. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
 - 6.3. Seksi Pengujian Mutu Lingkungan
7. UPTD PIP2B
 - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.2. Seksi Data dan Informasi
 - 7.3. Seksi Pengembangan dan Permukiman
8. UPTD Workshop dan Peralatan
 - 8.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 8.2. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
 - 8.3. Seksi Workshop dan Perbekalan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

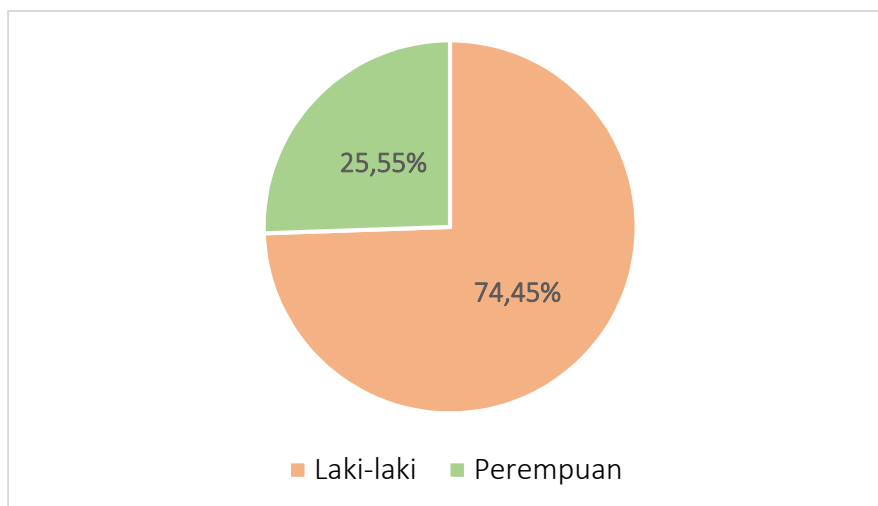
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pengujian konstruksi dan lingkungan, PIP2PB dan workshop dan peralatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. dilengkapi juga dengan beberapa kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Secara lengkap bagan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat berikut ini.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat



1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 368 (Tiga ratus enam delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana pada diagram dibawah ini.



Gambar 1. 1
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, berdasarkan Jenis Kelamin.

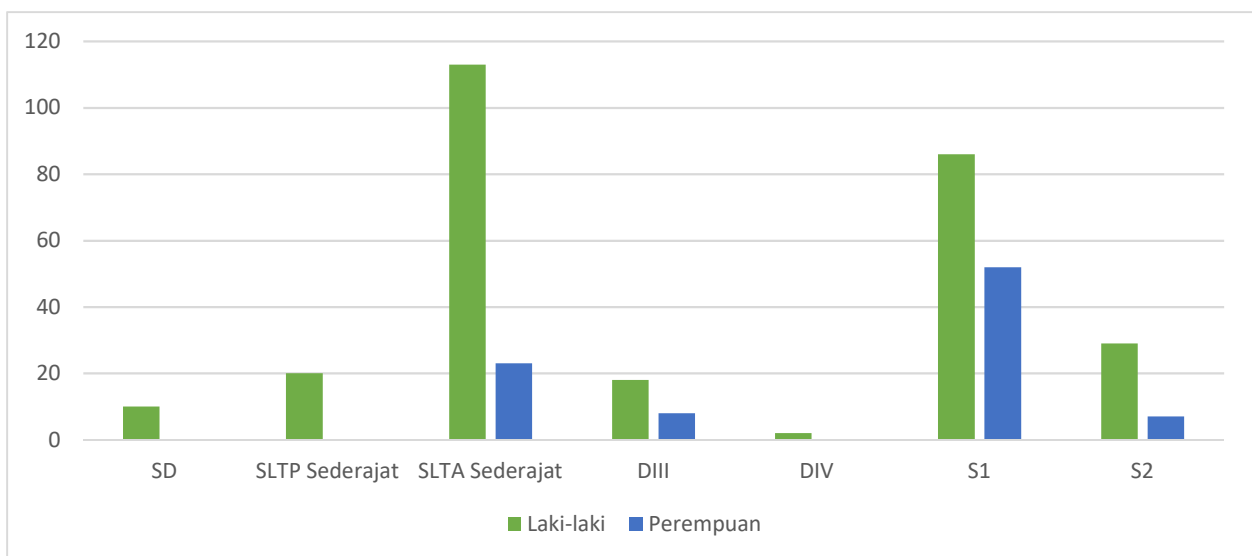
Tabel 1. 2
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

| Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai | Persentase |
|---------------|----------------|------------|
| Laki-laki | 274 orang | 74,45% |
| Perempuan | 94 orang | 25,55% |

Tabel 1. 3
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai | | |
|--------------------|----------------|-----------|-------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| SD | 10 | 0 | 10 |
| SLTP Sederajat | 20 | 0 | 20 |

| Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai | | |
|--------------------|----------------|-----------|-------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| SLTA Sederajat | 113 | 23 | 136 |
| DIII | 18 | 8 | 26 |
| DIV | 2 | 0 | 2 |
| S1 | 86 | 52 | 138 |
| S2 | 29 | 7 | 36 |
| Jumlah | 278 | 90 | 368 |

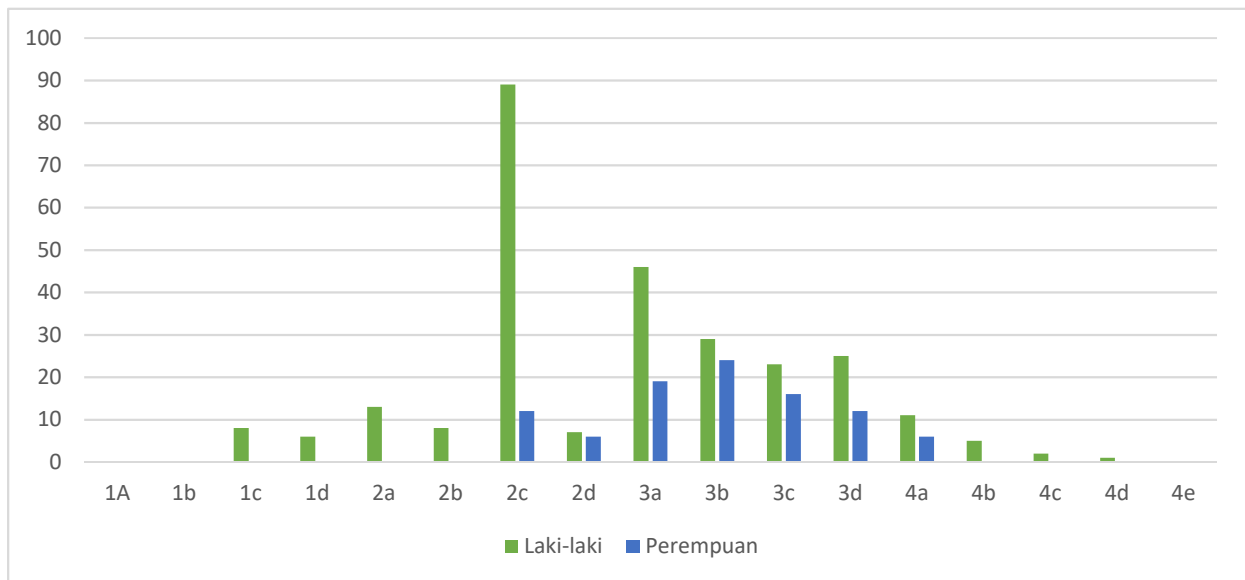


Gambar 1. 2
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018
berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

| Golongan | Jumlah Pegawai | | |
|----------|----------------|-----------|-------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| 1A | 0 | 0 | 0 |
| 1b | 0 | 0 | 0 |
| 1c | 8 | 0 | 8 |
| 1d | 6 | 0 | 6 |
| 2a | 13 | 0 | 13 |
| 2b | 8 | 0 | 8 |
| 2c | 89 | 12 | 101 |

| | | | |
|----|----|----|----|
| 2d | 7 | 6 | 13 |
| 3a | 46 | 19 | 65 |
| 3b | 29 | 24 | 53 |
| 3c | 23 | 16 | 39 |
| 3d | 25 | 12 | 37 |
| 4a | 11 | 6 | 17 |
| 4b | 5 | 0 | 5 |
| 4c | 2 | 0 | 2 |
| 4d | 1 | 0 | 1 |
| 4e | 0 | 0 | 0 |



Gambar 1. 3
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2018

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat

memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serata secara umum meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai dengan target nasional dan sebagaimana juga tertera *universal access* terkait prasarana air minum dan sanitasi yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi yang layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah dalam penyediaan pembangunan gedung negara dalam rangka rekonstruksi bangunan pasca gempa 2009. Selain itu, Dinas PUPR juga berperan dalam pembangunan Main Stadium Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan dan Convention Hall.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis lingkungan hidup yaitu Danau Maninjau. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan revisi RTRW serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, namun juga mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. Isu Strategis

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Sumatera Barat.

Adapun upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu antara lain : (1) masih tingginya panjang jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir, (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 72,058 % dengan deviasi yang cukup jauh dari kemantapan jalan nasional (89,42 %) sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan agar mencapai setidaknya 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak masih mengalami berbagai kendala, yaitu (1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset; (3) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur; (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Dalam bidang Penataan Ruang, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama pemanfaatan ruang; (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang; (3) terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

Selain faktor eksternal tersebut, permasalahan juga harus dihadapi dari sisi internal organisasi. Sesuai dengan Pergub No. 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penggabungan tupoksi keuangan dan program dibawah Subag Keuangan dan Program dirasa terlalu berat dalam mengawasi kedua tupoksi tersebut secara bersamaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B memiliki sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 subbagian.

1.6. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 53/2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

1.7. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran dan perjanjian kinerja tahun 2018. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Pada subbab Capaian Kinerja Organisasi disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Sedangkan pada subbab Realisasi Anggaran diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan dimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 adalah :

Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, didukung dengan 5 (lima) misi yakni :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terdapat 10 prioritas pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021;

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan investasi
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan

8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

- Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Tujuan 1 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah
- Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- Strategi 1 :
 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi
 2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- Arah Kebijakan :
 1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi
 2. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi
 3. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah
 4. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)
- Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung
- Strategi :
 1. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan
 2. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan

- Arah Kebijakan : 1. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.
2. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase
3. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
- Tujuan 2 : Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Sasaran 1 : Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
- Strategi 1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku
- Arah Kebijakan 1. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.
2. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
3. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang
4. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan

Berdasarkan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran dalam mendukung Misi 5, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Tabel 2. 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|---|
| Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah Meningkatkan | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi 2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah | <ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi 6. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi 7. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain) |
| | | Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 3. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan 4. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. 5. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase 6. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan |
| | Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya | Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang | <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang | <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata |

| Misi | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|------|-------------------------------------|---------|--|---|
| | dukung dan daya tampung lingkungan. | | <p>sesuai dengan RTRW</p> <p>4. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku</p> | <p>ruang.</p> <p>6. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi</p> <p>7. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang</p> <p>8. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan</p> |

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu:

Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Infrastruktur yang handal dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang bermutu, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya koneksinya antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air bersih yang baik, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang dapat dijadikan efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang mantap dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan penataan bangunan yang aman dan nyaman.
3. Mewujudkan pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi

4. Menciptakan penataan ruang yang berkelanjutan

2.1.1. Tujuan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
- b) Meningkatnya penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

2.1.2. Sasaran

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

- b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

- c) Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Adapun sarana dan prasarana umum dan aparatur meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

- d) Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1 Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk meningkatkan tata kelola organisasi dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Strategi dan Kebijakan Sasaran 1

| No | Strategi | Kebijakan |
|----|--|--|
| 1 | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi | Penyampaian dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja) dan pelaporan organisasi dengan tepat waktu |
| | | Peningkatan kualitas pelaporan kinerja organisasi |
| 2 | Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi | Penyediaan data kepegawaian yang akurat |
| | | Peningkatan layanan administrasi kepegawaian |
| | | Peningkatan pengelolaan sarana prasarana |
| 3 | Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan | Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan |
| | | Peningkatan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan |
| 4 | Meningkatkan pengawasan internal organisasi | Peningkatan tindak lanjut temuan pemeriksaan |
| | | Meningkatnya pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN |

Sasaran 2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan Sasaran 2

| No | Strategi | Kebijakan |
|----|--|---|
| 1 | Pengurangan jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir | Pembangunan jalan yang belum terhubung antar daerah terisolir |
| 2 | Meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan | Pembangunan jalan menuju daerah wisata dan pelabuhan udara/laut |
| 3 | Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan | Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan |
| | | Peningkatan jalan |

Sasaran 3 Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Strategi dan Kebijakan Sasaran 3

| No | Strategi | Kebijakan |
|----|--|---|
| 1 | Meningkatkan penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman | Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis |
| | | Pemeriksaan laik fungsi oleh tim ahli bangunan gedung (TABG) |
| | | Peningkatan kualitas tenaga teknis |
| 2 | Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi | Pembangunan infrastruktur air minum |
| | | Pembangunan infrastruktur sanitasi |

Sasaran 4 Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung

Untuk meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Strategi dan Kebijakan Sasaran 4

| No | Strategi | Kebijakan |
|----|--|--|
| 1 | Meningkatkan RTR yang berkekuatan hukum | Pengkajian dan penyempurnaan RTRW, RDTR dan PZ |
| | | Penyediaan dikumen RTRW, RDTR dan PZ |
| | | Penyediaan data spasial |
| 2 | Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR | Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan ruang |
| | | Peningkatan kuantitas PPNS Tata Ruang |

Tabel 2. 6. Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian setiap Tahun - | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021) |
|----|--|--|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | B | B | B | BB | BB | A | A | A |
| | | Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan | 94.5% | 95% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% |
| 2 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | Persentase Jalan Mantap | 91,13% / 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | 75% | 75% |
| | Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | 22 unit | 5 unit | 8 unit | 8 unit | 3 unit | 5 unit | 3 unit | 54 unit |
| | | Persentase cakupan air minum | 68% | 70% | 72% | 75 % | 80% | 83% | 86% | 86% |
| | | Persentase cakupan sanitasi | 66,84% | 72% | 73% | 75% | 78% | 79% | 80% | 80% |
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 86% | 86% |

2.2. Perjanjian Kinerja

Tabel 2. 6 Indikator Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB |
| | | Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan anggaran kas | 97 |
| 2 | Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah | Persentase Jalan Mantap | 72 |
| 3 | Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintah | 3 |
| | | Persentase cakupan air minum | 75 |
| | | Persentase cakupan sanitasi | 75 |
| 4 | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi | 82 |

Tabel 2. 7 Pagu Anggaran per Program Tahun 2018

| No | PROGRAM | ANGGARAN | KET |
|-----|---|-----------------|-----|
| 1. | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 5.125.016.140 | |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 6.986.908.167 | |
| 3 | Peningkatan Disiplin Aparatur | 309.819.200 | |
| 4. | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 185.148.000 | |
| 5. | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1.369.035.000 | |
| 6. | Pembangunan Jalan dan Jembatan | 204.488.943.817 | |
| 7. | Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 65.298.230.300 | |
| 8. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 1.982.623.465 | |
| 9. | Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | 836.941.000 | |
| 10. | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provisnis dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota | 157.341.202.743 | |
| 11. | Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi | 1.463.838.965 | |
| 12. | Perencanaan Penataan Ruang | 4.929.252.510 | |
| 13. | Pengendalian dan Penataan Ruang | 479.701.250 | |
| 14. | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 302.700.755 | |
| 15. | Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi | 638.335.750 | |
| 16. | Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota | 2.771.215.000 | |
| | JUMLAH | 454.508.912.062 | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

| No | Klasifikasi Penilaian | Predikat |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | 85% - 100% | Sangat Baik |
| 2 | 75% - 84% | Baik |
| 3 | 56% - 74% | Cukup |
| 4 | < 55% | kurang |

Tabel 3. 2 Capaian Target Kinerja Tahun 2018

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|-------------------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya tata | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB | BB | 100 % |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|--------------------|
| | kelola organisasi | Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan | 97 % | 94,28 % | 97,19% |
| 2 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | Persentase Jalan Mantap | 72 % | 72,058 % | 100,08% |
| | Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | 3 unit | 3 unit | 100 % |
| | | Persentase cakupan air minum | 75 % | 76,04 % | 101,38% |
| | | Persentase cakupan sanitasi | 75 % | 75,19 % | 100,25% |
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi | 82 % | 84,00 % | 102,43% |

3.1.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum ada penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dari target BB pada Tahun 2018.

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB | BB | 100% |

3.1.2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Adapun realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|-------------------------------------|--|---------|-----------|--------------------|
| 2. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan | 97,00 % | 94,28 % | 97,19% |

Untuk Realisasi fisik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat mencapai realisasi diatas target yaitu sebesar 97,64% dari target 97%. Sedangkan Realisasi keuangan sebesar 90,92% atau berada dibawah target 95%.

Untuk mencari gabungan realisasi antara fisik dan keuangan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{97,64\% + 90,92\%}{2} = 94,28 \%$$

2

$$\text{Capaian target : } (94,28 : 97,00) \times 100 = 97,19 \%$$

3.1.3. Persentase Jalan Mantap

Persentase jalan mantap merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dengan Panjang jalan provinsi sepanjang 1525,200 km, ditargetkan pada akhir tahun 2018 persentase kemantapan jalan provinsi dapat manjadi 72,058 %.



Gambar 3. 1 Pembangunan Jalan Provinsi

Dengan pencapaian atas target sebesar 100,08% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk Persentase Jalan Mantap adalah Sangat Baik.

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|---|-------------------------|--------|-----------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase jalan mantap | 72% | 72,058% | 100,08% |

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2018 sebesar 72,058%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi ini.

Tabel 3. 3
Program / Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | FISIK | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|----|---|--------------------|--------|-----------------|-------|----------------|
| VI | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 204.488.943.817,00 | 91,69 | 181.077.032.125 | 88,55 | 23.411.911.692 |
| 1 | PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 919.816.700,00 | 100,00 | 911.343.209 | 99,08 | 8.473.491 |
| 2 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA PADANG DAN KAB. PESISIR SELATAN | 7.760.310.900,00 | 100,00 | 7.748.750.850 | 99,85 | 11.560.050 |
| 3 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK | 27.361.349.400,00 | 100,00 | 27.352.454.600 | 99,97 | 8.894.800 |
| 4 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH | 10.297.251.700,00 | 100,00 | 10.268.177.700 | 99,72 | 29.074.000 |
| 5 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT | 11.463.198.200,00 | 100,00 | 11.459.817.350 | 99,97 | 3.380.850 |
| 6 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA | 13.219.999.000,00 | 100,00 | 13.218.918.950 | 99,99 | 1.080.050 |
| 7 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. TANAH DATAR DAN KOTA SAWAHLUNTO | 11.742.896.700,00 | 92,87 | 10.557.404.479 | 89,90 | 1.185.492.221 |
| 8 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI | 25.279.632.000,00 | 100,00 | 25.275.414.984 | 99,98 | 4.217.016 |
| 9 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SOLOK DAN KAB. SOLOK SELATAN | 10.825.704.800,00 | 100,00 | 10.821.169.800 | 99,96 | 4.535.000 |
| 10 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 4.984.423.800,00 | 100,00 | 4.979.475.000 | 99,90 | 4.948.800 |
| 11 | PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-I | 9.529.042.800,00 | 100,00 | 9.511.768.500 | 99,82 | 17.274.300 |
| 12 | PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI | | | | 79,21 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|--------|----------------|--------|---------------|
| | WILAYAH-II | 14.127.563.500,00 | 86,00 | 11.191.081.300 | | 2.936.482.200 |
| 13 | PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN PROVINSI | 821.948.650,00 | 100,00 | 777.555.185 | 94,60 | 44.393.465 |
| 14 | PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN PROVINSI | 11.200.000.000,00 | 35,39 | 3.963.882.728 | 35,39 | 7.236.117.272 |
| 15 | PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS | 7.886.767.500,00 | 3,02 | 238.369.312 | 3,02 | 7.648.398.188 |
| 16 | MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN UTILITAS UMUM | 54.618.800,00 | 100,00 | 54.179.458 | 99,20 | 439.342 |
| 17 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI | 599.994.800,00 | 100,00 | 593.555.518 | 98,93 | 6.439.282 |
| 18 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PROVINSI | 483.169.000,00 | 100,00 | 480.741.662 | 99,50 | 2.427.338 |
| 19 | PENYUSUNAN DATABASE DAN SURVEY JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 1.172.052.667,00 | 100,00 | 925.721.196 | 78,98 | 246.331.471 |
| 20 | PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 6.674.484.000,00 | 100,00 | 6.464.473.163 | 96,85 | 210.010.837 |
| 21 | PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN PROVINSI DAK | 22.662.000.000,00 | 100,00 | 18.878.765.861 | 83,31 | 3.783.234.139 |
| 22 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN | 5.422.718.900,00 | 100,00 | 5.404.011.320 | 99,66 | 18.707.580 |
| VII | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 65.298.230.300,00 | 97,92 | 62.760.807.356 | 96,11 | 2.537.422.944 |
| 1 | REHAB / PEMEL RUTIN JEMBATAN PROVINSI DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN | 3.261.727.800,00 | 100,00 | 2.971.851.094 | 91,11 | 289.876.706 |
| 2 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BUKITTINGGI DAN AGAM TIMUR | 3.102.564.000,00 | 100,00 | 3.101.701.200 | 99,97 | 862.800 |
| 3 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SO KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH | 4.949.178.500,00 | 100,00 | 4.944.719.190 | 99,91 | 4.459.310 |
| 4 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG | 3.464.000.000,00 | 100,00 | 3.458.576.410 | 99,84 | 5.423.590 |
| 5 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PADANG | 2.373.808.000,00 | 100,00 | 2.346.548.100 | 98,85 | 27.259.900 |
| 6 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK | 2.986.084.000,00 | 100,00 | 2.984.141.450 | 99,93 | 1.942.550 |
| 7 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB SOLOK SELATAN | 2.755.435.000,00 | 100,00 | 2.755.356.160 | 100,00 | 78.840 |
| 8 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA | 3.074.829.000,00 | 100,00 | 3.074.066.612 | 99,98 | 762.388 |
| 9 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PESISIR SELATAN DAN KEP. MENTAWAI | 3.026.260.000,00 | 100,00 | 2.966.017.350 | 98,01 | 60.242.650 |
| 10 | PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN | 1.200.000.000,00 | 100,00 | 1.160.823.471 | 96,74 | 39.176.529 |
| 11 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. AGAM | 2.249.905.000,00 | 100,00 | 2.249.685.540 | 99,99 | 219.460 |
| 12 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN | 3.177.291.000,00 | 100,00 | 3.165.501.089 | 99,63 | 11.789.911 |
| 13 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN BARAT | 2.813.732.000,00 | 100,00 | 2.809.913.940 | 99,86 | 3.818.060 |
| 14 | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH I | 9.793.084.300,00 | 100,00 | 9.787.318.600 | 99,94 | 5.765.700 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 15 | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH II | 10.857.289.700,00 | 100,00 | 10.851.023.450 | 99,94 | 6.266.250 |
| 16 | PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN JALAN DAN JEMBATAN | 6.213.042.000,00 | 66,67 | 4.133.563.700 | 66,53 | 2.079.478.300 |
| VIII | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | 1.982.623.465,00 | 100,00 | 1.967.517.728 | 99,24 | 15.105.737 |
| 1 | PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN | 340.022.300,00 | 100,00 | 337.965.692 | 99,40 | 2.056.608 |
| 2 | PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN | 1.371.757.275,00 | 100,00 | 1.371.569.881 | 99,99 | 187.394 |
| 3 | MONITORING PENGENDALIAN MUTU UPTD | 270.843.890,00 | 100,00 | 257.982.155 | 95,25 | 12.861.735 |

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan Kegiatan penyusunan data base dan survey jalan dan jembatan provinsi pekerjaan paket survey IRMS / PRMS dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- dengan Perjanjian Kontrak No. 620/145/KTR-BM/2018 Tanggal 12 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 295.240.000,- (92,29 %) yang dikerjakan oleh PT. Riska Engineering Konsultan.

Maksud dan tujuan dari Survey Pembinaan Jalan Provinsi (IRMS) meliputi beberapa kegiatan :

1. Menghimpun data base jalan melalui kegiatan survey – survey dan dilanjutkan tahapan pekerjaan screening data base hasil survey sesuai dengan kaidah IRMS yang digunakan Dirjen Bina Marga kedalam suatu file yang berisi informasi status & fungsi, Peta Kondisi (SDI), Peta Kekasaran (IRI) serta pemograman tahunan, budjeting serta jenis penanganan jalan provinsi.
2. Melakukan pemutakhiran terhadap peta jaringan jalan provinsi Sumatera Barat digital berbasis GIS dengan skala 1 : 250.000 yang menampilkan sebaran jaringan jalan provinsi diseluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan atribut status jalan, kondisi jalan, data lalu lintas (LHR), jenis perkerasan dan panjang ruas, hasil survey pada kegiatan ini.

Informasi penjelasan data sebagai berikut :

- a. Dasar perhitungan kemantapan jalan
 - 1) Dasar perhitungan realisasi kemantapan jalan provinsi

Perbandingan jumlah mantap jalan provinsi dibandingkan dengan total panjang jalan provinsi (km) dikalikan 100 %.

) Dasar perhitungan realisasi kemantapan jalan nasional

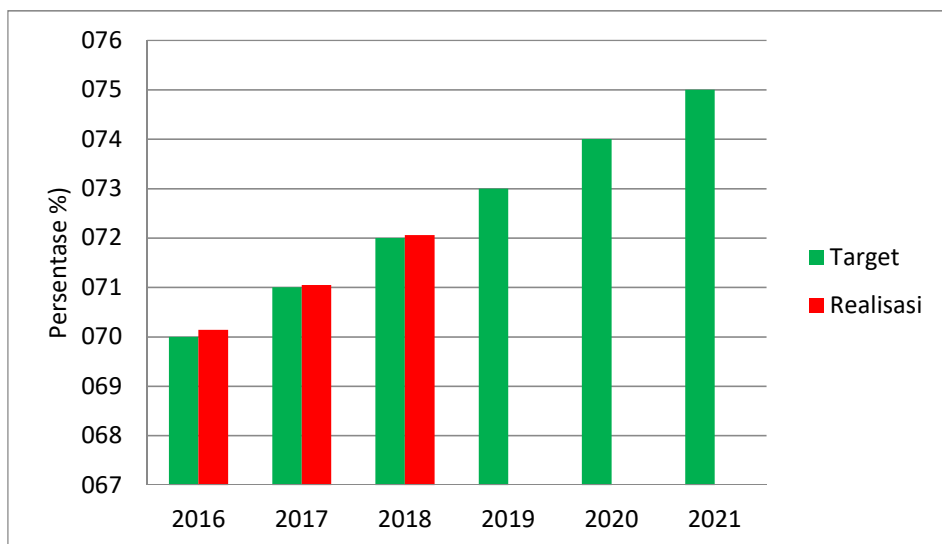
Perbandingan jumlah mantap jalan provinsi dibandingkan dengan total panjang jalan provinsi (km) dikalikan 100 %.

b. Sumber data

) Bidang Bina Marga (Survey IRMS / BMS) Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat.

) Satker P2JN Kementerian PUPR.

Mengacu pada target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Jalan Mantap.



Gambar 3. 2

Target dan Realisasi Per Tahun Jalan Mantap Menurut Renstra Tahun 2016-2021



Gambar 3. 3 Jembatan Lolong

Adapun panjang jalan provinsi dalam kondisi Mantap mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018 adalah : peningkatan jalan sepanjang 17,66 km, jalan menuju daerah terisolir sepanjang 15,62 km, jalan menuju daerah wisata sepanjang 6,83 km dan jalan menuju pelabuhan laut dan udara sepanjang 9,20 km.

DATA KEGIATAN PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN TAHUN 2018

| No | URAIAN | VOLUME | KET |
|----|---|----------|-----|
| I | TERISOLIR | 15,62 km | |
| a | Paket Pembangunan Jalan Lubuk Sikaping – Talu DAK (P.096) | 7,00 km | |
| b | Paket Peningkatan Jalan Abai Sangir – Sei.Dareh (P.056.3) | 1,10 km | |
| c | Paket Peningkatan Jalan Provinsi Pangkalan Kapur Sembilan (P.076) | 0,50 km | |
| d | Paket Pembangunan Jalan Kantor Camat/Berkat (P.104) | 1,12 km | |
| e | Paket Pembangunan Jalan Tapus - Muara Sei.Lolo – Gelugur (P.101) | 2,58 km | |
| f | Paket Peningkatan Jalan Surantih – Kayu Aro – Langgai (P.086) | 3,33 km | |

| No | URAIAN | VOLUME | KET |
|----|---|---------|-----|
| II | WISATA | 6,83KM | |
| a | Paket Peningkatan Jalan Sp.Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani (P.092) | 3,29 km | |
| b | Paket Pembangunan Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) Paket II | 1,53 km | |
| c | Paket Pelebaran Jalan Manggopoh – Padang Luar (P.025) (Dari Bayur menuju Maninjau) | 0,72 km | |
| d | Paket Pembangunan Pasar Baru – Alahan Panjang (P.073) Paket I | 1,30 km | |

| No | URAIAN | VOLUME | KET |
|-----|--|---------|-----|
| III | PELABUHAN LAUT / UDARA | 9,20 km | |
| a | Paket Pembangunan Jalan Teluk Bayur – Nipah – Purus DAK (P.098) | 1,95 km | |
| b | Paket Pembangunan Jalan Bungo Tanjung – Teluk Tapang DAK (P.097) | 6,80 km | |
| c | Paket Pembangunan Jalan Simp.Duku (Ketaping) Pariaman (P.075) | 0,45 km | |

| No | URAIAN | VOLUME | KET |
|----|---|----------|-----|
| IV | PENINGKATAN JALAN | 17,66 km | |
| a | Paket Peningkatan Jalan Pintu Angin – Labuah Saiyo (P.094) | 3,11 Km | |
| b | Paket Peningkatan Jalan Matur – Pelembayan (P.080) | 1,33 Km | |
| c | Paket Peningkatan Jalan Palembang – Palupuah (Simp.Patai) (P.081) | 1,05 km | |

| | | |
|---|--|---------|
| d | Paket Peningkatan Jalan Palupuh – Pua Pagadih - Koto Tinggi (P.090) Paket I | 1,03 km |
| e | Paket Lanjutan Pembangunan Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088) | 2,05 km |
| f | Paket Peningkatan Jalan Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038) | 0,93 km |
| g | Paket Peningkatan Jalan Simp. Baso – Piladang (P.o79) | 1,05 km |
| h | Paket Peningkatan Simp. Koto Baru – Junction (P.012) | 2,23 km |
| i | Paket Peningkatan Jalan 2 Jalur didepan kantor Bupati Ruas Jalan Tj. Ampal – Sijunjung (P.008) | 0,31 km |
| j | Paket Peningkatan Jalan Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi (P.090) | 1,49 km |
| k | Paket Peningkatan Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084) | 1,60 km |
| l | Paket Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro – Lubuk Malako (P.056.1) | 1,64 km |
| m | Paket Pengamanan Badan Jalan Panti – Simpang Empat (P.031) | 0,05 km |

Tabel 3. 4 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Barat (Status Desember 2018)

| KONDISI | TAHUN | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | (KM) / M' | (%) | (KM) / M' | (%) | (KM) / M' | (KM) / M' | (KM) / M' | (KM) / M' |
| Mantap | 1121,41 | 91.13 | 1050.04 | 70.14 | 1083.650 | 71.05 | 1099,033 | 72,058 |
| Tidak Mantap | 109.21 | 8.67 | 475.16 | 29.86 | 441.550 | 28.95 | 426,167 | 27,942 |
| Panjang Total | 1230,62 | 100 | 1525.20 | 100 | 1525.200 | 100 | 1525,200 | 100,000 |

KONDISI KEMANTAPAN RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2018
REKAPITULASI KONDISI KEMANTAPAN JALAN STATUS TAHUN 2018
KONDISI UMUM KEMANTAPAN JALAN BERDASARKAN NILAI IRI

Kondisi Perkerasan Badan Jalan

| NAMA PROPINSI | PERKERASAN BADAN JALAN | | | | PANJANG (SK) |
|----------------|------------------------|------------------|---------|--------|--------------|
| | ASPAL | TEFLOID /KERIKIL | TANAH | BETON | |
| SUMATERA BARAT | 1139,838 | 9,300 | 358,592 | 17,470 | 1525,200 |

Dengan Detail Data Kondisi Perkerasan Badan Jalan sebagai berikut :

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | PERKERASAN BADAN JALAN | | | | PANJANG (SK) |
|----|----------|---|------------------------|------------------|-------|-------|--------------|
| | | | ASPAL | TEFLOID/ KERIKIL | TANAH | BETON | |
| 1 | 13.007 | SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU | 11,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,080 |
| 2 | 13.008 | TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| 3 | 13.010 | SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 |
| 4 | 13.011 | SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU | 11,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,900 |
| 5 | 13.012 | SIMP.KOTO BARU - JUNCTION | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,400 |
| 6 | 013.018 | INDRAPURA - MUARA SAKAI | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 7 | 06.025 | MANGGOPOH - PADANG LUAR | 69,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,430 |
| 8 | 06.028 | SICINCIN - KURAITAJI | 16,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,440 |
| 9 | 013.031 | PANTI - SIMPANG EMPAT | 74,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,230 |
| 10 | 06.033 | SIMP. EMPAT - SASAK | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| 11 | 06.034.2 | AIR BALAM - AIR BANGIS | 12,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,600 |
| 12 | 06.035 | KUBU KERAMBIL - BATUSANGKAR | 18,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,500 |
| 13 | 06.036 | BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA) | 28,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,790 |
| 14 | 06.037 | BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO | 10,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,400 |
| 15 | 06.038.2 | GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA) | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 30,600 |
| 16 | 06.039 | GUGUK CINO - SITANGKAI | 15,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,120 |
| 17 | 06.040 | SITANGKAI - TANJUNG AMPALU | 17,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,280 |
| 18 | 06.044 | BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI | 50,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,610 |
| 19 | 06.054 | JUNCTION - ABAISIAT | 12,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,600 |
| 20 | 06.055 | SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,400 |
| 21 | 06.056.1 | SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | PERKERASAN BADAN JALAN | | | | PANJANG (SK) |
|----|----------|--|------------------------|---------------------|--------|-------|--------------|
| | | | ASPAL | TEFLOID/ KERIKIL | TANAH | BETON | |
| 22 | 06.056.2 | LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,000 |
| 23 | 06.056.3 | ABAI SANGIR - SEI DAREH | 16,965 | 0,000 | 56,595 | 0,440 | 74,000 |
| 24 | 06.068 | PADANGSAWAH - KUMPULAN | 35,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 36,500 |
| 25 | 06.069.2 | BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI | 46,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,850 |
| 26 | 06.070 | BATUSANGKAR - OMBILIN | 18,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,510 |
| 27 | 06.071 | SOLOK- ALAHAN PANJANG | 47,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,800 |
| 28 | 06.072 | LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU | 30,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,900 |
| 29 | 06.073 | PASAR BARU - ALAHAN PANJANG | 27,965 | 0,000 | 21,435 | 0,000 | 49,400 |
| 30 | 06.075 | SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN | 20,020 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 20,500 |
| 31 | 06.076 | PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR | 53,344 | 0,000 | 20,606 | 0,000 | 73,950 |
| 32 | 06.078 | SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA | 39,150 | 0,000 | 0,000 | 0,25 | 39,400 |
| 33 | 06.079 | SIMP BASO - PILADANG | 11,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,140 |
| 34 | 06.080 | MATUR - PALEMBAYAN | 20,600 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 20,700 |
| 35 | 06.081 | PALEMBAYAN - PALUPUH (SIMP.PATAI) | 13,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,300 |
| 36 | 06.082 | ALAHAN PANJANG - KILIRAN JAO | 18,508 | 0,000 | 53,612 | 0,780 | 72,900 |
| 37 | 06.083 | TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN | 31,112 | 0,000 | 12,988 | 0,000 | 44,100 |
| 38 | 06.084 | JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH) | 14,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,170 |
| 39 | 06.085 | SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,050 | 2,050 |
| 40 | 06.086 | SURANTIAH - KAYU ARO - LANGGAI | 9,700 | 0,000 | 17,360 | 0,640 | 27,700 |
| 41 | 06.087 | DUKU - SICINCIN | 0,300 | 0,000 | 28,350 | 0,000 | 28,650 |
| 42 | 06.088 | PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,000 |
| 43 | 06.089 | JL. BALINGKA - TEROWONGAN - NGARAI SIANOK | 0,000 | 0,000 | 9,700 | 0,000 | 9,700 |
| 44 | 06.090 | PALUPUAH - PUA GADIH - KOTO TINGGI | 14,147 | 0,000 | 9,343 | 1,510 | 25,000 |
| 45 | 06.091 | SIMPANG NAPAL - BUKIT BUAL - TANJUNG AMPALU | 1,067 | 0,000 | 21,633 | 0,300 | 23,000 |
| 46 | 06.092 | SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI | 28,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,400 |
| 47 | 06.093 | SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING | 28,300 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 30,000 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | PERKERASAN BADAN JALAN | | | | PANJANG (SK) |
|-------|---------|--|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------|
| | | | ASPAL | TEFLOID/ KERIKIL | TANAH | BETON | |
| 48 | 06.094 | PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO | 4,035 | 0,000 | 1,465 | 0,000 | 5,500 |
| 49 | 06.095 | RAO - ROKAN (BATAS RIAU) | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 |
| 50 | 06.096 | LUBUK SIKAPING - TALU | 16,800 | 0,000 | 11,200 | 0,000 | 28,000 |
| 51 | 06.097 | BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG | 1,363 | 2,000 | 39,837 | 0,000 | 43,200 |
| 52 | 06.098 | TELUK BAYUR - NIPAH - PURUS | 9,408 | 0,000 | 2,592 | 0,000 | 12,000 |
| 53 | 06.099 | PURUS - BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 |
| 54 | 06.100 | BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 |
| 55 | 06.101 | TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR | 11,867 | 6,300 | 28,833 | 0,000 | 47,000 |
| 56 | 06.102 | RAWANG - TALAWI | 3,837 | 0,000 | 1,663 | 0,500 | 6,000 |
| 57 | 06.103 | SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,100 | 5,100 |
| 58 | 06.104 | KANTOR CAMAT - BERKAT | 0,000 | 0,000 | 3,900 | 2,000 | 5,900 |
| TOTAL | | | 1139,84 | 9,300 | 358,59 | 17,47 | 1525,200 |

Kondisi Jalan Berdasarkan IRI

| NAMA PROPINSI | KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | |
| | (KM) | % | (KM) | % | (KM) | % | (KM) | % |
| SUMATERA BARAT | 228,393 | 14,975 | 870,640 | 57,084 | 179,323 | 11,757 | 246,844 | 16,184 |

Dengan detail data Kondisi Jalan Berdasarkan IRI sebagai berikut :

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-------------------------------|---|--------|---|--------------|---|-------------|---|
| | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | |
| | | | (KM) | % | (KM) | % | (KM) | % | (KM) | % |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI | | | | | | | |
|----|----------|---|-------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | |
| | | | (KM) | % | (KM) | | (KM) | % | (KM) | % |
| 1 | 13.007 | SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU | 2,100 | 10,695 | 7,481 | 78,502 | 1,499 | 10,803 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 13.008 | TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG | 4,220 | 21,100 | 13,552 | 67,760 | 2,028 | 10,140 | 0,200 | 1,000 |
| 3 | 13.010 | SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU | 2,433 | 8,390 | 21,983 | 75,803 | 3,884 | 13,393 | 0,700 | 2,414 |
| 4 | 13.011 | SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU | 0,600 | 5,042 | 8,846 | 74,336 | 1,550 | 13,025 | 0,904 | 7,597 |
| 5 | 13.012 | SIMP.KOTO BARU - JUNCTION | 0,300 | 38,556 | 3,300 | 41,593 | 1,800 | 19,407 | 0,000 | 0,444 |
| 6 | 013.018 | INDRAPURA - MUARA SAKAI | 2,600 | 2,740 | 3,154 | 70,342 | 0,883 | 18,699 | 0,663 | 8,219 |
| 7 | 06.025 | MANGGOPOH - PADANG LUAR | 10,995 | 15,836 | 28,554 | 41,126 | 29,881 | 43,038 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 06.028 | SICINCIN - KURAITAJI | 2,400 | 14,599 | 12,012 | 73,066 | 2,028 | 12,336 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 013.031 | PANTI - SIMPANG EMPAT | 3,559 | 4,795 | 57,115 | 76,943 | 12,201 | 16,437 | 1,355 | 1,825 |
| 10 | 06.033 | SIMP. EMPAT - SASAK | 1,670 | 8,350 | 14,252 | 71,260 | 3,889 | 19,445 | 0,189 | 0,945 |
| 11 | 06.034.2 | AIR BALAM - AIR BANGIS | 0,500 | 3,968 | 12,020 | 95,397 | 0,080 | 0,635 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 06.035 | KUBU KERAMBIL - BATUSANGKAR | 1,639 | 8,859 | 11,302 | 61,092 | 5,559 | 30,049 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 06.036 | BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA) | 5,036 | 17,492 | 20,998 | 72,935 | 2,756 | 9,573 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 06.037 | BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO | 4,400 | 42,308 | 5,000 | 48,077 | 1,000 | 9,615 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 06.038.2 | GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA) | 0,000 | 0,000 | 22,188 | 72,510 | 3,193 | 10,435 | 5,219 | 17,056 |
| 16 | 06.039 | GUGUK CINO - SITANGKAI | 0,000 | 0,000 | 10,097 | 66,779 | 5,023 | 33,221 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 06.040 | SITANGKAI - TANJUNG AMPALU | 6,048 | 35,000 | 8,724 | 50,486 | 2,400 | 13,889 | 0,108 | 0,625 |
| 18 | 06.044 | BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI | 4,439 | 8,771 | 36,904 | 72,918 | 8,667 | 17,125 | 0,600 | 1,186 |
| 19 | 06.054 | JUNCTION - ABAISIAT | 2,710 | 21,508 | 9,690 | 76,905 | 0,200 | 1,587 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 06.055 | SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG | 0,000 | 0,000 | 3,720 | 84,545 | 0,680 | 15,455 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 06.056.1 | SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO | 8,700 | 43,500 | 8,242 | 41,210 | 2,173 | 10,865 | 0,885 | 4,425 |
| 22 | 06.056.2 | LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR | 0,100 | 0,588 | 11,910 | 70,059 | 3,767 | 22,159 | 1,223 | 7,194 |
| 23 | 06.056.3 | ABAI SANGIR - SEI DAREH | 3,259 | 4,404 | 32,400 | 43,784 | 2,300 | 3,108 | 36,041 | 48,704 |
| 24 | 06.068 | PADANGSAWAH - KUMPULAN | 8,170 | 22,384 | 26,431 | 72,414 | 0,900 | 2,466 | 0,999 | 2,737 |
| 25 | 06.069.2 | BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI | 12,171 | 25,979 | 27,640 | 58,997 | 5,150 | 10,993 | 1,889 | 4,032 |
| 26 | 06.070 | BATUSANGKAR - OMBILIN | 2,693 | 14,549 | 13,824 | 74,684 | 1,993 | 10,767 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 06.071 | SOLOK- ALAHAN PANJANG | 8,521 | 17,826 | 31,024 | 64,904 | 7,054 | 14,757 | 1,201 | 2,513 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI | | | | | | | |
|----|---------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|-------------|---------|
| | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | |
| | | | (KM) | % | (KM) | | (KM) | % | (KM) | % |
| 28 | 06.072 | LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU | 3,378 | 10,932 | 18,870 | 61,068 | 8,652 | 28,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 06.073 | PASAR BARU - ALAHAN PANJANG | 1,300 | 2,632 | 22,695 | 45,941 | 10,986 | 22,239 | 14,419 | 29,188 |
| 30 | 06.075 | SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN | 10,320 | 50,341 | 8,298 | 40,478 | 1,600 | 7,805 | 0,282 | 1,376 |
| 31 | 06.076 | PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR | 11,431 | 15,458 | 58,406 | 78,980 | 2,576 | 3,483 | 1,537 | 2,078 |
| 32 | 06.078 | SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA | 31,781 | 80,662 | 7,619 | 19,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 06.079 | SIMP BASO - PILADANG | 0,200 | 1,795 | 3,223 | 28,932 | 6,628 | 59,497 | 1,089 | 9,776 |
| 34 | 06.080 | MATUR - PALEMBAYAN | 2,000 | 9,662 | 10,700 | 51,691 | 5,600 | 27,053 | 2,400 | 11,594 |
| 35 | 06.081 | PALEMBAYAN - PALUPUH (SIMP.PATAI) | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 30,075 | 0,500 | 3,759 | 8,800 | 66,165 |
| 36 | 06.082 | ALAHAN PANJANG - KILIRAN JAO | 0,938 | 1,287 | 43,300 | 59,396 | 4,650 | 6,379 | 24,012 | 32,938 |
| 37 | 06.083 | TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN | 16,609 | 37,662 | 24,503 | 55,562 | 0,000 | 0,000 | 2,988 | 6,776 |
| 38 | 06.084 | JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH) | 4,503 | 31,778 | 7,563 | 53,373 | 2,104 | 14,848 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | 06.085 | SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL) | 0,000 | 0,000 | 2,050 | 36,585 | 0,000 | 43,902 | 0,000 | 19,512 |
| 40 | 06.086 | SURANTIAH - KAYU ARO - LANGGAI | 0,500 | 1,805 | 13,500 | 48,736 | 1,300 | 4,693 | 12,400 | 44,765 |
| 41 | 06.087 | DUKU - SICINCIN | 0,000 | 0,000 | 10,300 | 35,951 | 0,000 | 0,000 | 18,350 | 64,049 |
| 42 | 06.088 | PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN | 3,900 | 12,581 | 12,600 | 40,645 | 5,400 | 17,419 | 9,100 | 29,355 |
| 43 | 06.089 | JL. BALINGKA - TEROWONGAN - NGARAI SIANOK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,700 | 100,000 |
| 44 | 06.090 | PALUPUAH - PUA GADIH - KOTO TINGGI | 2,617 | 10,468 | 7,600 | 30,400 | 4,100 | 16,400 | 10,683 | 42,732 |
| 45 | 06.091 | SIMPANG NAPAL - BUKIT BUAL - TANJUNG AMPALU | 0,800 | 3,478 | 0,304 | 1,322 | 0,000 | 0,000 | 21,896 | 95,200 |
| 46 | 06.092 | SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI | 10,553 | 37,158 | 15,547 | 54,743 | 1,900 | 6,690 | 0,400 | 1,408 |
| 47 | 06.093 | SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING | 2,000 | 6,667 | 21,950 | 73,167 | 3,000 | 10,000 | 3,050 | 10,167 |
| 48 | 06.094 | PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO | 5,100 | 92,727 | 0,400 | 7,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | 06.095 | RAO - ROKAN (BATAS RIAU) | 8,700 | 26,364 | 20,800 | 63,030 | 2,900 | 8,788 | 0,600 | 1,818 |
| 50 | 06.096 | LUBUK SIKAPING - TALU | 2,500 | 8,929 | 23,900 | 85,357 | 0,400 | 1,429 | 1,200 | 4,286 |
| 51 | 06.097 | BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG | 0,500 | 1,157 | 30,863 | 71,442 | 0,000 | 0,000 | 11,837 | 27,400 |
| 52 | 06.098 | TELUK BAYUR - NIPAH - PURUS | 4,100 | 34,167 | 3,819 | 31,825 | 1,489 | 12,408 | 2,592 | 21,600 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | |
| | | | (KM) | % | (KM) | | (KM) | % | (KM) | % |
| 53 | 06.099 | PURUS - BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 100,000 |
| 54 | 06.100 | BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 32,917 | 0,000 | 33,750 | 0,000 | 33,333 |
| 55 | 06.101 | TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR | 3,400 | 7,234 | 23,867 | 50,781 | 2,600 | 5,532 | 17,133 | 36,453 |
| 56 | 06.102 | RAWANG - TALAWI | 0,000 | 0,000 | 4,300 | 71,667 | 0,400 | 6,667 | 1,300 | 21,667 |
| 57 | 06.103 | SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 80,392 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 19,608 |
| 58 | 06.104 | KANTOR CAMAT - BERKAT | 2,000 | 33,898 | 2,000 | 33,898 | 0,000 | 0,000 | 1,900 | 32,203 |
| TOTAL | | | 228,393 | 14,975 | 870,640 | 57,084 | 179,323 | 11,757 | 246,844 | 16,184 |

Kemantapan Jalan

| Mantap | | Tidak Mantap | |
|----------|--------|--------------|--------|
| Km | % | Km | % |
| 1099,033 | 72,058 | 426,167 | 27,942 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KEMANTAPAN JALAN | | | |
|----|----------|---|------------------|--------|--------------|--------|
| | | | MANTAP | | TIDAK MANTAP | |
| | | | (KM) | % | (KM) | % |
| 1 | 13.007 | SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU | 9,581 | 86,471 | 1,499 | 13,529 |
| 2 | 13.008 | TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG | 17,772 | 88,860 | 2,228 | 11,140 |
| 3 | 13.010 | SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU | 24,416 | 84,193 | 4,584 | 15,807 |
| 4 | 13.011 | SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU | 9,446 | 79,378 | 2,454 | 20,622 |
| 5 | 13.012 | SIMP.KOTO BARU - JUNCTION | 3,600 | 66,667 | 1,800 | 33,333 |
| 6 | 013.018 | INDRAPURA - MUARA SAKAI | 5,754 | 78,822 | 1,546 | 21,178 |
| 7 | 06.025 | MANGGOPOH - PADANG LUAR | 39,549 | 56,962 | 29,881 | 43,038 |
| 8 | 06.028 | SICINCIN - KURAITAJI | 14,412 | 87,664 | 2,028 | 12,336 |
| 9 | 013.031 | PANTI - SIMPANG EMPAT | 60,674 | 81,738 | 13,556 | 18,262 |
| 10 | 06.033 | SIMP. EMPAT - SASAK | 15,922 | 79,610 | 4,078 | 20,390 |
| 11 | 06.034.2 | AIR BALAM - AIR BANGIS | 12,520 | 99,365 | 0,080 | 0,635 |
| 12 | 06.035 | KUBU KERAMBIL - BATUSANGKAR | 12,941 | 69,951 | 5,559 | 30,049 |
| 13 | 06.036 | BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA) | 26,034 | 90,427 | 2,756 | 9,573 |
| 14 | 06.037 | BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO | 9,400 | 90,385 | 1,000 | 9,615 |
| 15 | 06.038.2 | GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA) | 22,188 | 72,510 | 8,412 | 27,490 |
| 16 | 06.039 | GUGUK CINO - SITANGKAI | 10,097 | 66,779 | 5,023 | 33,221 |
| 17 | 06.040 | SITANGKAI - TANJUNG AMPALU | 14,772 | 85,486 | 2,508 | 14,514 |
| 18 | 06.044 | BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI | 41,343 | 81,689 | 9,267 | 18,311 |
| 19 | 06.054 | JUNCTION - ABAISIAT | 12,400 | 98,413 | 0,200 | 1,587 |
| 20 | 06.055 | SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG | 3,720 | 84,545 | 0,680 | 15,455 |
| 21 | 06.056.1 | SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO | 16,942 | 84,710 | 3,058 | 15,290 |
| 22 | 06.056.2 | LUBUK MALAKO - ABAI SANGIR | 12,010 | 70,647 | 4,990 | 29,353 |
| 23 | 06.056.3 | ABAI SANGIR - SEI DAREH | 35,659 | 48,188 | 38,341 | 51,812 |
| 24 | 06.068 | PADANGSAWAH - KUMPULAN | 34,601 | 94,797 | 1,899 | 5,203 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KEMANTAPAN JALAN | | | |
|----|----------|--|------------------|---------|--------------|---------|
| | | | MANTAP | | TIDAK MANTAP | |
| | | | (KM) | % | (KM) | % |
| 25 | 06.069.2 | BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI | 39,811 | 84,975 | 7,039 | 15,025 |
| 26 | 06.070 | BATUSANGKAR - OMBILIN | 16,517 | 89,233 | 1,993 | 10,767 |
| 27 | 06.071 | SOLOK- ALAHAN PANJANG | 39,545 | 82,730 | 8,255 | 17,270 |
| 28 | 06.072 | LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU | 22,248 | 72,000 | 8,652 | 28,000 |
| 29 | 06.073 | PASAR BARU - ALAHAN PANJANG | 23,995 | 48,573 | 25,405 | 51,427 |
| 30 | 06.075 | SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN | 18,618 | 90,820 | 1,882 | 9,180 |
| 31 | 06.076 | PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR | 69,837 | 94,438 | 4,113 | 5,562 |
| 32 | 06.078 | SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA | 39,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 06.079 | SIMP BASO - PILADANG | 3,423 | 30,727 | 7,717 | 69,273 |
| 34 | 06.080 | MATUR - PALEMBAYAN | 12,700 | 61,353 | 8,000 | 38,647 |
| 35 | 06.081 | PALEMBAYAN - PALUPUH (SIMP.PATAI) | 4,000 | 30,075 | 9,300 | 69,925 |
| 36 | 06.082 | ALAHAN PANJANG - KILIRAN JAO | 44,238 | 60,683 | 28,662 | 39,317 |
| 37 | 06.083 | TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN | 41,112 | 93,224 | 2,988 | 6,776 |
| 38 | 06.084 | JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH) | 12,066 | 85,152 | 2,104 | 14,848 |
| 39 | 06.085 | SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL) | 2,050 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | 06.086 | SURANTIAH - KAYU ARO - LANGGAI | 14,000 | 50,542 | 13,700 | 49,458 |
| 41 | 06.087 | DUKU - SICINCIN | 10,300 | 35,951 | 18,350 | 64,049 |
| 42 | 06.088 | PADANG KOTO GADANG - PALEMBAYAN | 16,500 | 53,226 | 14,500 | 46,774 |
| 43 | 06.089 | JL. BALINGKA - TEROWONGAN - NGARAI SIANOK | 0,000 | 0,000 | 9,700 | 100,000 |
| 44 | 06.090 | PALUPUAH - PUA GADIH - KOTO TINGGI | 10,217 | 40,868 | 14,783 | 59,132 |
| 45 | 06.091 | SIMPANG NAPAL - BUKIT BUAL - TANJUNG AMPALU | 1,104 | 4,800 | 21,896 | 95,200 |
| 46 | 06.092 | SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI | 26,100 | 91,901 | 2,300 | 8,099 |
| 47 | 06.093 | SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING | 23,950 | 79,833 | 6,050 | 20,167 |
| 48 | 06.094 | PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO | 5,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 49 | 06.095 | RAO - ROKAN (BATAS RIAU) | 29,500 | 89,394 | 3,500 | 10,606 |
| 50 | 06.096 | LUBUK SIKAPING - TALU | 26,400 | 94,286 | 1,600 | 5,714 |
| 51 | 06.097 | BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG | 31,363 | 72,600 | 11,837 | 27,400 |
| 52 | 06.098 | TELUK BAYUR - NIPAH - PURUS | 7,919 | 65,992 | 4,081 | 34,008 |
| 53 | 06.099 | PURUS - BANDARA INTERNASIONAL MINANG KABAU | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 100,000 |

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KEMANTAPAN JALAN | | | |
|-------|---------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | MANTAP | | TIDAK MANTAP | |
| | | | (KM) | % | (KM) | % |
| 54 | 06.100 | BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN | 1,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 55 | 06.101 | TAPUS - MUARO SEI. LOLO - GELUGUR | 27,267 | 58,015 | 19,733 | 41,985 |
| 56 | 06.102 | RAWANG - TALAWI | 4,300 | 71,667 | 1,700 | 28,333 |
| 57 | 06.103 | SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT | 4,100 | 80,392 | 1,000 | 19,608 |
| 58 | 06.104 | KANTOR CAMAT - BERKAT | 4,000 | 67,797 | 1,900 | 32,203 |
| TOTAL | | | 1099,033 | 72,058 | 426,167 | 27,942 |

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

Pada Misi 5 : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tujuan / Sasaran yaitu : Meningkatkan infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

| No. | Visi/Misi/Tujuan/Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | % |
|-----|---|--|--------|-----------|-----|
| 1. | Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah | Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\leq 72\%$ | 36 | 36 | 100 |

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai 58 ruas jalan yang tersebar di 19 Kabupaten / Kota, untuk tahun 2018 ini target 36 ruas jalan yang kondisi jalan mantap teralisasi sebanyak 36 ruas jalan dengan kinerja 100 %.

Perbandingan antara 58 ruas jalan dengan kematapan jalan sebesar 72,058 %, sedangkan untuk 36 ruas tersebut kemantapan jalan sebesar 86,491 % dengan indicator jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\leq 72\%$.

Kondisi Perkerasan Badan Jalan

| NAMA PROPINSI | PERKERASAN BADAN JALAN | | | | PANJANG (SK) |
|----------------|------------------------|------------------|--------|--------|--------------|
| | ASPAL | TEFLOID /KERIKIL | TANAH | BETON | |
| SUMATERA BARAT | 824,584 | 3,000 | 87,576 | 11,200 | 926,360 |

Dengan Detail Data Kondisi Perkerasan Badan Jalan sebagai berikut :

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | PERKERASAN BADAN JALAN | | | | PANJANG (SK) |
|--------------|----------|--|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | ASPAL | TEFLOID / KERIKIL | TANAH | BETON | |
| 1 | 13.007 | SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU | 11,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,080 |
| 2 | 13.008 | TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| 3 | 13.010 | SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 |
| 4 | 13.011 | SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU | 11,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,900 |
| 5 | 013.018 | INDRAPURA - MUARA SAKAI | 7,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,300 |
| 6 | 06.028 | SICINCIN - KURAITAJI | 16,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,440 |
| 7 | 013.031 | PANTI - SIMPANG EMPAT | 74,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 74,230 |
| 8 | 06.033 | SIMP. EMPAT - SASAK | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
| 9 | 06.034.2 | AIR BALAM - AIR BANGIS | 12,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,600 |
| 10 | 06.036 | BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA) | 28,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,790 |
| 11 | 06.037 | BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO | 10,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,400 |
| 12 | 06.038.2 | GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA) | 29,500 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 30,600 |
| 13 | 06.040 | SITANGKAI - TANJUNG AMPALU | 17,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,280 |
| 14 | 06.044 | BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI | 50,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,610 |
| 15 | 06.054 | JUNCTION - ABAISIAT | 12,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,600 |
| 16 | 06.055 | SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,400 |
| 17 | 06.056.1 | SIMP.PADANG ARO - LUBUK MALAKO | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 20,000 |
| 18 | 06.068 | PADANGSAWAH - KUMPULAN | 35,500 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 36,500 |
| 19 | 06.069.2 | BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI | 46,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 46,850 |
| 20 | 06.070 | BATUSANGKAR - OMBILIN | 18,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,510 |
| 21 | 06.071 | SOLOK- ALAHAN PANJANG | 47,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,800 |
| 22 | 06.072 | LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU | 30,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,900 |
| 23 | 06.075 | SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN | 20,020 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 20,500 |
| 24 | 06.076 | PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR | 53,344 | 0,000 | 20,606 | 0,000 | 73,950 |
| 25 | 06.078 | SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA | 39,150 | 0,000 | 0,000 | 0,25 | 39,400 |
| 26 | 06.083 | TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN | 31,112 | 0,000 | 12,988 | 0,000 | 44,100 |
| 27 | 06.084 | JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH) | 14,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,170 |
| 28 | 06.085 | SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,050 | 2,050 |
| 29 | 06.092 | SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI | 28,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,400 |
| 30 | 06.093 | SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING | 28,300 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | 30,000 |
| 31 | 06.094 | PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO | 4,035 | 0,000 | 1,465 | 0,000 | 5,500 |
| 32 | 06.095 | RAO - ROKAN (BATAS RIAU) | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 |
| 33 | 06.096 | LUBUK SIKAPING - TALU | 16,800 | 0,000 | 11,200 | 0,000 | 28,000 |
| 34 | 06.097 | BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG | 1,363 | 2,000 | 39,837 | 0,000 | 43,200 |
| 35 | 06.100 | BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 |
| 36 | 06.103 | SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4,100 | 5,100 |
| TOTAL | | | 824,58 | 3,000 | 87,58 | 11,20 | 926,360 |

Kondisi Jalan Berdasarkan IRI

| NAMA PROPINSI | KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------|---------|--------|--------------|-------|-------------|-------|
| | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | |
| | (KM) | % | (KM) | % | (KM) | % | (KM) | % |
| SUMATERA BARAT | 190,345 | 20,548 | 610,869 | 65,943 | 87,340 | 9,428 | 37,806 | 4,081 |

Dengan detail data Kondisi Jalan Berdasarkan IRI sebagai berikut :

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI | | | | | | | |
|--------------|----------|--|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | BAIK | | SEDANG | | RUSAK RINGAN | | RUSAK BERAT | |
| | | | (KM) | % | (KM) | % | (KM) | % | (KM) | % |
| 1 | 13.007 | SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU | 2,100 | 10,695 | 7,481 | 78,502 | 1,499 | 10,803 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 13.008 | TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG | 4,220 | 21,100 | 13,552 | 67,760 | 2,028 | 10,140 | 0,200 | 1,000 |
| 3 | 13.010 | SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU | 2,433 | 8,390 | 21,983 | 75,803 | 3,884 | 13,393 | 0,700 | 2,414 |
| 4 | 13.011 | SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU | 0,600 | 5,042 | 8,846 | 74,336 | 1,550 | 13,025 | 0,904 | 7,597 |
| 5 | 013.018 | INDRAPURA - MUARA SAKAI | 2,600 | 2,740 | 3,154 | 70,342 | 0,883 | 18,699 | 0,663 | 8,219 |
| 6 | 06.028 | SICINCIN - KURAITAJI | 2,400 | 14,599 | 12,012 | 73,066 | 2,028 | 12,336 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 013.031 | PANTI - SIMPANG EMPAT | 3,559 | 4,795 | 57,115 | 76,943 | 12,201 | 16,437 | 1,355 | 1,825 |
| 8 | 06.033 | SIMP. EMPAT - SASAK | 1,670 | 8,350 | 14,252 | 71,260 | 3,889 | 19,445 | 0,189 | 0,945 |
| 9 | 06.034.2 | AIR BALAM - AIR BANGIS | 0,500 | 3,968 | 12,020 | 95,397 | 0,080 | 0,635 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 06.036 | BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA) | 5,036 | 17,492 | 20,998 | 72,935 | 2,756 | 9,573 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 06.037 | BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO | 4,400 | 42,308 | 5,000 | 48,077 | 1,000 | 9,615 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 06.038.2 | GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA) | 0,000 | 0,000 | 22,188 | 72,510 | 3,193 | 10,435 | 5,219 | 17,056 |
| 13 | 06.040 | SITANGKAI - TANJUNG AMPALU | 6,048 | 35,000 | 8,724 | 50,486 | 2,400 | 13,889 | 0,108 | 0,625 |
| 14 | 06.044 | BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI | 4,439 | 8,771 | 36,904 | 72,918 | 8,667 | 17,125 | 0,600 | 1,186 |
| 15 | 06.054 | JUNCTION - ABASISAT | 2,710 | 21,508 | 9,690 | 76,905 | 0,200 | 1,587 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 06.055 | SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG | 0,000 | 0,000 | 3,720 | 84,545 | 0,680 | 15,455 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 06.056.1 | SIMP.PADANG ARO - LUBUK MALAKO | 8,700 | 43,500 | 8,242 | 41,210 | 2,173 | 10,865 | 0,885 | 4,425 |
| 18 | 06.068 | PADANGSAWAH - KUMPULAN | 8,170 | 22,384 | 26,431 | 72,414 | 0,900 | 2,466 | 0,999 | 2,737 |
| 19 | 06.069.2 | BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI | 12,171 | 25,979 | 27,640 | 58,997 | 5,150 | 10,993 | 1,889 | 4,032 |
| 20 | 06.070 | BATUSANGKAR - OMBILIN | 2,693 | 14,549 | 13,824 | 74,684 | 1,993 | 10,767 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 06.071 | SOLOK- ALAHAN PANJANG | 8,521 | 17,826 | 31,024 | 64,904 | 7,054 | 14,757 | 1,201 | 2,513 |
| 22 | 06.072 | LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU | 3,378 | 10,932 | 18,870 | 61,068 | 8,652 | 28,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 06.075 | SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN | 10,320 | 50,341 | 8,298 | 40,478 | 1,600 | 7,805 | 0,282 | 1,376 |
| 24 | 06.076 | PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR | 11,431 | 15,458 | 58,406 | 78,980 | 2,576 | 3,483 | 1,537 | 2,078 |
| 25 | 06.078 | SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA | 31,781 | 80,662 | 7,619 | 19,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 06.083 | TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN | 16,609 | 37,662 | 24,503 | 55,562 | 0,000 | 0,000 | 2,988 | 6,776 |
| 27 | 06.084 | JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH) | 4,503 | 31,778 | 7,563 | 53,373 | 2,104 | 14,848 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 06.085 | SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL) | 0,000 | 0,000 | 2,050 | 36,585 | 0,000 | 43,902 | 0,000 | 19,512 |
| 29 | 06.092 | SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI | 10,553 | 37,158 | 15,547 | 54,743 | 1,900 | 6,690 | 0,400 | 1,408 |
| 30 | 06.093 | SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING | 2,000 | 6,667 | 21,950 | 73,167 | 3,000 | 10,000 | 3,050 | 10,167 |
| 31 | 06.094 | PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO | 5,100 | 92,727 | 0,400 | 7,273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 06.095 | RAO - ROKAN (BATAS RIAU) | 8,700 | 26,364 | 20,800 | 63,030 | 2,900 | 8,788 | 0,600 | 1,818 |
| 33 | 06.096 | LUBUK SIKAPING - TALU | 2,500 | 8,929 | 23,900 | 85,357 | 0,400 | 1,429 | 1,200 | 4,286 |
| 34 | 06.097 | BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG | 0,500 | 1,157 | 30,863 | 71,442 | 0,000 | 0,000 | 11,837 | 27,400 |
| 35 | 06.100 | BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 32,917 | 0,000 | 33,750 | 0,000 | 33,333 |
| 36 | 06.103 | SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 80,392 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 19,608 |
| TOTAL | | | 190,345 | 20,548 | 610,869 | 65,943 | 87,340 | 9,428 | 37,806 | 4,081 |

Kemantapan Jalan

| NAMA PROPINSI | KEMANTAPAN JALAN | | | |
|----------------|------------------|--------|--------------|--------|
| | MANTAP | | TIDAK MANTAP | |
| | (KM) | % | (KM) | % |
| SUMATERA BARAT | 801,214 | 86,491 | 125,146 | 13,509 |

Dengan detail data Kondisi Jalan Berdasarkan kemantapan sebagai berikut :

| NO | NO RUAS | NAMA RUAS | KEMANTAPAN JALAN | | | |
|--------------|----------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | MANTAP | | TIDAK MANTAP | |
| | | | (KM) | % | (KM) | % |
| 1 | 13.007 | SIMANCUNG - TANJUNG AMPALU | 9,581 | 86,471 | 1,499 | 13,529 |
| 2 | 13.008 | TANJUNG AMPALU - SIJUNJUNG | 17,772 | 88,860 | 2,228 | 11,140 |
| 3 | 13.010 | SIMP.SIKABAU - SIMP.KOTO BARU | 24,416 | 84,193 | 4,584 | 15,807 |
| 4 | 13.011 | SIMP.KOTO BARU - TANJUNG SIMALIDU | 9,446 | 79,378 | 2,454 | 20,622 |
| 5 | 013.018 | INDRAPURA - MUARA SAKAI | 5,754 | 78,822 | 1,546 | 21,178 |
| 6 | 06.028 | SICINCIN - KURAITAJI | 14,412 | 87,664 | 2,028 | 12,336 |
| 7 | 013.031 | PANTI - SIMPANG EMPAT | 60,674 | 81,738 | 13,556 | 18,262 |
| 8 | 06.033 | SIMP. EMPAT - SASAK | 15,922 | 79,610 | 4,078 | 20,390 |
| 9 | 06.034.2 | AIR BALAM - AIR BANGIS | 12,520 | 99,365 | 0,080 | 0,635 |
| 10 | 06.036 | BASO - BTS BATUSANGKAR (BALAI SELASA) | 26,034 | 90,427 | 2,756 | 9,573 |
| 11 | 06.037 | BTS BATUSANGKAR (BUKIT GOMBAK) - GUGUK CINO | 9,400 | 90,385 | 1,000 | 9,615 |
| 12 | 06.038.2 | GUGUK CINO - SAWAHLUNTO (LAPANGAN SEGITIGA) | 22,188 | 72,510 | 8,412 | 27,490 |
| 13 | 06.040 | SITANGKAI - TANJUNG AMPALU | 14,772 | 85,486 | 2,508 | 14,514 |
| 14 | 06.044 | BTS KOTA PAYAKUMBUH - SITANGKAI | 41,343 | 81,689 | 9,267 | 18,311 |
| 15 | 06.054 | JUNCTION - ABAISIAT | 12,400 | 98,413 | 0,200 | 1,587 |
| 16 | 06.055 | SIJUNJUNG - TANAH BADANTUNG | 3,720 | 84,545 | 0,680 | 15,455 |
| 17 | 06.056.1 | SIMP.PADANG ARO -LUBUK MALAKO | 16,942 | 84,710 | 3,058 | 15,290 |
| 18 | 06.068 | PADANGSAWAH - KUMPULAN | 34,601 | 94,797 | 1,899 | 5,203 |
| 19 | 06.069.2 | BATAS PAYAKUMBUH - SULIKI - KOTO TINGGI | 39,811 | 84,975 | 7,039 | 15,025 |
| 20 | 06.070 | BATUSANGKAR - OMBILIN | 16,517 | 89,233 | 1,993 | 10,767 |
| 21 | 06.071 | SOLOK - ALAHAN PANJANG | 39,545 | 82,730 | 8,255 | 17,270 |
| 22 | 06.072 | LUBUK BASUNG - SUNGAI LIMAU | 22,248 | 72,000 | 8,652 | 28,000 |
| 23 | 06.075 | SIMP DUKU (KETAPING) - PARIAMAN | 18,618 | 90,820 | 1,882 | 9,180 |
| 24 | 06.076 | PANGKALAN KT.BARU- SIALANG - GELUGUR | 69,837 | 94,438 | 4,113 | 5,562 |
| 25 | 06.078 | SIMP.KOTO MAMBANG - BALINGKA | 39,400 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 06.083 | TELUK KABUNG - MANDEH - TARUSAN | 41,112 | 93,224 | 2,988 | 6,776 |
| 27 | 06.084 | JL. LINGKAR SELATAN (PAYAKUMBUH) | 12,066 | 85,152 | 2,104 | 14,848 |
| 28 | 06.085 | SIMPANG PADANG KARAMBIA - TJ. BUNGO (TPA REGIONAL) | 2,050 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 06.092 | SP. GANTING PAYO - BATAS TANAH DATAR - SUMANI | 26,100 | 91,901 | 2,300 | 8,099 |
| 30 | 06.093 | SINGKARAK - ARIPAN - TJ. BALIT - PADANG GANTING | 23,950 | 79,833 | 6,050 | 20,167 |
| 31 | 06.094 | PINTU ANGIN - LUBUAK SAIYO | 5,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 06.095 | RAO - ROKAN (BATAS RIAU) | 29,500 | 89,394 | 3,500 | 10,606 |
| 33 | 06.096 | LUBUK SIKAPING - TALU | 26,400 | 94,286 | 1,600 | 5,714 |
| 34 | 06.097 | BUNGO TANJUNG - TELUK TAPANG | 31,363 | 72,600 | 11,837 | 27,400 |
| 35 | 06.100 | BATU BATEMBAK - PELABUHAN PANASAHAN | 1,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | 06.103 | SIMPANG SP II - KANTOR CAMAT | 4,100 | 80,392 | 1,000 | 19,608 |
| TOTAL | | | 801,214 | 86,491 | 125,146 | 13,509 |

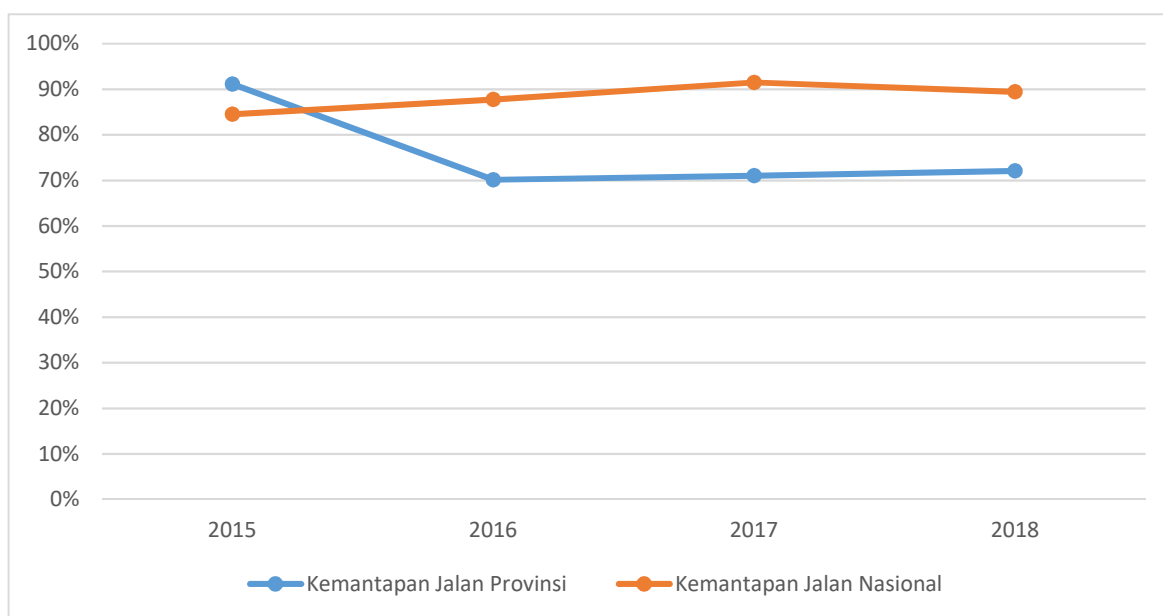
Dibandingkan dengan kondisi jalan nasional kondisi kemantapan jalan provinsi Pada Tahun 2018 berada dibawah kondisi kemantapan jalan nasional. Adapun kondisi kemantapan jalan nasional dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional

| KONDISI | TAHUN | | | | | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
| | (KM) / M' | (%) | (KM) / M' | (%) | (KM) / M' | (KM) / M' | (KM) / M' | (KM) / M' |
| Mantap | 1224.09 | 84.49 | 1270.60 | 87.70 | 1325.34 | 91.48 | 1295,48 | 89,42 |
| Tidak Mantap | 224.72 | 15.51 | 178.21 | 12.30 | 123.47 | 8.52 | 153,33 | 10,58 |
| Panjang Total | 1448.81 | 100 | 1448.81 | 100 | 1448.81 | 100 | 1448.81 | 100,00 |

Sumber data dari Balai Jalan Nasional III

Berikut diagram yang menunjukkan perbandingan antara kemantapan jalan nasional dengan kemantapan jalan provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2015 – 2018.



Gambar 3. 4

Perbandingan Kemantapan Jalan Nasional dengan Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2015 - 2018

Perbandingan antara Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat sebesar 89,42 % dibandingkan dengan Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Bengkulu sebesar 91,67% terdapat selisih 2,25 %.

Kondisi Jalan Nasional berdasarkan IRI tahun 2018

| SUMATERA BARAT | | IRI | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-------------|------------|------|--------------|------|---------------------|------|-------------------|------|
| NO | NO RUAS | NAMA JALAN | LENGTH (KM) | BAIK (0-4) | | SEDANG (4-8) | | RUSAK RINGAN (8-12) | | RUSAK BERAT (>12) | |
| | | | | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) |
| | | | 1449 | 774 | 0,53 | 522 | 0,36 | 121 | 0,08 | 32,4 | 0,02 |
| 1 | 001 | BAJAL BATU (BTS. PROV.) | 037 | 021 | 039 | 013 | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 2 | 002 | PANTI - DTS. KOTA LUDUK | 020 | 023 | 030 | 005 | 017 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 3 | 002.11.K | LUDUK SIKAPING BY PASS | 007 | 008 | 030 | 001 | 020 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 4 | 003 | DTS. KOTA LUDUK SIKAPING | 021 | 014 | 039 | 006 | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 5 | 004 | SP. KUMPELAN - BTS. KUMPE | 047 | 023 | 050 | 021 | 049 | 001 | 001 | 000 | 000 |
| 6 | 004.11.K | BUKTI LINGGIDY-PASS I (SP) | 003 | 003 | 008 | 000 | 004 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 7 | 005 | BTS. KOTA LUDUK LINGGIDY - SP | 002 | 002 | 000 | 000 | 017 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 8 | 005.11.K | BUKTI LINGGIDY WASS II (JLN) | 004 | 003 | 008 | 001 | 002 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 9 | 005.12.K | JLN. S. THIRMAN (H. HINGGI) | 001 | 001 | 002 | 000 | 002 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 10 | 005.13.K | SP. ALU KINIKI - SP. JALUK | 001 | 001 | 006 | 000 | 024 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 11 | 005.14.K | SP. JALUK - SP. JAMBU AIR | 001 | 001 | 032 | 000 | 015 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 12 | 006 | SP. PADANG LLAR - BTS. | 013 | 010 | 073 | 003 | 021 | 000 | 001 | 000 | 000 |
| 13 | 006.11.K | JLN. PROF. I WAKA (PADANG) | 001 | 001 | 050 | 001 | 050 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 14 | 006.12.K | JLN. M. DAUD RAS DI | 001 | 000 | 025 | 001 | 075 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 15 | 006.13.K | JLN. KOMARULLAH (PADANG) | 001 | 000 | 030 | 001 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 16 | 007 | BTS. KOTA PADANG PANJANG | 005 | 003 | 071 | 001 | 029 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 17 | 007.11.K | JLN. WAKA - BUKI | 000 | 000 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 18 | 007.12.K | JLN. BUKI - SUBUNGSI | 001 | 001 | 057 | 001 | 043 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 19 | 007.13.K | JLN. PASAR II - BUKI | 001 | 001 | 008 | 000 | 014 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 20 | 007.14.K | JLN. SOLOK - SOLOK HALUKI | 001 | 001 | 083 | 000 | 012 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 21 | 007.15.K | JLN. SOLOK HALUKI - | 001 | 001 | 000 | 000 | 025 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 22 | 008 | KUBU KEHAMBEL - BLS. KAB. | 021 | 010 | 057 | 011 | 031 | 000 | 002 | 000 | 000 |
| 23 | 009 | BTS. KAB. TANAH DATAR - | 020 | 008 | 042 | 011 | 056 | 001 | 003 | 000 | 000 |
| 24 | 009.11.K | JLN. MAM BONGOL (SOLOK) | 002 | 001 | 019 | 001 | 060 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 25 | 009.12.K | JLN. K. I. DWANTORO | 001 | 000 | 022 | 001 | 068 | 000 | 011 | 000 | 000 |
| 26 | 009.13.K | JLN. A. YANI (SOLOK) | 001 | 000 | 030 | 001 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 27 | 009.14.K | JLN. DIPONEGORO (SOLOK) | 000 | 000 | 057 | 000 | 043 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 28 | 010 | BTS. KOTA SOLOK - BLS. | 017 | 007 | 044 | 000 | 035 | 003 | 015 | 000 | 000 |
| 29 | 011 | BLS. KOTA SAWAI LINDO | 002 | 002 | 027 | 000 | 044 | 001 | 015 | 000 | 000 |

| NO | NO RUAS | NAMA JALAN | LENGTH (KM) | BAIK (0-4) | | SEDANG (4-8) | | RUSAK RINGAN (8-12) | | RUSAK BERAT (>12) | |
|----|----------|------------------------------|-------------|------------|------|--------------|------|---------------------|------|-------------------|------|
| | | | | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) |
| | | | 1449 | 774 | 0,53 | 522 | 0,36 | 121 | 0,08 | 32,4 | 0,02 |
| 30 | 012 | MUARA KALABAN - (ANPH) | 025 | 007 | 028 | 013 | 031 | 001 | 017 | 001 | 000 |
| 31 | 013 | TANAH BADA PULUNG - | 032 | 020 | 038 | 021 | 000 | 007 | 014 | 002 | 003 |
| 32 | 014 | KILIRANJAO - BTS. KAB. | 003 | 002 | 020 | 001 | 050 | 002 | 023 | 001 | 000 |
| 33 | 015 | DTS. KAD. DIAMAS RAYA | 011 | 000 | 020 | 009 | 066 | 002 | 012 | 000 | 002 |
| 34 | 016 | SEI DARCI - JUNCTION | 001 | 012 | 008 | 018 | 060 | 000 | 010 | 001 | 002 |
| 35 | 017 | JUNCTION (KOTO BARU) | 013 | 006 | 047 | 018 | 043 | 001 | 010 | 000 | 001 |
| 36 | 018 | IRI HINGGAHATI BLS. PKIV | 014 | 008 | 040 | 018 | 055 | 001 | 005 | 000 | 000 |
| 37 | 019 | SIMPANING - SIMP. AIR BAJAM | 011 | 000 | 025 | 012 | 054 | 002 | 006 | 000 | 001 |
| 38 | 020 | SIMP. AIR BAJAM - SIMP. | 003 | 003 | 047 | 012 | 031 | 003 | 006 | 001 | 002 |
| 39 | 021 | SIMP. EMPAL - (PADANG) | 001 | 001 | 030 | 011 | 061 | 001 | 000 | 000 | 000 |
| 40 | 022 | PAIDANG SAWAH - | 032 | 011 | 037 | 011 | 033 | 011 | 000 | 000 | 000 |
| 41 | 023 | MANGAPOH - BTS. KOTA | 010 | 010 | 069 | 001 | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 42 | 023.14.K | JLN. BIRI MANGAPOH | 001 | 001 | 067 | 009 | 003 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 43 | 024.14.K | JLN. ZAIN (PARLAMAN) | 001 | 000 | 038 | 001 | 060 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 44 | 024.15.K | JLN. AHMAD DAJILAN | 001 | 000 | 018 | 001 | 064 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 45 | 024.16.K | JLN. SOEKARNO (TATTA) | 002 | 001 | 053 | 001 | 047 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 46 | 025 | KURAI AIR - TUBUK AINUN | 017 | 012 | 071 | 005 | 021 | 001 | 000 | 000 | 000 |
| 47 | 026 | TUBUK AINUN - SIMP. BUKI | 013 | 011 | 085 | 002 | 015 | 001 | 000 | 000 | 000 |
| 48 | 026.11.K | JLN. AHMAD (SOLOK) (PADANG) | 001 | 000 | 067 | 000 | 032 | 001 | 001 | 000 | 000 |
| 49 | 026.12.K | JLN. H. H. H. HAWKA | 000 | 000 | 040 | 000 | 024 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 50 | 027.11.K | BANDARA INDIHARA (PANG) | 003 | 002 | 085 | 000 | 018 | 001 | 000 | 000 | 000 |
| 51 | 028.11.K | PADANG BYPASS II (BAJAU) | 022 | 018 | 081 | 001 | 018 | 001 | 001 | 000 | 000 |
| 52 | 029.11.K | PADANG BYPASS I | 003 | 000 | 002 | 005 | 098 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 53 | 030.11.K | DUKIT PUTUS - TELUK BAYUR | 001 | 000 | 000 | 009 | 054 | 001 | 066 | 000 | 000 |
| 54 | 001 | DTS. KOTA PADANG - DTS. | 010 | 000 | 060 | 019 | 010 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 55 | 001.11.K | JLN. DUKIT PUTUS - DTS. | 022 | 000 | 038 | 012 | 055 | 002 | 000 | 000 | 000 |
| 56 | 001.12.K | JLN. I. YAS WAKA II (PAINAN) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 57 | 001.13.K | JLN. SUDAN SYALIB | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 58 | 002 | BLS. KOTA PAINAN | 001 | 000 | 002 | 010 | 094 | 002 | 000 | 000 | 000 |

| NO | NO RUAS | NAMA JALAN | LENGTH (KM) | BAIK (0-4) | | SEDANG (4-8) | | RUSAK RINGAN (8-12) | | RUSAK BERAT (>12) | |
|----|----------|----------------------------|----------------|------------|-------|--------------|-------|---------------------|-----|-------------------|-----|
| | | | | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) |
| | | | 1449 | 774 | 53,5 | 522 | 36,0 | 121 | 8,4 | 32,4 | 2,3 |
| 13 | 033 | KAMBANG - INDRAMURA | 013 | 013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 034 | INDRAMURA - LAHAN | 025 | 025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 035 | LAHAN - HUS. KOTV | 043 | 043 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 036 | HUS. KOTV - HUS. KOTA | 073 | 073 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 036.11.K | JLN. GURUHMAN | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 037 | HUS. KOTA - PAKYAMBURU | 015 | 011 | 73,3 | 04 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 037.11.K | JLN. KOTI KARNOTATIJA | 004 | 001 | 25,0 | 03 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 037.12.K | JLN. TIPYU GORO | 005 | 002 | 40,0 | 03 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 037.13.K | JLN. K. D. NIMPI DULIAN | 005 | 002 | 40,0 | 03 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 038 | DASO - DTS. KOTA DJUKIT | 003 | 008 | 266,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 038.11.K | JLN. SOEKARNOHATTA | 002 | 002 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 040 | DTS. KOTA PADANG PANJANG | 013 | 012 | 92,3 | 01 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 040.11.K | JLN. ST. DYAI ISIR, PADANG | 004 | 002 | 50,0 | 02 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 041 | SIDINCIN - LUDUK ALUNG | 011 | 010 | 90,9 | 01 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 042 | DTS. KOTA SOLOK - LUBUK | 023 | 003 | 13,0 | 020 | 87,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 042.11.K | JLN. LUBUK SIKARAH | 001 | 000 | 0,0 | 01 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 042.12.K | JLN. HANKA (SOLOK) | 001 | 000 | 0,0 | 01 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 043 | LUBUKSIKARAH - HUS. KOTA | 004 | 001 | 25,0 | 03 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 043.11.K | HUS. KOTA PADANG - HUS. | 073 | 066 | 90,4 | 07 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 044.12.K | JLN. SAWAH LINDI - M. LAJA | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 046 | KITIPALANG - HUS. KOTV | 073 | 043 | 58,9 | 030 | 41,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 047.11.K | SOLOK BYPASS (1) NASIR | 001 | 002 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 048 | BYPASS PARAWAN (KOTA) | 005 | 001 | 20,0 | 04 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 049 | LAHAN - HUS. JAMBI | 025 | 006 | 24,0 | 019 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 050 | LAHAN JATI - KUKU | 015 | 010 | 66,7 | 05 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 051 | MUKOTI SUDJAN | 021 | 000 | 0,0 | 021 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 052 | SIDDAN KATET | 002 | 001 | 50,0 | 01 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 053 | LLDUK SELASIH SURIAN | 063 | 000 | 0,0 | 063 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 054 | SURIAK - SP. PADANG ARO | 065 | 009 | 13,8 | 056 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 055 | SP. PADANG ARO - DTS. | 004 | 004 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Simpulan Data: | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------|----------------|--------------|-------|-------------------|------|---------------------------------|-----|
| NO | NO RUAS | NAMA JALAN | LENGTH (KM) | MANTAP (0-8) | | TIDAK MANTAP (>8) | | UNPAVED / RUSAK PARAH / NO DATA | |
| | | | | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) |
| | | | 1449 | 1295,48 | 89,5 | 153,52 | 10,5 | 0 | 0 |
| 1 | 001 | SAWALUJATI (HUS. HROV) | 037 | 037 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 002 | LAHAN - HUS. KOTA LUBUK | 028 | 028 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 002.11.K | LUBUK SIKARAH BY PASS | 007 | 007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 003 | DTS. KOTA LUBUKSIKARAH - | 021 | 021 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 004 | SP. KUMPULAN - DTS. KOTA | 047 | 048 | 102,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 004.11.K | BIKI UNYU BYPASS I (SP) | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 005 | HUS. KOTA BUKITINDEH - SP | 002 | 002 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 005.11.K | BIKI UNYU BYPASS II (JLN) | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 005.12.K | JLN. SUDIRMAN (B. TINGGI) | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 005.13.K | SP. AIR KUNING - SP. TALUK | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 005.14.K | SP. TALUK - SP. JAMPILAIR | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 006 | SP. PANJANG LUMAH - HUS. | 013 | 013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 006.11.K | JLN. HOE HANKA (PADANG) | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 006.12.K | JLN. M. DAUD HASRIL | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 006.13.K | JLN. KOMARULAH (PADANG) | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 007 | DTS. KOTA PADANG PANJANG | 005 | 005 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 007.11.K | JLN. HANKA "SINI" | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 007.12.K | JLN. BIKI SURIKAYAN | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 007.13.K | JLN. SARAI IHRAK | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 007.14.K | JLN. SIKIA - SOLOK BAILINE | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 007.15.K | JLN. SOLOK BATUNG - | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 008 | KUDU KERANDIL - DTS. KAD. | 021 | 020 | 95,2 | 01 | 4,8 | 0 | 0 |
| 23 | 009 | HUS. KOTA TANJUNGPINAK | 051 | 019 | 37,2 | 032 | 62,8 | 0 | 0 |
| 24 | 009.11.K | JLN. MAMUKUNJIE (SO. OK) | 002 | 002 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 009.12.K | JLN. KH. THAWANIBRO | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 009.13.K | JLN. A. YANI (SOLOK) | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 009.14.K | JLN. DIPONEGORO (SOLOK) | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 010 | DTS. KOTA SOLOK - DTS. | 017 | 010 | 58,8 | 07 | 41,2 | 0 | 0 |
| 29 | 011 | HUS. KOTA SAWALUJATI | 001 | 001 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NO | NO RUAS | NAMA JALAN | LENGTH (KM) 1449 | MANTAP (0-8) | | TIDAK MANTAP (>8) | | UNPAVED / RUSAK PARAH / NO DATA | |
|----|----------|---------------------------|------------------------|--------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|-----|
| | | | | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) |
| 30 | 012 | MUJANA KALABAN - IANAH | 029 | 020 | 080 | 005 | 020 | 000 | 000 |
| 31 | 013 | TANAH DADANTUNG - | 062 | 043 | 069 | 009 | 017 | 000 | 000 |
| 32 | 014 | KILIRANJAO - BTS KAD | 000 | 008 | 071 | 002 | 020 | 000 | 000 |
| 33 | 055 | BTS KALIBUMAS RAYA | 014 | 012 | 088 | 002 | 014 | 000 | 000 |
| 34 | 096 | SIH TALAH - BUKITIKON | 051 | 027 | 087 | 004 | 013 | 000 | 000 |
| 35 | 017 | JUNCTION (KOTO BARU - | 013 | 012 | 090 | 001 | 011 | 000 | 000 |
| 36 | 018 | DEDDING RAPAT (BTS. PROV. | 014 | 013 | 005 | 001 | 005 | 000 | 000 |
| 37 | 019 | SILAHING - SIMP. NIKUN/AM | 010 | 018 | 081 | 002 | 010 | 000 | 000 |
| 38 | 020 | SIMP. AIR KALAM - SIMP. | 003 | 003 | 094 | 004 | 000 | 000 | 000 |
| 39 | 021 | SIMP. ENYA - PADANG | 001 | 011 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 40 | 022 | PADANG SAWAH - | 002 | 032 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 41 | 023 | MANGGAPON - BTS. KOTA | 040 | 040 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 42 | 023.14.K | JLN. SRI MANGGAPON | 004 | 004 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 43 | 024.14.K | JLN. ZAINI (PADANGAN) | 001 | 001 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 44 | 024.15.K | JLN. AHMAD DAHLAN | 001 | 001 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 45 | 024.16.K | JLN. SOEKARNO LATTI | 002 | 002 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 46 | 025 | KIRITAN - LUBUK ALUNG | 017 | 017 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 47 | 026 | LUBUKA UNKE - SIMP. LUBUK | 011 | 013 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 48 | 026.11.K | JLN. ALIEN (SOK) (PADANG) | 004 | 000 | 084 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 49 | 026.12.K | JLN. PROF. DR. HANKA | 004 | 001 | 088 | 000 | 002 | 000 | 000 |
| 50 | 027.11.K | DANDARA INTERNATIONAL | 003 | 003 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 51 | 028.11.K | PANANGI BYPASS II (M.M.D) | 022 | 022 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 52 | 029.11.K | PANANGI BYPASS I | 006 | 006 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 53 | 030.11.K | BUKI PUTUS - TELUK BAYUN | 001 | 000 | 030 | 001 | 006 | 000 | 000 |
| 54 | 031 | BTS. KOTA PADANG - BTS. | 049 | 049 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 55 | 031.11.K | JLN. BUKIT PUTUS - BTS. | 022 | 021 | 092 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 56 | 031.12.K | JLN. BILAS YAKU (PADANG) | 001 | 003 | 090 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 57 | 031.13.K | JLN. SUKANI SYAHRI | 001 | 001 | 091 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 58 | 032 | BTS. KOTA PAJANAH - | 003 | 001 | 090 | 002 | 000 | 000 | 000 |

| NO | NO RUAS | NAMA JALAN | LENGTH (KM) 1449 | MANTAP (0-8) | | TIDAK MANTAP (>8) | | UNPAVED / RUSAK PARAH / NO DATA | |
|----|----------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|-----|
| | | | | (KM) | (%) | (KM) | (%) | (KM) | (%) |
| 59 | 033 | KAMBANG - INDIANJARA | 038 | 008 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 60 | 034 | INDIANJARA - IANAH | 024 | 021 | 092 | 000 | 001 | 000 | 000 |
| 61 | 035 | TAPAN - BTS. PROV. | 040 | 037 | 090 | 003 | 008 | 000 | 000 |
| 62 | 036 | BTS. HOKU HAU - BHS. KUDA | 073 | 071 | 090 | 002 | 003 | 000 | 000 |
| 63 | 036.11.K | JLN. SUKIRMAN | 001 | 001 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 64 | 037 | BTS. KOTA PAYAKUMBUH - | 016 | 015 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 65 | 037.11.K | JLN. SOEKARNO LATTI | 004 | 004 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 66 | 037.12.K | JLN. DIFONI (SOK) | 006 | 006 | 097 | 000 | 003 | 000 | 000 |
| 67 | 037.13.K | JLN. KH. AHMAD DAHLAN | 006 | 005 | 090 | 000 | 006 | 000 | 000 |
| 68 | 038 | BASO - BTS. KOTA BUKIT | 008 | 008 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 69 | 038.11.K | JLN. SOEKARNO LATTI | 002 | 002 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 70 | 040 | BHS. KOTA PAJANAH - WAKELAWANAH | 019 | 019 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 71 | 040.11.K | JLN. SI SYAHRI (PADANG) | 001 | 001 | 093 | 000 | 002 | 000 | 000 |
| 72 | 041 | SICINCIN - LUBUK ALUNG | 014 | 014 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 73 | 042 | BTS. KOTA SOLOK - LUBUK | 023 | 017 | 073 | 006 | 027 | 000 | 000 |
| 74 | 042.11.K | JLN. LUBUK KILANAH | 001 | 001 | 082 | 000 | 013 | 000 | 000 |
| 75 | 042.12.K | JLN. HANKA (SOLOK) | 001 | 001 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 76 | 043 | LUBUK SELASIH - BTS. KOTA | 006 | 006 | 085 | 003 | 035 | 000 | 000 |
| 77 | 043.11.K | BHS. KUDA PAJANAH - BHS. | 020 | 021 | 091 | 002 | 009 | 000 | 000 |
| 78 | 044.12.K | JLN. SAWAH UNIC - MUJARA | 026 | 006 | 084 | 001 | 013 | 000 | 000 |
| 79 | 045 | KILIRANJAO - BTS. PROV. | 023 | 021 | 091 | 002 | 009 | 000 | 000 |
| 80 | 047.11.K | SOLOK BYPASS (JL. NASIR | 003 | 003 | 097 | 000 | 003 | 000 | 000 |
| 81 | 048 | BY PASS PANDAWAN (KOTA | 006 | 005 | 100 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 82 | 049 | IANAH - BHS. JAMBI | 026 | 022 | 082 | 003 | 013 | 000 | 000 |
| 83 | 050 | TOAPEJAT - ROKOT | 036 | 025 | 069 | 011 | 031 | 000 | 000 |
| 84 | 051 | ROKOT SICIRAN | 021 | 013 | 061 | 008 | 039 | 000 | 000 |
| 85 | 052 | SICIRAN KALISI | 002 | 002 | 091 | 001 | 002 | 000 | 000 |
| 86 | 053 | LUBUK SELASIH - SUJIAN | 003 | 001 | 060 | 002 | 051 | 000 | 000 |
| 87 | 054 | SURAH - SP. PADANG ARO | 006 | 011 | 062 | 005 | 036 | 000 | 000 |
| 88 | 055 | SP. PADANG ARO - BTS. | 034 | 003 | 063 | 012 | 034 | 000 | 000 |

3.1.4. Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

Sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2018 ditargetkan telah tersedianya sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan sebanyak 8 unit. Sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang dimaksud terbagi atas Bangunan Strategis, Gedung Negara, Rumah Negara dan Shelter.

Adapun indikator Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan didefinisikan sebagai sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang telah selesai dibangun dan siap ditempati pada Tahun 2018 Sedangkan bangunan yang masih sedang dalam proses pembangunan tidak dihitung sebagai indikator pada sasaran ini. Indikator Kinerja menurut Rencana Strategis (Renstra)

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|--------------------|
| 1. | Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | 8 unit | 5 unit | 62,50 % |

Adapun 8 unit sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang ditargetkan selesai pada Akhir 2018 adalah :

| Renstra 2018 | Realisasi 2018 |
|--|---|
| Rehabilitasi 2 (dua) unit Gedung KONI | Selesai |
| Pembangunan Gedung Pemberdayaan Perempuan dan KB | Selesai |
| Pembangunan Gedung Convention Hall | Selesai |
| Pembangunan Gedung Inflasi | Selesai |
| Pembangunan Garase Rumah Dinas Gubernur | Belum selesai di berlakukan denda 50 hari |
| Pembangunan Gedung Bundo Kanduang | Dianggarkan 2019 |
| Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami | Dianggarkan 2019 |

PERJANJIAN KINERJA 2018

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|--------------------|
| 1. | Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | 3 unit | 3 unit | 100 % |



Gambar 3. 5 Gedung Kebudayaan sebagai Salah Satu Gedung Strategis

Berdasarkan target kinerja pada tahun 2018 dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang tata pemerintah tersebut ada 3 (tiga) gedung dan dapat diselesaikan pada tahun 2018 yaitu Gedung Pemberdayaan Perempuan dan KB, Gedung Convention Hall, Gedung Inflasi. Dengan capaian 3 unit dari 3 unit target tersebut capaian indikator Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan sebesar 100 % atau dapat diklasifikasikan dengan sangat baik.

Program / Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | FISIK | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|-----|--|--------------------|--------|-----------------|-------|----------------|
| I. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA | 157.341.202.743,00 | 92,58 | 143.245.064.585 | 91,04 | 14.096.138.158 |
| 1. | PEMBANGUNAN STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 96.469.877.143,00 | 99,11 | 89.528.482.055 | 92,80 | 6.941.395.088 |
| 2. | PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 34.764.471.000,00 | 100,00 | 31.089.253.100 | 89,43 | 3.675.217.900 |
| 3. | PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT | 378.610.000,00 | 100,00 | 358.823.110 | 94,77 | 19.786.890 |
| 4. | PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 10.234.000.000,00 | 95,01 | 8.782.841.670 | 85,82 | 1.451.158.330 |
| 5. | PEMBANGUNAN GEDUNG BUNDO KANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 993.140.500,00 | 100,00 | 978.188.650 | 98,49 | 14.951.850 |
| 6. | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN TEKNIS (TPT) BANGUNAN NEGARA DI SUMATERA BARAT | 97.726.000,00 | 100,00 | 81.182.186 | 83,07 | 16.543.814 |
| 7. | PENYELENGGARAAN HARI PERS NASIONAL | 290.182.700,00 | 100,00 | 272.190.730 | 93,80 | 17.991.970 |
| 8. | REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA | 2.053.616.600,00 | 100,00 | 1.869.771.250 | 91,05 | 183.845.350 |
| 9. | PEMBANGUNAN GEDUNG PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI SUMATERA BARAT | 3.498.769.300,00 | 100,00 | 3.480.645.920 | 99,48 | 18.123.380 |
| 10. | PENAMBAHAN GARASE RUMAH DINAS GUBERNUR | 748.110.500,00 | 100,00 | 646.880.415 | 86,47 | 101.230.085 |
| 11. | PEMBANGUNAN TAMAN WISATA KELOK SEMBILAN | 1.161.820.000,00 | - | 172.092.000 | 14,81 | 989.728.000 |
| 12. | PENDAMPINGAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI SUMATERA BARAT | 135.526.800,00 | 100,00 | 133.700.550 | 98,65 | 1.826.250 |
| 13. | PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI TEKNIS DAN ADVOKASI SERTA TERSEDIA NYA DATA INFORMASI TEKNIS BIDANG KECIPTAKARYAAN | 214.950.000,00 | 100,00 | 165.256.700 | 76,88 | 49.693.300 |
| 14. | PEMBINAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) | 571.970.000,00 | 100,00 | 528.383.408 | 92,38 | 43.586.592 |
| 15. | ASSES MEN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | 242.730.000,00 | 100,00 | 220.532.622 | 90,86 | 22.197.378 |
| 16. | REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA I | 4.232.751.200,00 | 100,00 | 4.230.508.000 | 99,95 | 2.243.200 |
| 17. | PEMBANGUNAN SHELTER DI MUSHOLLA JABAL RAHMAH DI PAINAN (LANJUTAN) | 252.951.000,00 | 100,00 | 227.649.047 | 90,00 | 25.301.953 |
| 19. | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT | 600.000.000,00 | 50,00 | 99.000.000 | 16,50 | 501.000.000 |
| 20. | PEMBANGUNAN LAPANGAN TENNIS GUBERNURAN (LANJUTAN) | 250.000.000,00 | 100,00 | 238.424.920 | 95,37 | 11.575.080 |
| 21. | REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA II | 20.000.000,00 | 100,00 | 17.741.332 | 88,71 | 2.258.668 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------|--------|-------------|-------|-----------|
| 22. | PENYUSUNAN MASTERPLAN PASAR KOTO BARU | 130.000.000,00 | 100,00 | 123.516.920 | 95,01 | 6.483.080 |
|-----|---------------------------------------|----------------|--------|-------------|-------|-----------|

Berikut daftar sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang sedang dalam proses pembangunan maupun yang telah selesai dibangun pada Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3. 6 sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

| No | Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan | | Realisasi Fisik Tahun 2018 | Realisasi Fisik terhadap Keseluruhan Bangunan | | Ket |
|----|--|---|----------------------------|---|---------------------------------|-----|
| | | | | Target Kumulatif Hingga 2018 | Realisasi Kumulatif Hingga 2018 | |
| 1 | Bangunan Strategis Provinsi | Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat | 100% | 12,90% | 12,90% | |
| | | Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat | 100% | 34,15% | 34,15% | |
| | | Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat | 100% | 100% | 100% | |
| | | Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat | 100% | 65% | 65% | |
| | | Pembangunan Prasasti APDN Lama | 100% | 100% | 100% | |
| | | Rehabilitasi Gedung Koni 2 (dua) unit | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Bangunan Gedung Pemerintah | Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat | 100% | 100% | 100% | |
| | | Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB Provinsi Sumatera Barat | 100% | 100% | 100% | |
| | | Pembangunan Gedung DPKD | 100% | 100% | 100% | |
| | | Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan | 100% | 100% | 100% | |
| | | Pembangunan Gedung UPTD Balai Koperasi Provinsi Sumatera Barat | 100% | 100% | 100% | |

| No | Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan | | Realisasi Fisik Tahun 2018 | Realisasi Fisik terhadap Keseluruhan Bangunan | | Ket |
|----|--|---|----------------------------|---|---------------------------------|-----|
| | | | | Target Kumulatif Hingga 2018 | Realisasi Kumulatif Hingga 2018 | |
| | | Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan | 100% | 100% | 100% | |
| | | Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Sumatera Barat | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Bangunan Rumah Negara | Pembangunan Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat | 100% | 100% | 100% | |
| | | Pembangunan Kembali Rumah Dinas TNI AD (Kodim 0304/Agam) | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Tempat Evakuasi Sementara/ Shelter | Pembangunan Shelter Di Mushalla Jabal Rahmah di Painan | 100% | 80% | 80% | |
| | | Penyempurnaan Shelter Evakuasi Tsunami SMA 1 Sutra Kab. Pesisir Selatan | 100% | | | |

3.1.5. Persentase cakupan air minum

Cakupan air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional, namun pada Tahun 2018 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan capaian sebesar 75% untuk cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3. 8

Target dan Capaian Indikator Persentase Air Minum di Sumatera Barat Tahun 2018

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|---|------------------------------|--------|-----------|--------------------|
| 5 | Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar | Persentase cakupan air minum | 75% | 76,04% | 101,38% |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|------------|-------------------|--------|-----------|--------------------|
| | masyarakat | | | | |

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat capaian persentase cakupan air minum pada Tahun 2018 adalah sebesar 76,04 % atau sebesar 101,38 % atas taret yang telah ditetapkan. Adapun klasifikasi capaian ini adalah sangat baik. Capaian cakupan air minum ini dicapai melalui Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan dua kegiatan dan Total Anggaran Rp 2.771.215.000,-. Berikut kegiatan dan realisasi kegiatan terkait dengan capaian indikator ini.

PSPAM (Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum) APBN

Capaian air minum pada akhir tahun 2017 sebesar 74,58%,hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata kenaikanya berkisar antara 1,5% s/d 2% setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2018 ini capaian air minum Sumatera Barat 76,04%. hal ini tentu tidak lepas dari perannya Pemerintah pusat pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

Beberapa Program yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai Universal Access antara lain melalui program bantuan hibah MBR dimana pemerintah Kabupaten/Kota melalui dana talangan nantinya akan diganti oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Sambungan Rumah (SR). Kemudian melalui program Pamsimas, dimana tahun 2018 program dilaksanakan pada 12 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini dalam tahap penyiapan MOU dan PKS untuk SPAM Regional dibeberapa Kabupaten/Kota. (Agam – Bukittinggi Dan 50Kota – Payakumbuh).

Tabel 3. 8

Program / Kegiatan Pendukung Persentase Cakupan Air Minum Sumatera Barat Tahun 2018

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | FISIK | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| I. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA | 2.771.215.000,00 | 80,00 | 1.402.645.594 | 50,61 | 1.368.569.406 |
| 1 | PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT | 558.915.000,00 | 100,00 | 434.462.114 | 77,73 | 124.452.886 |
| 2 | PEMBINAAN KEGIATAN PAMSIMAS DI PROVINSI SUMATERA BARAT | 164.300.000,00 | 100,00 | 155.550.414 | 94,67 | 8.749.586 |
| 3 | PENYUSUNAN RENCANA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL DI PROV. SUMATERA BARAT | 610.000.000,00 | 100,00 | 597.048.716 | 97,88 | 12.951.284 |
| 4 | PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) DI PROV. SUMATERA BARAT WILAYAH I | 268.000.000,00 | 100,00 | 215.584.350 | 80,44 | 52.415.650 |
| 5 | PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) KAWASAN PALANGAI - NYIUR MELAMBAI KABUPATEN PESISIR SELATAN | 1.170.000.000,00 | - | - | 0,00 | 1.170.000.000 |

Adapun data lengkap cakupan air minum per kabupaten/kota dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3. 9
Data Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2018

| No | Kabupaten / Kota | Persentase Capaian Air Minum 2017 | Persentase Capaian Air Minum 2018 |
|----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Bukittinggi | 51.85 | 64,02 |
| 2 | Padang | 60.92 | 69,76 |
| 3 | Payakumbuh | 100.00 | 96,64 |
| 4 | Sawahlunto | 76.52 | 80,60 |
| 5 | Kab. Dharmasraya | 65.58 | 68,01 |
| 6 | Pariaman | 87.42 | 88,51 |
| 7 | Kab. Agam | 78.35 | 80,69 |
| 8 | Padang Panjang | 87.66 | 90,78 |
| 9 | Solok | 87.36 | 91,39 |
| 10 | Kab. Tanah Datar | 77.09 | 78,37 |
| 11 | Kab. Pesisir Selatan | 81.68 | 80,80 |
| 12 | Kab. Sijunjung | 91.30 | 79,18 |
| 13 | Kab. Pasaman Barat | 80.47 | 82,39 |
| 14 | Kab. Padang Pariaman | 84.70 | 76,62 |
| 15 | Kab. 50 Kota | 73.89 | 69,09 |
| 16 | Kab. Solok | 84.81 | 75,07 |
| 17 | Kab. Pasaman | 76.35 | 79,61 |
| 18 | Kab. Solok Selatan | 86.33 | 79,61 |
| 19 | Kep. Mentawai | 24.59 | 26,70 |

| No | Kabupaten / Kota | Persentase Capaian Air Minum 2017 | Persentase Capaian Air Minum 2018 |
|----|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | TOTAL | 75.83 | 76,04 |

Sumber data : PSPAM (Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum) APBN

Tabel 3. 10
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

| Persentase Cakupan Air Minum | Provinsi Sumatera Barat | Nasional | % |
|------------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 2016 | 72.32% | 71.50% | 101,14% |
| 2017 | 75.83% | 72.04% | 105,26% |
| 2018 | 76,04% | 78% | 97,48% |
| Target 2019 | 80% | 78% | 102,56% |
| Target 2020 | 83% | 85% | 97,64% |
| Target 2021 | 86% | 85% | 101,17% |

Sumber : RPJMN 2015-2019 (diolah) dan Randal (APBN)

3.1.6. Persentase cakupan sanitasi

Sebagaimana air minum, sanitasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam Universal Access dengan capaian Nasional Pada 2019 sebesar 100%. Pada Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian Sanitasi sebesar 75 % dengan realisasi capaian sebesar 75,19 %.

Tabel 3. 11 Indikator Cakupan Sanitasi

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|-----------------------------|--------|-----------|--------------------|
| 1. | Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Persentase cakupan sanitasi | 75 % | 75,19 % | 100,25 % |

Dengan realisasi tersebut, maka persentase capaian Indikator Persentase Cakupan Sanitasi pada Tahun 2018 sebesar 100,25 % dan dapat diklasifikasikan dengan sangat baik.

Target akses sanitasi sebesar 75% pada tahun 2018 telah dapat dicapai dengan angka akses sanitasi pada tahun ini selesai 75,19%. ini menandakan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi dan daerah Kab/Kota terhadap Sanitasi sudah semakin meningkat. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam bentuk peningkatan kapasitas ASN Kab/Kota dalam bidang Sanitasi membuahkan hasil .

OPD didaerah yang menangani Sanitasi telah membuka diri dalam penyediaan anggaran di sektor Sanitasi, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Disamping itu dengan bertambahnya program atau kegiatan Sanitasi didaerah seperti DAK Sanitasi, DAU Sanitasi dan program – program dari pusat seperti Sanimas IDB serta penggunaan dana desa untuk sanitasi, berdampak terhadap peningkatan akses sanitasi di Provinsi Sumatera Barat.

Program dan Kegiatan Pendukung Persentase Cakupan Sanitasi Sumatera Barat Tahun 2018

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | FISIK | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|----|--|----------------|--------|-------------|-------|---------------|
| I | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 836.941.000,00 | 100,00 | 711.142.859 | 84,97 | 125.798.141 |
| 1. | PENDAMPINGAN PROGRAM SANIMAS IDB DAN PPSP | 350.554.500,00 | 100,00 | 271.940.209 | 77,57 | 78.614.291 |
| 2. | PEMBINAAN PENYUSUNAN MASTERPLAN SANITASI KAB/KOTA | 306.386.500,00 | 100,00 | 271.181.650 | 88,51 | 35.204.850 |
| 3. | PENYUSUNAN PROFIL PENGELOLAAN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT | 180.000.000,00 | 100,00 | 168.021.000 | 93,35 | 11.979.000 |

Tabel 3. 12
Data Cakupan Sanitasi Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

| No | Kabupaten / Kota | Persentase Capaian Air Minum 2018 |
|----|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Bukittinggi | 96,26 |
| 2 | Padang | 92,43 |
| 3 | Payakumbuh | 100 |
| 4 | Sawahlunto | 89,93 |
| 5 | Kab. Dharmasraya | 86,51 |
| 6 | Pariaman | 87,58 |
| 7 | Kab. Agam | 83,30 |

| No | Kabupaten / Kota | Persentase Capaian Air Minum 2018 |
|-------|----------------------|-----------------------------------|
| 8 | Padang Panjang | 63,45 |
| 9 | Solok | 100 |
| 10 | Kab. Tanah Datar | 71,73 |
| 11 | Kab. Pesisir Selatan | 79,12 |
| 12 | Kab. Sijunjung | 72,52 |
| 13 | Kab. Pasaman Barat | 68,27 |
| 14 | Kab. Padang Pariaman | 61,03 |
| 15 | Kab. 50 Kota | 59,58 |
| 16 | Kab. Solok | 59,96 |
| 17 | Kab. Pasaman | 47,47 |
| 18 | Kab. Solok Selatan | 51,14 |
| 19 | Kep. Mentawai | 46,86 |
| TOTAL | | 75,19 |

Sumber data : Stantasi Total berbasis Masyarakat (STBM)

Tabel 3. 13
Perbandingan antara Realisasi Kinerja
serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

| Persentase Sanitasi | Provinsi Sumatera Barat | Nasional | % |
|---------------------|-------------------------|----------|----------|
| 2016 | - | - | |
| 2017 | 75.88 % | 71.44 % | 106,21 % |
| 2018 | 75,19 % | 74,74 % | 100,60 % |
| Target 2019 | 78 % | 75% | 104 % |
| Target 2020 | 79 % | 85% | 92,94 % |
| Target 2021 | 80% | 85% | 94,11 % |

Sumber : RPJMN 2015-2019 (diolah)

- 3.1.7. Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi Untuk mendukung sasaran *Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung* melalui indikator *Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan Program RTRW* didukung oleh 2 (dua) program, yaitu:

Anggaran dan Realisasi Keuangan Program di Bidang Penataan Ruang

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | FISIK | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|-----|---|-------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|
| I | PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG | 4.929.252.510,00 | 100,00 | 4.140.183.131 | 83,99 | 789.069.379 |
| 1 | PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI | 923.797.750,00 | 100,00 | 888.039.910 | 96,13 | 35.757.840 |
| 2 | PROSES LEGALISASI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) | 522.914.950,00 | 100,00 | 485.269.586 | 92,80 | 37.645.364 |
| 3 | PELATIHAN PEMETAAN TATA RUANG | 377.813.950,00 | 100,00 | 316.217.662 | 83,70 | 61.596.288 |
| 4 | PENYUSUNAN DATABASE KEPUAN DAN TATA RUANG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | 944.666.750,00 | 100,00 | 869.794.623 | 92,07 | 74.872.127 |
| 5 | LEGALISASI PERDA REVISI RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT | 912.063.150,00 | 100,00 | 679.409.120 | 74,49 | 232.654.030 |
| 6 | KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 286.593.950,00 | 100,00 | 136.645.396 | 47,68 | 149.948.554 |
| 7 | PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENATAAN RUANG | 572.282.150,00 | 100,00 | 416.885.734 | 72,85 | 155.396.416 |
| 8 | PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN BAHAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG | 389.119.860,00 | 100,00 | 347.921.100 | 89,41 | 41.198.760 |
| II | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | 479.701.250,00 | 100,00 | 325.983.700 | 67,96 | 153.717.550 |
| 104 | PENGAWASAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENATAAN RUANG DI KABUPATEN/KOTA | 167.546.950,00 | 100,00 | 117.479.800 | 70,12 | 50.067.150 |
| 105 | PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 144.591.350,00 | 100,00 | 111.775.200 | 77,30 | 32.816.150 |
| 106 | MONITORING PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 167.562.950,00 | 100,00 | 96.728.700 | 57,73 | 70.834.250 |

Dengan target indikator sebesar 82% capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

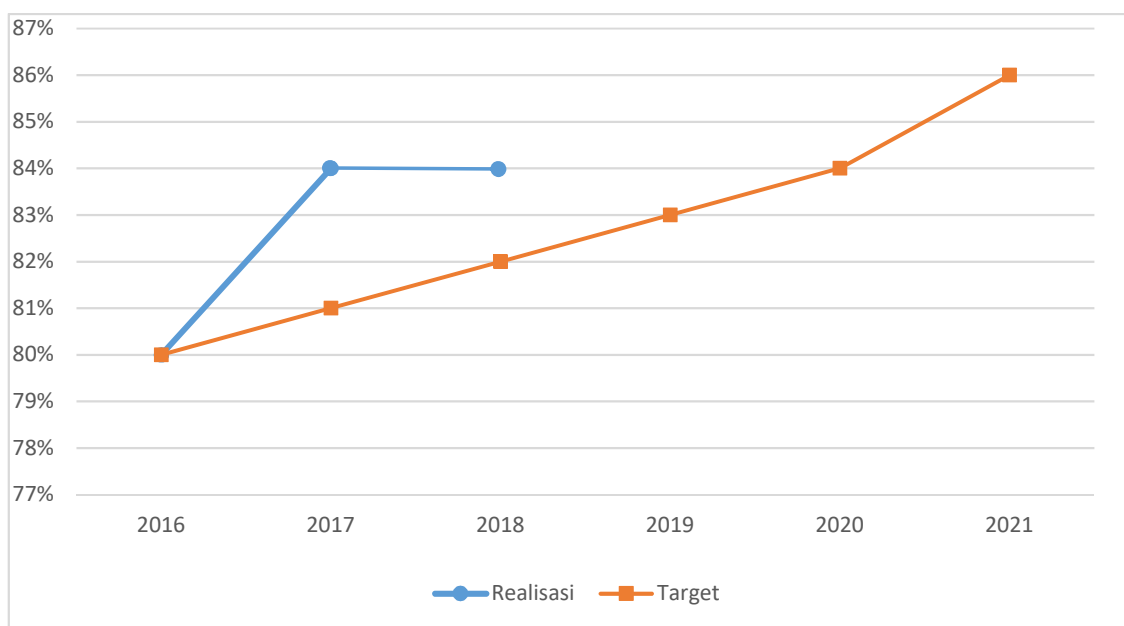
Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|--------------------|
| 7 | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi | 82% | 84% | 102,44 % |

Untuk mendapatkan angka ini dilakukan penghitungan dengan perbandingan Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan program RTRW Provinsi Sumatera Barat dikalikan 100%. Dengan target 82%, pada Tahun 2018 tercapai 84% atau angka capaian sebesar 102,44 %. Klasifikasi capaian ini dapat dikategorikan dengan sangat baik.

| Tahun | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang |
|-------------|--|
| 2016 | 80% |
| 2017 | 84% |
| 2018 | 82% |
| Target 2019 | 83% |
| Target 2020 | 84% |
| Target 2021 | 86% |

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target dan capaian persentase kesesuaian rencana pembangunan (RPJM) dengan rencana tata ruang (RTRW) pada Tahun 2018. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 6
Digaram Target dan Capaian Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2016 - 2021

Adapun data pendukung kesesuaian program pada rencana pembangunan (RPJMD) dengan program pada Rencana Tata Ruang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

- 3.1.8. Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi
Untuk mendukung sasaran *Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung* melalui indikator *Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan Program RTRW* didukung oleh 2 (dua) program, yaitu:

Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Program di Bidang Penataan Ruang

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | FISIK | REALISASI | % | SISA ANGGARAN |
|----|--|------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| I | PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG | 4.929.252.510,00 | 100,00 | 4.140.183.131 | 83,99 | 789.069.379 |
| II | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | 479.701.250,00 | 100,00 | 325.983.700 | 67,96 | 153.717.550 |

Dengan target indikator sebesar 82% capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja

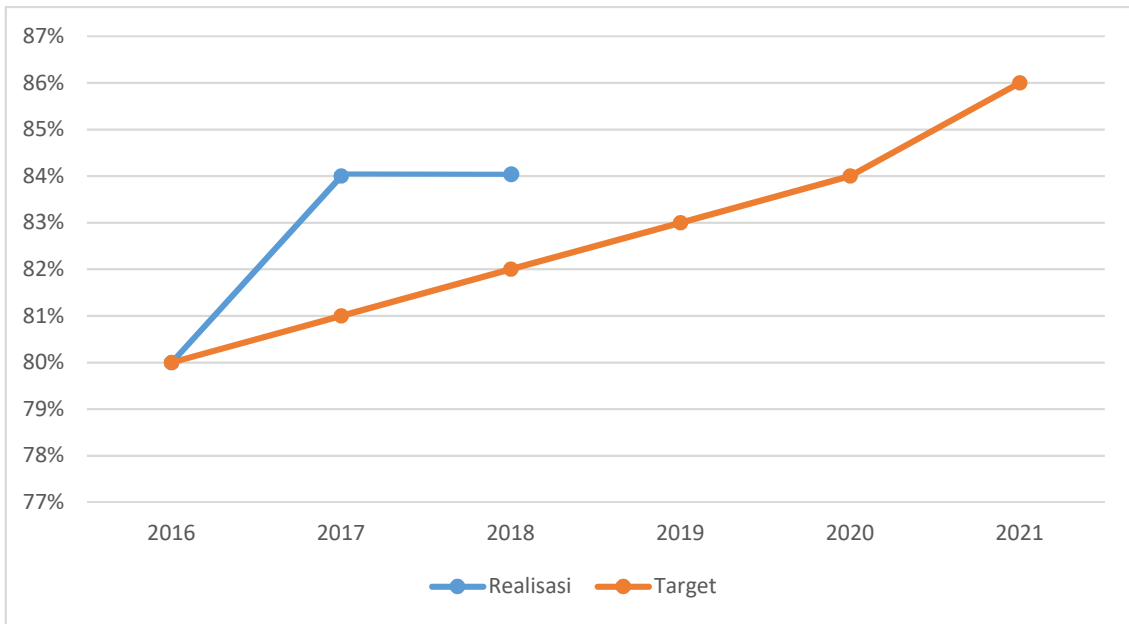
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi | 82% | 84% | 102.44% |

Untuk mendapatkan angka ini dilakukan penghitungan dengan perbandingan Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan program RTRW Provinsi Sumatera Barat dikalikan 100%. Dengan target 82%, pada Tahun 2018 tercapai 84% atau angka capaian sebesar 102.44%. Klasifikasi capaian ini dapat dikategorikan dengan sangat baik.

Kesesuaian Program RTRW Provinsi dengan Rencana Pembangunan

| Tahun | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang |
|-------------|--|
| 2016 | 80% |
| 2017 | 84% |
| Target 2018 | 82% |
| Target 2019 | 83% |
| Target 2020 | 84% |
| Target 2021 | 86% |

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target dan capaian persentase kesesuaian rencana pembangunan (RPJM) dengan rencana tata ruang (RTRW) pada Tahun 2018. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 7
Digaram Target dan Capaian Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan
dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2016 - 2021

Adapun data pendukung kesesuaian program pada rencana pembangunan (RPJMD) dengan program pada Rencana Tata Ruang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| NO | INDIKATOR KINERJA | | | | TARGET | | REALISASI |
|----|---|--|--------------------|---|---------------------|---|-----------|
| | PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032 | PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2018 | KESESUAIAN PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RTRW | JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW | |
| I | <i>Program Perwujudan Pengembangan Struktur Ruang</i> | | | | 25 | 21 | 84% |
| A | <i>Program Perwujudan Pusat Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat</i> | | | | | | |
| 1 | Pemantapan Fungsi Kota PKN | Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut | | Dinas Perhubungan | | | |
| 2 | Pemantapan Fungsi Kota PKW | Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| 3 | Pengembangan dan Penataan PKN | Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| 4 | Pengembangan PKW dan PKWp | Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD | | Dinas Kesehatan | | | |
| 5 | Pengembangan PKL | Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| 6 | Penyusunan Renstra | | | | | | |
| B | <i>Program Perwujudan Sistem Prasarana</i> | | | | | | |
| 1 | Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi | Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA | | | | TARGET | | REALISASI |
|----|--|---|--------------------|---|---------------------|---|-----------|
| | PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032 | PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2018 | KESESUAIAN PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RTRW | JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW | |
| 2 | Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | | Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air | | | |
| 3 | Prasarana Perumahan dan Permukiman | Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| II | <i>Program Perwujudan Pola Ruang</i> | | | | | | |
| A | <i>Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung</i> | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Kawasan Hutan | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | | Dinas Kehutanan | | | |
| 2 | Pemantapan Kawasan Lindung | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | | Dinas Kehutanan | | | |
| 3 | Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Lindung | | | | | | |
| 4 | Kawasan Rawan Bencana Alam | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan | | BPBD | | | |
| B | <i>Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budaya</i> | | | | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA | | | | TARGET | | REALISASI |
|----|---|--|--------------------|---|---------------------|---|-----------|
| | PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032 | PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2018 | KESESUAIAN PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RTRW | JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW | |
| 1 | Pengembangan kawasan permukiman | | | | | | |
| | - pengembangan kawasan permukiman perdesaan | | | | | | |
| | - pengembangan kawasan permukiman perkotaan | Pengembangan perumahan | | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | | | |
| 2 | Pengembangan Kawasan Pertanian | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian | | Dinas Pertanian | | | |
| 3 | Pengembangan Perkebunan | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan | | Dinas Perkebunan | | | |
| 4 | Pengembangan Kawasan Peternakan | Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan | | Dinas Peternakan | | | |
| 5 | Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan | Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan | | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | |
| 6 | Program Pengembangan Kawasan Pertambangan | Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | Dinas ESDM | | | |

| NO | INDIKATOR KINERJA | | | | TARGET | | REALISASI |
|----|--|--|--------------------|---|---------------------|---|-----------|
| | PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032 | PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2018 | KESESUAIAN PROGRAM | OPD PENANGGUNG JAWAB | JUMLAH PROGRAM RTRW | JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW | |
| 7 | Program Pengembangan Industri | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | | | |
| 8 | Program Pengembangan Pariwisata | Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata | | Dinas Pariwisata | | | |
| 9 | Program Pengembangan Kawasan Budaya Peruntukan Lainnya | | | | | | |
| 10 | Penyusunan SPM | | | | | | |
| C | <i>Program Perwujudan Kawasan Strategis</i> | | | | | | |
| 1 | Penyusunan RTR Kawasan Strategis | Perencanaan penataan ruang | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| 2 | Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang | | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |

3.2.1 Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang

Dalam Cascading yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018, Bidang Penataan Ruang bertanggungjawab atas Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Hal ini sekaligus menunjang capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dalam Tujuan 2 Misi 5. Sedangkan dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya RTR yang berkekuatan hukum | Jumlah RTR yang diperdakan | - | | |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR | Jumlah program yang sesuai dengan rencana tata ruang | 25 | 25 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Bidang Penataan Ruang Tahun 2018 adalah 100% dan dalam klasifikasi sangat baik. Adapun rincian realisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR adalah sebagai berikut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi :

- Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (Pembangunan dan Peningkatan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer):
 1. Pembangunan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).
 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).

- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (penyediaan prasarana dan sarana air bersih) :
 3. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/ kota
- Program perwujudan kawasan strategis :
 4. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan TPA Regional, pembangunan TPA pada kabupaten/kota)
 5. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan IPAL, penataan bangunan dan system drainase) :
 6. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi
 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi (peningkatan pengairan irigasi teknis, pengembangan dan konservasi area rawa, pengembangan penyediaan air baku, penanganan abrasi pantai) :
 8. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 9. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
 10. Penyediaan dan pengolahan air baku
 11. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
- Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : Pengembangan kawasan permukiman perkotaan (percepatan penyediaan perumahan, penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh) :
 12. Pengembangan perumahan
 13. Pemberdayaan komunitas perumahan
- Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung : Program Kawasan Rawan Bencana Alam (inventarisir kaw. Rawan bencana, perda zonasi pembangunan di kaw. Rawan bencana, pembangunan system peringatan dini tsunami dll) :
 14. Peningkatan Mitigasi Bencana
 15. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
 17. Penanganan Tanggap Darurat Bencana
 18. Pemulihan Daerah Pasca Bencana
- Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung (rehabilitasi dan konservasi kaw.lindung) :
 19. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
 20. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
 21. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
 - Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (pembangunan terminal, jalur KA, pengembangan transportasi laut) :
 22. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
 23. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
 - Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : program pengembangan perikanan dan kelautan (pengembangan industry maritim, pengembangan sentra budidaya perikanan, dll) :
 24. Pengembangan Ekonomi Maritim
 25. Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

AKUNTABILITAS KINERJA BIDANG PENATAAN RUANG

a. Capaian Kinerja Organisasi

Kesesuaian program rencana pembangunan dengan program rencana tata ruang (RTRW Provinsi Sumatera Barat), dapat dilihat dari implementasi program kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang menjadi dasar/ acuan dalam program pembangunan.

Dari target yang ditetapkan sebesar 82 %, ternyata realisasi yang telah dicapai sebesar 84 %, artinya jumlah program pembangunan yang disusun pada RPJM sebagian besar telah sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program pada RTRW.

Adapun tingkat kesesuaian program dimaksud, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Program pemantapan fungsi kota PKN yang dimaksud dalam RTRW adalah dalam rangka perwujudan pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yakni untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya pelabuhan laut internasional. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program

Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut pada Dinas Perhubungan selaku OPD penanggung jawab.

2. Program pemantapan fungsi kota PKW, sama halnya dengan PKN, maka untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya yaitu peningkatan kapasitas pelayanan air minum. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
3. Program pengembangan dan penataan PKN, Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya terminal regional tipe A. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
4. Program Pengembangan PKW dan PKWp, untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya peningkatan pelayanan rumah sakit dan telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD pada Dinas Kesehatan selaku OPD penanggung jawab.
5. Program Pengembangan PKL, untuk Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sarana prasarana minimum yang harus dimiliki tidak jauh berbeda dengan PKW yakni salah satunya peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan telah diakomodir dalam program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
6. Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi pada RTRW untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
7. Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi dalam RTRW untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air selaku OPD penanggung jawab.

8. Program Prasarana Perumahan dan Permukiman pada RTRW adalah rehabilitasi dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah dan telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
9. Program Pengembangan Kawasan Hutan dalam RTRW berupa pengembangan hutan tanaman, pengembangan ekowisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Hutan pada Dinas Kehutanan selaku OPD penanggung jawab.
10. Program Pemanjapan Kawasan Lindung dalam RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/ meningkatkan fungsi lindung. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pada Dinas Kehutanan.
11. Program Kawasan Rawan Bencana Alam dalam RTRW salah satunya berupa upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan pada BPBD.
12. Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW berupa percepatan penyediaan perumahan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
13. Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada RTRW berupa perluasan lahan dan peningkatan produktifitas lahan padi sawah. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian pada Dinas Pertanian.
14. Program Pengembangan Perkebunan pada RTRW berupa pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan pada Dinas Perkebunan.
15. Program Pengembangan Kawasan Peternakan pada RTRW berupa pengembangan kawasan agribisnis peternakan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan.

16. Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan pada RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
17. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan dalam RTRW salah satunya berupa inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas ESDM.
18. Program Pengembangan Industri dalam RTRW salah satunya berupa program pengembangan industri untuk kabupaten dan kota. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
19. Program Pengembangan Pariwisata dalam RTRW yaitu pengembangan kepariwisataan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata pada Dinas Pariwisata.
20. Program Penyusunan RTR Kawasan Strategis merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
21. Program Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis, merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Factor penunjang tercapainya target kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang :

Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini kami mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program diantara kedua dokumen perencanaan.

Adapun fungsi rencana tata ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

3.2. Capaian Kinerja Bidang / UPT

Untuk mendukung capaian kinerja organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 1 Sekretariat, 3 Bidang dan 3 UPT yang masing-masing memiliki target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian target dalam perjanjian kinerja masing-masing Bidang dan Kasi dijelaskan berikut.

3.2.2 Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

Berdasarkan Pergub Sumatera Barat No 53 Tahun 2017, Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Hal ini sejalan dengan *outcome* dalam Pohon Kinerja dimana Bidang Bina Marga merupakan bidang yang bertanggungjawab terhadap peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah di Sumatera Barat.

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2018, setidaknya Bidang Bina Marga memiliki 3 sasaran untuk mewujudkan Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah tersebut, yaitu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 17

Capaian Indikator Kinerja Bidang Bina Marga

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|---------------------------------------|--------|-----------|--------------------|
| 1 | Berkurangnya jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir | Persentase jalan yang belum terhubung | 95,34% | 92,07% | 103,55% |

| No | Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|---|-------------|-------------|--------------------|
| 2 | Meningkatnya prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan | Jumlah kendaraan yang melintas (LHR) | 152 smp/jam | 152 smp/jam | 100% |
| 3 | Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan | Panjang jalan terbangun sesuai spesifikasi | 3,47 km | 6,89 km | 198,56% |
| | | Panjang jalan terbangun sesuai standar jalan provinsi | 6,61 km | 10,77 km | 162,95% |
| | | Jumlah kendaraan yang melintas (LHR) | 180 smp/jam | 180 smp/jam | 100% |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan capaian target dapat diklasifikasikan dengan sangat baik. Adapun indikator Persentase jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir disebabkan terbatasnya anggaran serta prioritas penanganan jalan pada ruas yang lebih mendesak.

3.2.3 Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas, Penyehatan Lingkungan serta Air Minum dan Limbah.

Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman | Jumlah gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis terbangun sesuai standar bangunan gedung negara | 8 unit | 5 unit | 62,50% |
| 2 | Meningkatnya penyediaan layanan air minum dan sanitasi | Jumlah Debit air terpasang | 200 liter/detik | 200 liter/detik | 100% |
| | | Persentase rumah yang bersanitasi | 75% | 76,19% | 100,25% |

Adapun rincian data debit air dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| Sasaran | Indikator Kinerja | Lokasi | Debit Air |
|--|----------------------------|--|-----------------|
| Meningkatnya penyediaan layanan air minum dan sanitasi | Jumlah debit air terpasang | Peningkatan SPAM Kawasan Sungai Rumbai | 20 liter/detik |
| | | Peningkatan SPAM Kawasan Kotobaru | 20 liter/detik |
| | | Peningkatan SPAM Kawasan Tanah Datar | 20 liter/detik |
| | | Peningkatan SPAM di Malampah | 20 liter/detik |
| | | Peningkatan SPAM di Payakumbuh | 100 liter/detik |
| | | Peningkatan SPAM di Ujung Gading | 20 liter/detik |

3.2.4 Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang

Dalam Cascading yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, Bidang Penataan Ruang bertanggungjawab atas Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Hal ini sekaligus menunjang capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dalam Tujuan 2 Misi 5. Sedangkan dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|--|--------|-----------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya RTR yang berkekuatan hukum | Jumlah RTR yang diperdakan | - | | |
| 2 | Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR | Jumlah program yang sesuai dengan rencana tata ruang | 25 | 25 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Bidang Penataan Ruang Tahun 2017 adalah 100% dan dalam klasifikasi sangat baik. Adapun rincian realisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR adalah sebagai berikut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi :

- Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (Pembangunan dan Peningkatan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer):
 1. Pembangunan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).
 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (penyediaan prasarana dan sarana air bersih) :
 1. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/ kota
- Program perwujudan kawasan strategis :
 1. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan TPA Regional, pembangunan TPA pada kabupaten/kota)
 1. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan IPAL, penataan bangunan dan system drainase) :
 1. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi

2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi (peningkatan pengairan irigasi teknis, pengembangan dan konservasi area rawa, pengembangan penyediaan air baku, penanganan abrasi pantai) :
 1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 2. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
 3. Penyediaan dan pengolahan air baku
 4. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
 - Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : Pengembangan kawasan permukiman perkotaan (percepatan penyediaan perumahan, penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh) :
 1. Pengembangan perumahan
 2. Pemberdayaan komunitas perumahan
 - Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung : Program Kawasan Rawan Bencana Alam (inventarisir kaw. Rawan bencana, perda zonasi pembangunan di kaw. Rawan bencana, pembangunan system peringatan dini tsunami dll) :
 1. Peningkatan Mitigasi Bencana
 2. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
 4. Penanganan Tanggap Darurat Bencana
 5. Pemulihan Daerah Pasca Bencana
 - Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung (rehabilitasi dan konservasi kaw.lindung) :
 1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
 2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
 3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
 - Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (pembangunan terminal, jalur KA, pengembangan transportasi laut) :
 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
 - Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : program pengembangan perikanan dan kelautan (pengembangan industry maritim, pengembangan sentra budidaya perikanan, dll) :
 1. Pengembangan Ekonomi Maritim

2. Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

3.2.5 Capaian Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan

Untuk mencapai peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan berperan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan memiliki sasaran yaitu *tersedianya peralatan labor, pengujian mutu konstruksi dan lingkungan* dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 20
Capaian Indikator Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|---|--|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Tersedianya peralatan labor, pengujian mutu konstruksi dan lingkungan | Jumlah peralatan labor dan pengujian | 201 unit | 169 unit | 84,07% |
| | | Jumlah laporan hasil pengujian mutu konstruksi | 350 dokumen | 677 dokumen | 193,42% |
| | | Jumlah laporan hasil pengujian mutu lingkungan | 350 dokumen | 607 dokumen | 173,42% |

3.2.6 Capaian Kinerja UPTD PIP2B

Dalam perjanjian kinerja UPTD PIP2B dengan Kepala Dinas, UPTD PIP2B memiliki sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 21
Capaian Indikator Kinerja UPTD UPTD PIP2B

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|--|--------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| 1 | Pemeriksaan laik fungsi oleh tim ahli bangunan gedung (TABG) | Jumlah gedung yang laik fungsi | 30 unit | 30 unit | 100% |

3.2.7 Capaian Kinerja UPTD Workshop dan Peralatan

Dalam perjanjian kinerja UPTD Workshop dan Peralatan dengan Kepala Dinas, UPTD Workshop dan Peralatan memiliki sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 22
Capaian Indikator Kinerja UPTD UPTD Workshop dan Peralatan

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|----|---|--|-------------|-------------|--------------------|
| 1 | Tercapainya target redistribusi pendapatan peminjaman peralatan yang siap pakai untuk pemakaian sewa dan non sewa | Jumlah peralatan yang siap pakai untuk pemakaian sewa dan non sewa | 68 unit | 68 unit | 100% |
| | | Jumlah laporan peminjaman peralatan pemakaian sewa | 100 dokumen | 127 dokumen | 127% |
| | | Jumlah laporan peminjaman peralatan pemakaian non sewa | 150 dokumen | 175 dokumen | 116,66% |

3.3. Perbandingan Kinerja Organisasi

3.3.1. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu

Tabel 3. 23
Perbanding Kinerja Organisasi Tahun Lalu

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Peningkatan |
|----|---|---|------------|------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | Persentase Jalan Mantap | 100,08% | 100,07% | 100,009 % |
| | Meningkatkan sarana dan prasarana umum | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | 100 % | 87,50 % | 114,28 % |

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun 2018 | Tahun 2017 | Peningkatan |
|----|--|--|------------|------------|-------------|
| | dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Persentase cakupan air minum | 76,04% | 75,83% | 100,27 % |
| | | Persentase cakupan sanitasi | 75.19% | 75,88% | 99,09 % |
| 2 | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi | 84% | 84% | 100% |

3.3.2. Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra

Tabel 3. 24
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Renstra

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun 2018 | Target 2021 | Persentase Capaian |
|----|--|--|---|----------------------------|--------------------|
| 1 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | Persentase Jalan Mantap | 72,058% | 75% | 96,07% |
| | | Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | 5 unit (29 unit kumulatif) | 54 unit |
| | | Persentase cakupan air minum | 76,04% | 86% | 88,41% |
| | | Persentase cakupan sanitasi | 75.19% | 80% | 93,98% |
| 2 | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi | 84% | 86% | 98% |

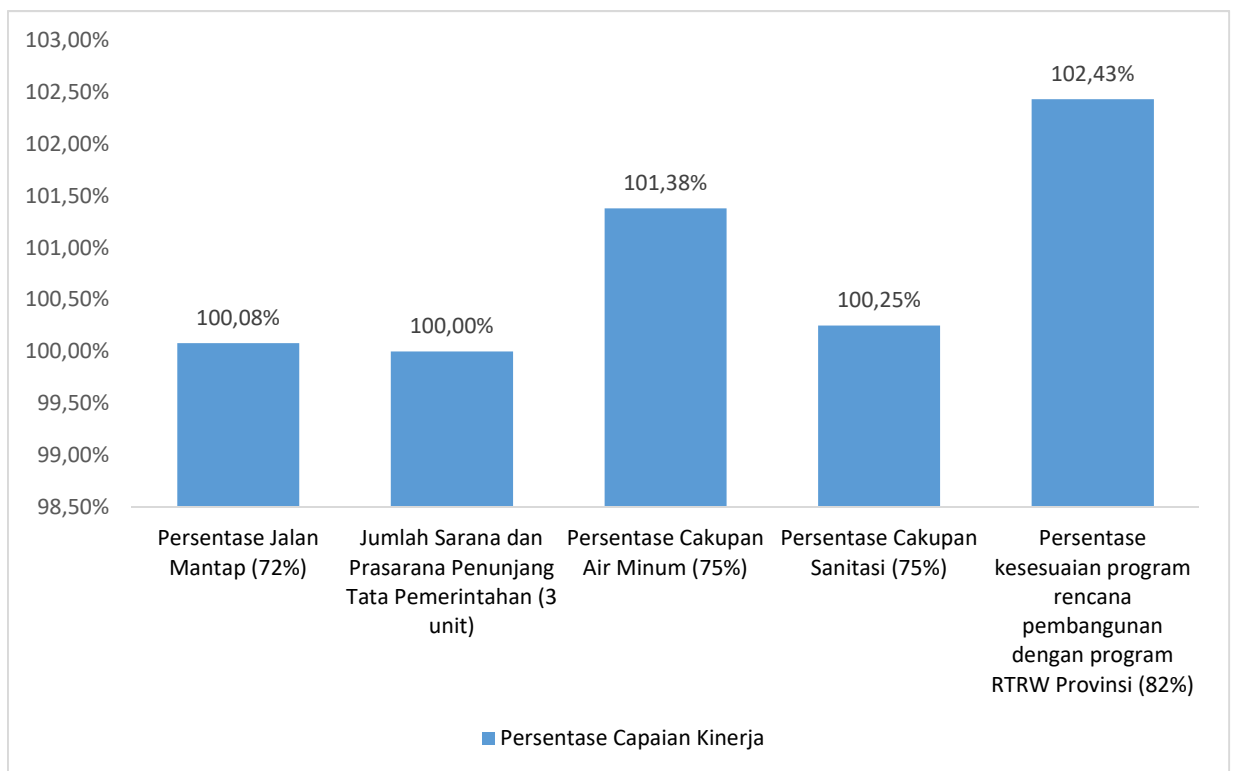
3.3.3. Perbandingan Kinerja Terhadap Target Nasional

Tabel 3. 25
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Capaian Provinsi Sumbar | Capaian Nasional | Deviasi |
|----|--|--|-------------------------|------------------|---------|
| 2 | Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah | Persentase Jalan Mantap | 72,058% | 89,42% | -17,36% |
| | Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | 5 unit | - | |
| | | Persentase cakupan air minum | 76,04% | 76,10% | 99,92% |
| | | Persentase cakupan sanitasi | 75.19% | 74,74% | 100,60% |
| 3 | Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi | 84% | - | |

3.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari ketujuh target kinerja yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keseluruhan target memiliki capaian dengan klasifikasi capaian sangat baik. Hanya ada satu indikator yang memiliki capaian dibawah 100% dan selebihnya memiliki capaian diatas 100%.



Gambar 3. 7
Capaian Kinerja Indikator

a. Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2018 sebesar 72,058%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi ini. Dalam keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pengalokasian sejumlah anggaran untuk program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada Tahun 2018, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki pagu dana sebesar Rp 204.488.943.817,- atau sebesar 44,99% dari total APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mendapat porsi sebesar Rp. 65.298.230.300,- atau sebesar 14,36%. Dengan keterbatasan dana yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pembangunan dan peningkatan ruas jalan sesuai dengan kebutuhan atau standar jalan provinsi. Sehingga target 72% dapat tercapai.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki komitmen dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas terbaik. Hal ini didukung dengan keberadaan UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi sejak tanggal 15 Maret 2012.
3. Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam serupa banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
4. Adanya kegiatan Rehab/Pemeliharaan Rutin yang setiap tahunnya menjaga kemandapan jalan dengan panjang jalan yang dipelihara sepanjang 1248.97 km
5. Adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan.

Peningkatan kondisi kemandapan jalan ini memberikan pengaruh pada :

-) Meningkatnya kecepatan kendaraan sehingga mempengaruhi waktu tempuh rata-rata (waktu perjalanan) menjadi lebih singkat
-) Menurunnya nilai biaya transportasi untuk pengguna jalan, yaitu nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK)
-) Meningkatnya pelayanan jalan seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

b. Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

Indikator ini merupakan salah satu indikator dengan klasifikasi sangat baik namun memiliki penurunan capaian indikator. Capaian Indikator Kinerja adalah sebesar 100%. sedang Capaian Indikator sesuai Renstra adalah sebesar 62,50%, sedang Capaian Indikator sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar 100%. Dalam keberhasilan pencapaian indikator ini ada beberapa hal yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

-) Pada Tahun 2018 dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp 157.341.202.743,- atau sebesar 34,61% dari total pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan anggaran yang ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus juga mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan bangunan strategis lainnya yang sedang dalam progres

pembangunan seperti Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat dan Pembangunan Gedung Kebudayaan yang membutuhkan alokasi dana besar. Sehingga perlu dipilah prioritas bangunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2018.

) Pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan terkait penyelesaian pekerjaan

Adapun penyebab penurunan kinerja pada indikator ini disebabkan adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu Penambahan Garase Rumah Dinas Gubernur fisik 86,47 % kendala terdapat tiang listrik di lokasi pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Proses pemindahan membutuhkan waktu, dan diberlakukan denda 50 hari. Pembangunan Gedung Bundo Kandung fisik 65% dianggarkan kembali 2019 dan Shelter Evakuasi Tsunami di Mushalla Jabal Rahmah di Painan (lanjutan) fisik 80% dianggarkan kembali 2019.

c. Persentase cakupan air minum

Dalam pencapaian kinerja seksi air minum pada tahun 2018, target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pelayanan air minum, terjadi peningkatan dalam pelayanan kinerja SPAM Regional dan tersedianya Database Air Minum untuk kab/kota se Sumatera Barat. Hal – hal yang mendukung dalam pencapaian target 2018 ini adalah:

) Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, terutama oleh PPTK. Setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksanaan segera ditindak lanjuti dan dicari sosialisasi.

) Koordinasi dengan stakeholder seperti bupati/walikota dan jajarannya harus intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan para perencanaan SPAM Regional Kab.Agam-kota Bikittinggi. Permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari.

Dalam pencapaian kinerja efisiensi terhadap sumber daya telah dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi via email/hp sebagai alat koordinasi. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang keciptaan karya, sehingga dengan kegiatan ini pengawasan terhadap kegiatan dan koordinasi internal dapat dilaksanakan dengan optimal.

d. Persentase cakupan sanitasi

Peningkatan layanan terhadap akses sanitasi sudah menjadi prioritas nasional bahkan merupakan universal akses (SDG'S) dengan target akses sanitasi 75% pada tahun 2019. Target nasional tahun 2019 telah terdistribusi menjadi target provinsi dimana provinsi Sumatera Barat memperoleh target sanitasi sebesar 78%, dimana target inipun telah terdistribusi menjadi target sanitasi Kabupaten/Kota.

Secara target, Provinsi Sumatera Barat telah mencapai target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, namun upaya peningkatan pencapaian akses sanitasi belum dapat kita laksanakan pada tahun 2018 ini dengan baik dan maksimal dikarenakan tidak adanya anggaran sektor sanitasi pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Baru pada perubahan APBD Provinsi 2018, kita anggarkan untuk DED drainase primer/lintas kabupaten kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Walaupun demikian, melalui pembentukan Pokja Sanitasi Provinsi, Kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan ke Pokjaan terutama yang melibatkan Pokja Sanitasi Kabupaten Kota sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi Kabupaten Kota dapat terus ditingkatkan.

Disamping itu juga dibina hubungan antar instansi terutama yang terlibat langsung dalam pencapaian akses sanitasi terutama Dinas Kesehatan yang melakukan upaya peningkatan akses sanitasi melalui perubahan perilaku masyarakat yang biasa dikenal melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

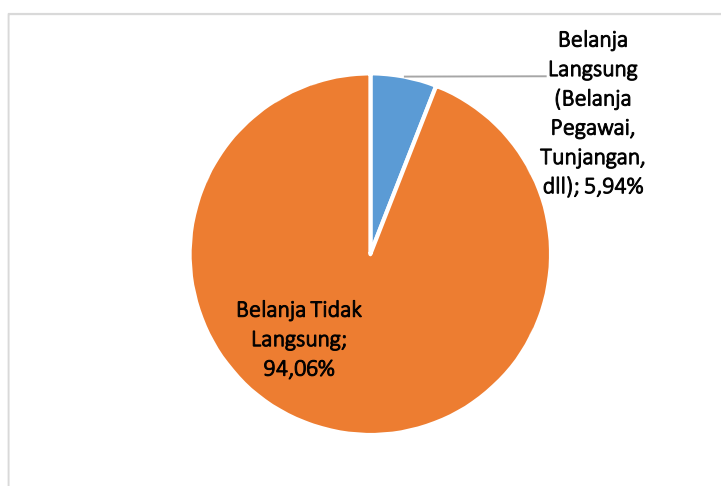
- e. Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan rencana pembangunan Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini kami mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program diantara kedua dokumen perencanaan.

Adapun fungsi rencana tata ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

Pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 adalah sebesar Rp 483.181.721.020,10 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar 28.672.808.958,10 (5,94 %) dan belanja langsung sebesar 454.508.912.062 (94,06 %) Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat di Sumatera Barat.



Gambar 3. 8
Persentase Belanja Tahun Anggaran 2018

Dari Pagu awal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan efisiensi pada Perubahan DPA sebesar Rp 43.863.863.701,24.

Beberapa upaya percepatan dan efisiensi yang dilakukan sepanjang Tahun 2018 atas instruksi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

-) Mempercepat proses pengadaan lahan untuk proyek-proyek strategis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima masyarakat
-) Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan penyerapan anggaran
-) Adanya pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan

Rincian Efisiensi sesuai dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase Kemantapan Jalan efisiensi terdiri dari :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 23.411.911.692,-
 - b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 2.537.422.944,-
2. a. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan efisiensi terdiri dari :
 -) Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 13.549.519.377,-
- b. Persentase Cakupan Air Minum efisiensi terdiri dari :
 -) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah bertambah sebesar Rp. 1.368.569.406,-
- c. Persentase Cakupan Sanitasi efisiensi terdiri dari :
 -) Program/Kegiatan berada pada Kabupaten / Kota.
3. Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi efisiensi terdiri dari :
 - a. Program Perencanaan Tata Ruang bertambah sebesar Rp. 789.069.379,-
 - b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertambah sebesar Rp. 153.717.550,-

Program yang tidak termasuk dalam Indikator Sasaran adalah program penunjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3.6. Realisasi Anggaran

3.6.1. Capaian Realisasi Fisik

Berikut capaian realisasi fisik Tahun 2018.

Tabel 3. 26

**REALISASI PER PROGRAM KEGIATAN APBD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASSI | | REALISASI | | | SISA ANGGARAN |
|------|--|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| | | | FISIK (%) | KINERJA | KEUANGAN | | KINERJA | |
| | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | BELANJA LANGSUNG | 454.508.912.062,00 | 97,64 | Sangat baik | 410.883.552.328,86 | 90,40 | Sangat baik | 43.625.359.733,14 |
| I | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 5.125.016.140,00 | 100,00 | Sangat baik | 4.667.332.355 | 91,07 | Sangat baik | 457.683.785 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 6.986.908.167,00 | 100,00 | Sangat baik | 6.717.495.820 | 96,14 | Sangat baik | 269.412.347 |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 309.819.200,00 | 100,00 | Sangat baik | 299.822.000 | 96,77 | Sangat baik | 9.997.200 |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 185.148.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 161.967.795 | 87,48 | Sangat baik | 23.180.205 |
| V | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 1.369.035.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.258.727.796 | 91,94 | Sangat baik | 110.307.204 |
| VI | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 204.488.943.817,00 | 91,69 | Sangat baik | 181.077.032.125 | 88,55 | Sangat baik | 23.411.911.692 |
| VII | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 65.298.230.300,00 | 97,92 | Sangat baik | 62.760.807.356 | 96,11 | Sangat baik | 2.537.422.944 |
| VIII | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | 1.982.623.465,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.967.517.728 | 99,24 | Sangat baik | 15.105.737 |
| IX | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 836.941.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 711.142.859 | 84,97 | Sangat baik | 125.798.141 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------|-------------|-----------------|-------|-------------|----------------|
| X | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA | 157.341.202.743,00 | 92,58 | Sangat baik | 143.245.064.585 | 91,04 | Sangat baik | 14.096.138.158 |
| XI | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI | 1.463.838.965,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.232.310.365 | 84,18 | Sangat baik | 231.528.600 |
| XII | PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG | 4.929.252.510,00 | 100,00 | Sangat baik | 4.140.183.131 | 83,99 | Baik | 789.069.379 |
| XIII | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | 479.701.250,00 | 100,00 | Sangat baik | 325.983.700 | 67,96 | Cukup | 153.717.550 |
| XIV | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 302.700.755,00 | 100,00 | Sangat baik | 285.188.972 | 94,21 | Sangat baik | 17.511.783 |
| XV | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI | 638.335.750,00 | 100,00 | Sangat baik | 630.330.148 | 98,75 | Sangat baik | 8.005.602 |
| XVI | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA | 2.771.215.000,00 | 80,00 | Baik | 1.402.645.594 | 50,61 | Kurang | 1.368.569.406 |

Tabel 3. 27
**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN APBD
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | | | SISA |
|----|--------------------|----------|--|--|------|
|----|--------------------|----------|--|--|------|

| | | | REALIASI | | REALISASI | | | ANGGARAN |
|----|--|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| | | | FISIK (%) | KINERJA | KEUANGAN | | KINERJA | |
| | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | BELANJA LANGSUNG | 454.508.912.062,00 | 97,64 | Sangat baik | 410.883.552.328,86 | 90,40 | Sangat baik | 43.625.359.733,14 |
| I | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 5.125.016.140,00 | 100,00 | Sangat baik | 4.667.332.355 | 91,07 | Sangat baik | 457.683.785 |
| 1 | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 6.820.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 6.752.859 | 99,02 | Sangat baik | 67.141 |
| 2 | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 1.669.800.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.398.219.945 | 83,74 | Baik | 271.580.055 |
| 3 | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR | 1.791.555.390,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.756.903.555 | 98,07 | Sangat baik | 34.651.835 |
| 4 | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 178.711.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 178.493.590 | 99,88 | Sangat baik | 217.410 |
| 5 | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 142.365.750,00 | 100,00 | Sangat baik | 125.931.180 | 88,46 | Sangat baik | 16.434.570 |
| 6 | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 30.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 26.327.600 | 87,76 | Sangat baik | 3.672.400 |
| 7 | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 30.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 29.996.000 | 99,99 | Sangat baik | 4.000 |
| 8 | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH | 950.764.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 833.237.263 | 87,64 | Sangat baik | 117.526.737 |
| 9 | PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI | 325.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 311.470.363 | 95,84 | Sangat baik | 13.529.637 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 6.986.908.167,00 | 100,00 | Sangat baik | 6.717.495.820 | 96,14 | Sangat baik | 269.412.347 |
| 10 | PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI | 384.991.700,00 | 100,00 | Sangat baik | 354.336.700 | 92,04 | Sangat baik | 30.655.000 |
| 11 | PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR | 1.266.521.316,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.212.734.700 | 95,75 | Sangat baik | 53.786.616 |
| 12 | PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL | 409.400.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 405.030.053 | 98,93 | Sangat baik | 4.369.947 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------|-------------|-----------------|--------|-------------|----------------|
| 13 | PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 105.850.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 81.626.557 | 77,12 | Baik | 24.223.443 |
| 14 | PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET OPD | 315.028.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 243.290.559 | 77,23 | Baik | 71.737.441 |
| 15 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 1.894.201.251,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.894.201.251 | 100,00 | Sangat baik | 0 |
| 16 | PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1.322.961.400,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.250.857.000 | 94,55 | Sangat baik | 72.104.400 |
| 17 | PEMBANGUNAN FASILITAS PENUNJANG KANTOR DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT | 360.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 357.788.000 | 99,39 | Sangat baik | 2.212.000 |
| 18 | RENOVASI RUMAH DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT | 927.954.500,00 | 100,00 | Sangat baik | 917.631.000 | 98,89 | Sangat baik | 10.323.500 |
| III | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 309.819.200,00 | 100,00 | Sangat baik | 299.822.000 | 96,77 | Sangat baik | 9.997.200 |
| 19 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA | 309.819.200,00 | 100,00 | Sangat baik | 299.822.000 | 96,77 | Sangat baik | 9.997.200 |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 185.148.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 161.967.795 | 87,48 | Sangat baik | 23.180.205 |
| 20 | BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 185.148.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 161.967.795 | 87,48 | Sangat baik | 23.180.205 |
| V | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 1.369.035.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.258.727.796 | 91,94 | Sangat baik | 110.307.204 |
| 21 | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | 247.335.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 215.886.042 | 87,28 | Sangat baik | 31.448.958 |
| 22 | PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD | 791.700.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 785.450.000 | 99,21 | Sangat baik | 6.250.000 |
| 23 | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | 80.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 65.047.991 | 81,31 | Baik | 14.952.009 |
| 24 | MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD | 250.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 192.343.763 | 76,94 | Baik | 57.656.237 |
| VI | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 204.488.943.817,00 | 91,69 | Sangat baik | 181.077.032.125 | 88,55 | Sangat baik | 23.411.911.692 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------|-------------|----------------|-------|-------------|---------------|
| 25 | PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 919.816.700,00 | 100,00 | Sangat baik | 911.343.209 | 99,08 | Sangat baik | 8.473.491 |
| 26 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA PADANG DAN KAB. PESISIR SELATAN | 7.760.310.900,00 | 100,00 | Sangat baik | 7.748.750.850 | 99,85 | Sangat baik | 11.560.050 |
| 27 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK | 27.361.349.400,00 | 100,00 | Sangat baik | 27.352.454.600 | 99,97 | Sangat baik | 8.894.800 |
| 28 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH | 10.297.251.700,00 | 100,00 | Sangat baik | 10.268.177.700 | 99,72 | Sangat baik | 29.074.000 |
| 29 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT | 11.463.198.200,00 | 100,00 | Sangat baik | 11.459.817.350 | 99,97 | Sangat baik | 3.380.850 |
| 30 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA | 13.219.999.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 13.218.918.950 | 99,99 | Sangat baik | 1.080.050 |
| 31 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. TANAH DATAR DAN KOTA SAWAHLUNTO | 11.742.896.700,00 | 92,87 | Sangat baik | 10.557.404.479 | 89,90 | Sangat baik | 1.185.492.221 |
| 32 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI | 25.279.632.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 25.275.414.984 | 99,98 | Sangat baik | 4.217.016 |
| 33 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SOLOK DAN KAB. SOLOK SELATAN | 10.825.704.800,00 | 100,00 | Sangat baik | 10.821.169.800 | 99,96 | Sangat baik | 4.535.000 |
| 34 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 4.984.423.800,00 | 100,00 | Sangat baik | 4.979.475.000 | 99,90 | Sangat baik | 4.948.800 |
| 35 | PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-I | 9.529.042.800,00 | 100,00 | Sangat baik | 9.511.768.500 | 99,82 | Sangat baik | 17.274.300 |
| 36 | PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-II | 14.127.563.500,00 | 86,00 | Sangat baik | 11.191.081.300 | 79,21 | Baik | 2.936.482.200 |
| 37 | PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN PROVINSI | 821.948.650,00 | 100,00 | Sangat baik | 777.555.185 | 94,60 | Sangat baik | 44.393.465 |
| 38 | PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN PROVINSI | 11.200.000.000,00 | 35,39 | Kurang | 3.963.882.728 | 35,39 | Kurang | 7.236.117.272 |
| 39 | PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS | 7.886.767.500,00 | 3,02 | Kurang | 238.369.312 | 3,02 | Kurang | 7.648.398.188 |
| 40 | MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN | 54.618.800,00 | | Sangat baik | 54.179.458 | 99,20 | Sangat baik | 439.342 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| | UTILITAS UMUM | | 100,00 | | | | | |
| 41 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI | 599.994.800,00 | 100,00 | Sangat baik | 593.555.518 | 98,93 | Sangat baik | 6.439.282 |
| 42 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PROVINSI | 483.169.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 480.741.662 | 99,50 | Sangat baik | 2.427.338 |
| 43 | PENYUSUNAN DATABASE DAN SURVEY JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 1.172.052.667,00 | 100,00 | Sangat baik | 925.721.196 | 78,98 | Baik | 246.331.471 |
| 44 | PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 6.674.484.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 6.464.473.163 | 96,85 | Sangat baik | 210.010.837 |
| 45 | PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN PROVINSI DAK | 22.662.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 18.878.765.861 | 83,31 | Baik | 3.783.234.139 |
| 46 | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN | 5.422.718.900,00 | 100,00 | Sangat baik | 5.404.011.320 | 99,66 | Sangat baik | 18.707.580 |
| VII | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 65.298.230.300,00 | 97,92 | Sangat baik | 62.760.807.356 | 96,11 | Sangat baik | 2.537.422.944 |
| 47 | REHAB / PEMEL RUTIN JEMBATAN PROVINSI DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN | 3.261.727.800,00 | 100,00 | Sangat baik | 2.971.851.094 | 91,11 | Sangat baik | 289.876.706 |
| 48 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BUKITTINGGI DAN AGAM TIMUR | 3.102.564.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 3.101.701.200 | 99,97 | Sangat baik | 862.800 |
| 49 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH | 4.949.178.500,00 | 100,00 | Sangat baik | 4.944.719.190 | 99,91 | Sangat baik | 4.459.310 |
| 50 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG | 3.464.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 3.458.576.410 | 99,84 | Sangat baik | 5.423.590 |
| 51 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PADANG | 2.373.808.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 2.346.548.100 | 98,85 | Sangat baik | 27.259.900 |
| 52 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK | 2.986.084.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 2.984.141.450 | 99,93 | Sangat baik | 1.942.550 |
| 53 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB SOLOK SELATAN | 2.755.435.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 2.755.356.160 | 100,00 | Sangat baik | 78.840 |
| 54 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA | 3.074.829.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 3.074.066.612 | 99,98 | Sangat baik | 762.388 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|--------|-------------|----------------|-------|-------------|---------------|
| 55 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PESISIR SELATAN DAN KEP. MENTAWAI | 3.026.260.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 2.966.017.350 | 98,01 | Sangat baik | 60.242.650 |
| 56 | PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN | 1.200.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.160.823.471 | 96,74 | Sangat baik | 39.176.529 |
| 57 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. AGAM | 2.249.905.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 2.249.685.540 | 99,99 | Sangat baik | 219.460 |
| 58 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN | 3.177.291.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 3.165.501.089 | 99,63 | Sangat baik | 11.789.911 |
| 59 | REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN BARAT | 2.813.732.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 2.809.913.940 | 99,86 | Sangat baik | 3.818.060 |
| 60 | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH I | 9.793.084.300,00 | 100,00 | Sangat baik | 9.787.318.600 | 99,94 | Sangat baik | 5.765.700 |
| 61 | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH II | 10.857.289.700,00 | 100,00 | Sangat baik | 10.851.023.450 | 99,94 | Sangat baik | 6.266.250 |
| 62 | PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN JALAN DAN JEMBATAN | 6.213.042.000,00 | 66,67 | Sangat baik | 4.133.563.700 | 66,53 | Cukup | 2.079.478.300 |
| VIII | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | 1.982.623.465,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.967.517.728 | 99,24 | Sangat baik | 15.105.737 |
| 63 | PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN | 340.022.300,00 | 100,00 | Sangat baik | 337.965.692 | 99,40 | Sangat baik | 2.056.608 |
| 64 | PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN | 1.371.757.275,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.371.569.881 | 99,99 | Sangat baik | 187.394 |
| 65 | MONITORING PENGENDALIAN MUTU UPTD | 270.843.890,00 | 100,00 | Sangat baik | 257.982.155 | 95,25 | Sangat baik | 12.861.735 |
| IX | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 836.941.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 711.142.859 | 84,97 | Sangat baik | 125.798.141 |
| 66 | PENDAMPINGAN PROGRAM SANIMAS IDB DAN PPSP | 350.554.500,00 | 100,00 | Sangat baik | 271.940.209 | 77,57 | Baik | 78.614.291 |
| 67 | PEMBINAAN PENYUSUNAN MASTERPLAN SANITASI KAB/KOTA | 306.386.500,00 | 100,00 | Sangat baik | 271.181.650 | 88,51 | Sangat baik | 35.204.850 |
| 68 | PENYUSUNAN PROFIL PENGELOLAAN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT | 180.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 168.021.000 | 93,35 | Sangat baik | 11.979.000 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| X | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA | 157.341.202.743,00 | 92,58 | Sangat baik | 143.245.064.585 | 91,04 | Sangat baik | 14.096.138.158 |
| 69 | PEMBANGUNAN STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 96.469.877.143,00 | 99,11 | Sangat baik | 89.528.482.055 | 92,80 | Sangat baik | 6.941.395.088 |
| 70 | PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 34.764.471.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 31.089.253.100 | 89,43 | Sangat baik | 3.675.217.900 |
| 71 | PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT | 378.610.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 358.823.110 | 94,77 | Sangat baik | 19.786.890 |
| 72 | PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 10.234.000.000,00 | 95,01 | Sangat baik | 8.782.841.670 | 85,82 | Sangat baik | 1.451.158.330 |
| 73 | PEMBANGUNAN GEDUNG BUNDO KANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 993.140.500,00 | 100,00 | Sangat baik | 978.188.650 | 98,49 | Sangat baik | 14.951.850 |
| 74 | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN TEKNIS (TPT) BANGUNAN NEGARA DI SUMATERA BARAT | 97.726.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 81.182.186 | 83,07 | Sangat baik | 16.543.814 |
| 75 | PENYELENGGARAAN HARI PERS NASIONAL | 290.182.700,00 | 100,00 | Sangat baik | 272.190.730 | 93,80 | Sangat baik | 17.991.970 |
| 76 | REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA | 2.053.616.600,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.869.771.250 | 91,05 | Sangat baik | 183.845.350 |
| 77 | PEMBANGUNAN GEDUNG PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI SUMATERA BARAT | 3.498.769.300,00 | 100,00 | Sangat baik | 3.480.645.920 | 99,48 | Sangat baik | 18.123.380 |
| 78 | PENAMBAHAN GARASE RUMAH DINAS GUBERNUR | 748.110.500,00 | 100,00 | Sangat baik | 646.880.415 | 86,47 | Sangat baik | 101.230.085 |
| 79 | PEMBANGUNAN TAMAN WISATA KELOK SEMBILAN | 1.161.820.000,00 | - | Kurang | 172.092.000 | 14,81 | Kurang | 989.728.000 |
| 80 | PENDAMPINGAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI SUMATERA BARAT | 135.526.800,00 | 100,00 | Sangat baik | 133.700.550 | 98,65 | Sangat baik | 1.826.250 |
| 81 | PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI TEKNIS DAN ADVOKASI SERTA TERSEDINYA DATA INFORMASI TEKNIS BIDANG KECIPTAKARYAAN | 214.950.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 165.256.700 | 76,88 | Baik | 49.693.300 |
| 82 | PEMBINAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) | 571.970.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 528.383.408 | 92,38 | Sangat baik | 43.586.592 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|--------|-------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 83 | ASSESMENT BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | 242.730.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 220.532.622 | 90,86 | Sangat baik | 22.197.378 |
| 84 | REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA I | 4.232.751.200,00 | 100,00 | Sangat baik | 4.230.508.000 | 99,95 | Sangat baik | 2.243.200 |
| 85 | PEMBANGUNAN SHELTER DI MUSHOLLA JABAL RAHMAH DI PAINAN (LANJUTAN) | 252.951.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 227.649.047 | 90,00 | Sangat baik | 25.301.953 |
| 86 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT | 600.000.000,00 | 50,00 | Kurang | 99.000.000 | 16,50 | Kurang | 501.000.000 |
| 87 | PEMBANGUNAN LAPANGAN TENNIS GUBERNURAN (LANJUTAN) | 250.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 238.424.920 | 95,37 | Sangat baik | 11.575.080 |
| 88 | REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA II | 20.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 17.741.332 | 88,71 | Sangat baik | 2.258.668 |
| 89 | PENYUSUNAN MASTERPLAN PASAR KOTO BARU | 130.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 123.516.920 | 95,01 | Sangat baik | 6.483.080 |
| XI | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI | 1.463.838.965,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.232.310.365 | 84,18 | Sangat baik | 231.528.600 |
| 90 | PENYUSUNAN RANPERDA SMM | 1.639.500,00 | 100,00 | Sangat baik | 1.639.500 | 100,00 | Sangat baik | - |
| 91 | BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP JASA KONSTRUKSI | 586.501.110,00 | 100,00 | Sangat baik | 516.822.250 | 88,12 | Sangat baik | 69.678.860 |
| 92 | LOKAKARYA, SOSIALISASI DAN FORUM KOMUNIKASI JASA KONSTRUKSI | 387.337.865,00 | 100,00 | Sangat baik | 317.701.350 | 82,02 | Baik | 69.636.515 |
| 93 | KEGIATAN UPDATE PROFIL JASA KONSTRUKSI | 139.029.140,00 | 100,00 | Sangat baik | 108.868.000 | 78,31 | Baik | 30.161.140 |
| 94 | PENYUSUNAN RANPERDA SMK3 | 171.642.780,00 | 100,00 | Sangat baik | 138.313.040 | 80,58 | Baik | 33.329.740 |
| 95 | SERTIFIKASI AHLI MUDA | 177.688.570,00 | 100,00 | Sangat baik | 148.966.225 | 83,84 | Baik | 28.722.345 |
| XII | PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG | 4.929.252.510,00 | 100,00 | Sangat baik | 4.140.183.131 | 83,99 | Baik | 789.069.379 |
| 96 | PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI | 923.797.750,00 | 100,00 | Sangat baik | 888.039.910 | 96,13 | Sangat baik | 35.757.840 |
| 97 | PROSES LEGALISASI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) | 522.914.950,00 | 100,00 | Sangat baik | 485.269.586 | 92,80 | Sangat baik | 37.645.364 |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 98 | PELATIHAN PEMETAAN TATA RUANG | 377.813.950,00 | 100,00 | Sangat baik | 316.217.662 | 83,70 | Baik | 61.596.288 |
| 99 | PENYUSUNAN DATABASE KE PU AN DAN TATA RUANG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | 944.666.750,00 | 100,00 | Sangat baik | 869.794.623 | 92,07 | Sangat baik | 74.872.127 |
| 100 | LEGALISASI PERDA REVISI RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT | 912.063.150,00 | 100,00 | Sangat baik | 679.409.120 | 74,49 | Baik | 232.654.030 |
| 101 | KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 286.593.950,00 | 100,00 | Sangat baik | 136.645.396 | 47,68 | Kurang | 149.948.554 |
| 102 | PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENATAAN RUANG | 572.282.150,00 | 100,00 | Sangat baik | 416.885.734 | 72,85 | Cukup | 155.396.416 |
| 103 | PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN BAHAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG | 389.119.860,00 | 100,00 | Sangat baik | 347.921.100 | 89,41 | Sangat baik | 41.198.760 |
| XIII | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | 479.701.250,00 | 100,00 | Sangat baik | 325.983.700 | 67,96 | Cukup | 153.717.550 |
| 104 | PENGAWASAN TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENATAAN RUANG DI KABUPATEN/KOTA | 167.546.950,00 | 100,00 | Sangat baik | 117.479.800 | 70,12 | Cukup | 50.067.150 |
| 105 | PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 144.591.350,00 | 100,00 | Sangat baik | 111.775.200 | 77,30 | Cukup | 32.816.150 |
| 106 | MONITORING PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 167.562.950,00 | 100,00 | Sangat baik | 96.728.700 | 57,73 | Cukup | 70.834.250 |
| XIV | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 302.700.755,00 | 100,00 | Sangat baik | 285.188.972 | 94,21 | Sangat baik | 17.511.783 |
| 107 | INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI | 302.700.755,00 | 100,00 | Sangat baik | 285.188.972 | 94,21 | Sangat baik | 17.511.783 |
| XV | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI | 638.335.750,00 | 100,00 | Sangat baik | 630.330.148 | 98,75 | Sangat baik | 8.005.602 |
| 108 | PEMBANGUNAN DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA | 5.318.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 5.318.000 | 100,00 | Sangat baik | - |
| 109 | SURVEY DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA | 177.017.750,00 | 100,00 | Sangat baik | 172.980.148 | 97,72 | Sangat baik | 4.037.602 |
| 110 | PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN TANAH | 228.000.000,00 | | Sangat baik | 226.235.000 | 99,23 | Sangat baik | 1.765.000 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| | DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG | | 100,00 | | | | | |
| 111 | PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK | 228.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 225.797.000 | 99,03 | Sangat baik | 2.203.000 |
| XVI | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KAB/KOTA | 2.771.215.000,00 | 80,00 | Baik | 1.402.645.594 | 50,61 | Kurang | 1.368.569.406 |
| 112 | PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT | 558.915.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 434.462.114 | 77,73 | Baik | 124.452.886 |
| 113 | PEMBINAAN KEGIATAN PAMSIMAS DI PROVINSI SUMATERA BARAT | 164.300.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 155.550.414 | 94,67 | Sangat baik | 8.749.586 |
| 114 | PENYUSUNAN RENCANA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL DI PROV. SUMATERA BARAT | 610.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 597.048.716 | 97,88 | Sangat baik | 12.951.284 |
| 115 | PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) DI PROV. SUMATERA BARAT WILAYAH I | 268.000.000,00 | 100,00 | Sangat baik | 215.584.350 | 80,44 | Baik | 52.415.650 |
| 116 | PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) KAWASAN PALANGAI - NYIUR MELAMBAI KABUPATEN PESISIR SELATAN | 1.170.000.000,00 | - | Kurang | - | 0,00 | Kurang | 1.170.000.000 |

Hasil evaluasi capaian kinerja fisik terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 15 (lima belas) program yang berkinerja sangat baik dan 1 (satu) program baik dan capaian kinerja keuangan terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program berkinerja sangat baik, 1 (satu) program berkinerja baik, 1 (satu) program berkinerja cukup, 1 (satu) program berkinerja kurang.

3.6.2. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.28

REALISASI FISIK / KEUANGAN / KENDALA TAHUN 2018

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEHANGKATAN 90 % | SISA ANGGARAN | |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------|--------------|---------------------|--|-------------------|-----|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | | | (%) |
| | BELANJA LANGSUNG | | | 454.508.912.462,00 | 97,54 | 410.883.552.328,86 | 90,46 | 43.625.359.733,14 | |
| Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi | Nilai Evaluasi | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 5.125.015.140,00 | 100,00 | 4.667.332.355,91,00 | 91,00 | 457.682,76 | |
| | Akuntabilitas Kinerja dan Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan anggaran kas | Akuntabilitas Kinerja dan Persentase capaian dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan anggaran kas | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 6.820.000,00 | 100,00 | 6.752.859,99,02 | 99,02 | 67,141 | |
| | | | PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 1.669.800.000,00 | 100,00 | 1.398.219.945,83,74 | 83,74 | 271.580,055 | |
| | | | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR | 1.791.555.390,00 | 100,00 | 1.756.003.555,98,07 | 98,07 | 34.651,835 | |
| | | | PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 178.711.000,00 | 100,00 | 178.193.590,99,88 | 99,88 | 217,110 | |
| | | | PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN | 142.365.750,00 | 100,00 | 125.931.180,88,46 | 88,46 | 16.434,570 | |
| | | | PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 30.000.000,00 | 100,00 | 26.327.900,87,76 | 87,76 | 3.672,400 | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|---|--|---|------------------|--------------|---------------|-------|--|------------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | | PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 30.000.000,00 | 100,00 | 29.986.000 | 99,99 | | 4.000 |
| | | | RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH | 950.764.000,00 | 100,00 | 633.237.263 | 67,64 | Sisa anggaran senilai 12,36 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 117.526.737 |
| | | | PENYEDIAAN JAGA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI | 325.000.000,00 | 100,00 | 311.470.363 | 95,84 | | 13.529.637 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 6.986.908.167,00 | 100,00 | 6.717.495.820 | 96,14 | | 269.412.347 |
| | | | PENGAWAHLAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI | 384.991.700,00 | 100,00 | 364.336.700 | 92,04 | | 30.655.000 |
| | | | PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR | 1.266.521.316,00 | 100,00 | 1.212.734.700 | 95,75 | | 53.786.616 |
| | | | PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL | 409.400.000,00 | 100,00 | 405.030.053 | 98,93 | | 4.369.947 |
| | | | PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 105.850.000,00 | 100,00 | 81.828.557 | 77,12 | Sisa anggaran senilai 22,88 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 24.221.443 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FENILFI ASAM CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIDAWAIH KFIANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|---|---|------------------|----------------|--------------------------|--|------------------|
| | | | | | FISIK (%) | KFIANGAN (Rp) (%) | | |
| | | | PENGLOLOAN, PENGAYASAN DAN PENGENDALIAN ASET OPD | 315.028.000,00 | 100,00 | 243.290.559 77,23 | Sisa anggaran senilai 22,77 merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 11.737.441 |
| | | | PENCADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 1.894.201.251,00 | 100,00 | 1.894.201.251 100,00 | | 0 |
| | | | PENGADAAN PERALATAN DAN PRRI POKKARAN KANTOR | 1.322.981.400,00 | 100,00 | 1.250.857.000 94,55 | | 72.104.400 |
| | | | TEMBANULAN FASILAS PENJNANG KANTOR DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT | 360.000.000,00 | 100,00 | 357.788.000 99,38 | | 2.212.000 |
| | | | RENOVASI RUMAH DINAS PU DAN PENATAAN RUANG SUMATERA BARAT | 927.954.500,00 | 100,00 | 917.631.000 98,88 | | 10.323.500 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DISIPIIN APARATUR | 300.819.200,00 | 100,00 | 299.822.000 99,77 | | 9.997.200 |
| | | | PENGADAAN POKKARAN LINDI B-SERKIA PRRI POKKARANNYA | 309.819.200,00 | 100,00 | 299.822.000 96,77 | | 9.997.200 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 185.148.000,00 | 100,00 | 161.967.795 87,48 | | 23.180.205 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|---|-------------------------|---|---|--------------------|-----------|-----------------|-------|--|----------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah | Persentase Jalan Mantap | Perbandingan Jumlah Mantap Jalan Provinsi dibandingkan dengan Total Panjang Jalan Provinsi (Km) dikalikan 100 % | BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERLINDUNG-UNDANGAN | 182.145.000,00 | 100,00 | 151.967.796 | 87,48 | Sisa anggaran senilai 12,52 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 30.190.200 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN PENGELOMPOKAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 1.385.035.000,00 | 100,00 | 1.255.127.796 | 91,34 | | 110.307.204 |
| | | | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | 247.335.000,00 | 100,00 | 215.886.042 | 87,28 | Sisa anggaran senilai 12,72 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 21.448.958 |
| | | | PENATAAN KEUANGAN SKPD | 791.700.000,00 | 100,00 | 730.450.000 | 99,21 | | 6.250.000 |
| | | | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN BERTISAP REALISASI KINERJA SKPD | 60.000.000,00 | 100,00 | 55.047.991 | 91,21 | Sisa anggaran senilai 18,69 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 14.952.009 |
| | | | MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD | 250.000.000,00 | 100,00 | 192.343.763 | 76,94 | Sisa anggaran senilai 23,06 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 57.656.237 |
| | | | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 204.462.943.617,00 | 91,45 | 181.077.032.123 | 88,55 | | 23.411.911.492 |
| | | | PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JAJAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | 216.815.700,00 | 100,00 | 211.513.209 | 90,38 | | 5.475.491 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA PADANG DAN KABUPATEN BELANTAN | 7.760.310.900,00 | 100,00 | 7.718.750.850 | 90,55 | | 11.560.050 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA | 27.361.349.400,00 | 100,00 | 27.352.454.600 | 99,97 | | 8.894.800 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|---|--|-------------------|-----------|----------------|-------|--|---------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | Perbandingan Jumlah Mantap Jalan Provinsi dibandingkan dengan Total Panjang Jalan Provinsi (km) dikalikan | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK | 27.361.349.400,00 | 100,00 | 27.352.454.800 | 99,97 | | 8.694.800 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SO KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH | 10.297.251.700,00 | 100,00 | 10.268.177.700 | 99,72 | | 20.074.000 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT | 11.403.198.200,00 | 100,00 | 11.459.917.350 | 99,97 | | 3.380.850 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA | 13.219.999.000,00 | 100,00 | 13.216.916.950 | 99,99 | | 1.080.050 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. TANAH DATAR DAN KOTA BAKAHLUHUTO | 11.742.895.700,00 | 92,87 | 10.557.404.479 | 89,90 | <ul style="list-style-type: none"> • Kelalaian kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan pasangan batu di lahan masyarakat. Penyelesaian pekerjaan pasangan batu mempengaruhi pekerjaan rigid beton di badan jalan yang merupakan major item di dalam paket ini- •Lambatnya memulai pekerjaan di segmen 1 (dari gerbang PLTU sampai ke Jembatan Siagam) karena menunggu proses pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh pihak Pamko Sawahlunto •Lalu lintas truk tronton pengangkut batu bara untuk kebutuhan PLTU Ombilin dengan tonase berat melebihi 40 ton. Tidak tercapai kesepakatan untuk mengganti dengan truk yang lebih kecil sehingga mempengaruhi metoda dan waktu pelaksanaan pekerjaan rigid | 1.185.492.221 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKJ) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|--|---|-------------------|----------------|----------------|-------|---|------------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI | 25.275.632.000,00 | 100,00 | 25.275.414.964 | 99,96 | | 4.217.016 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SOLOK DAN KAB. SOLOK SELATAN | 10.825.704.800,00 | 100,00 | 10.821.169.800 | 99,96 | | 4.535.000 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. KEPULAUAN NENTAWAI | 4.984.423.800,00 | 100,00 | 4.979.475.000 | 99,90 | | 4.948.800 |
| | | | PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH- | 9.525.042.800,00 | 100,00 | 9.511.768.500 | 99,82 | | 17.214.300 |
| | | | PEMBANGUNAN JEMBATAN DI PROVINSI WILAYAH-II | 14.127.563.800,00 | 86,00 | 11.191.081.300 | 79,21 | •Jeleknya pengelolaan keuangan proyek yang berdampak terlambatnya pembayaran upah dan leveransir material sehingga menggangu jalannya pekerjaan •Tingginya curah hujan pada periode kontrak (bulan Oktober s/d bulan November) 2018 sehingga kurang optimalnya pencapaian progress di lapangan. | 2.935.482.200 |
| | | | PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN/PROVINSI | 821.948.680,00 | 100,00 | 777.555.185 | 94,60 | | 44.393.455 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-----------|---------------|-------|---|---------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN PROVINSI | 11.200.000.000,00 | 35,39 | 3.983.682.728 | 35,39 | 1. Lokasi Bungus Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan <ul style="list-style-type: none"> •DPA awal belum tercantum 4 tahap •Dilakukan perubahan menjadi 4 tahap •Proses terakhir penetapan lokasi dan menunggu pembentukan panitia Satgas A dan B oleh Kanwil Pertanahan | 7.235.117.272 |
| | | | PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN/JEMBATAN DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS | 7.866.767.900,00 | 3,02 | 238.369.312 | 3,02 | Proses yang cukup panjang. Saat ini dalam proses tinjauan | 7.648.398.158 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PEJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-----------|----------------|-------|--|---------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN UTILITAS UMUM | 54.618.800,00 | 100,00 | 54.179.456 | 99,20 | | 439.340 |
| | | | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI | 599.994.800,00 | 100,00 | 593.555.518 | 98,93 | | 6.439.282 |
| | | | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PROVINSI | 463.169.000,00 | 100,00 | 460.741.662 | 99,50 | | 2.427.338 |
| | | | PENYUSUNAN DATABASE DAN SURVEY JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 1.172.052.657,00 | 100,00 | 925.721.196 | 78,98 | Kegiatan BMS yang tidak dilaksanakan karena gagal pengadaan konsultan individu | 246.331.471 |
| | | | PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI | 6.674.484.000,00 | 100,00 | 6.464.473.162 | 96,85 | | 210.010.838 |
| | | | PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN PROVINSI DAK | 22.662.000.000,00 | 100,00 | 18.678.765.661 | 83,31 | Pada prinsipnya paket pekerjaan fisik telah terlaksana terhadap sisa anggaran senilai 16,69 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 3.783.234.339 |
| | | | PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN | 5.422.718.900,00 | 100,00 | 5.404.011.320 | 99,66 | | 18.707.580 |
| | | | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 65.296.290.300,00 | 97,92 | 62.760.807.366 | 96,11 | | 2.537.422.944 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|--|--|------------------|----------------|---------------|--------|---|------------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | REHAS / PEMELRUTIN JEMBATAN PROVINSI DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN | 3.261.727.800,00 | 100,00 | 2.971.851.054 | 91,11 | | 289.876.706 |
| | | | REHAS / PEMELRUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BUKITTINGGI DAN AGAM TIMUR | 3.102.564.000,00 | 100,00 | 3.101.701.200 | 99,97 | | 862.800 |
| | | | REHAS / PEMELRUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SO KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH | 4.949.175.500,00 | 100,00 | 4.944.719.150 | 99,91 | | 4.459.210 |
| | | | REHAS / PEMELRUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG | 3.461.000.000,00 | 100,00 | 3.158.576.410 | 90,91 | | 5.123.890 |
| | | | REHAS / PEMELRUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PADANG FARAMANDAN KOTA PADANG | 2.370.805.000,00 | 100,00 | 2.346.548.100 | 98,95 | | 27.259.900 |
| | | | REHAS / PEMELRUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK | 2.986.084.000,00 | 100,00 | 2.984.141.450 | 99,93 | | 1.942.550 |
| | | | REHAS / PEMELRUTIN JALAN PROVINSI DI KAB SOLOK SELATAN | 2.755.435.000,00 | 100,00 | 2.755.356.160 | 100,00 | | 78.840 |
| | | | REHAS / PEMELRUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BAWAHLUNTO, KAB. SUJUNJUNG DAN KAB. DHARMAWARA | 3.014.829.000,00 | 100,00 | 3.014.066.612 | 99,98 | | 762.388 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|---|---|-------------------|----------------|----------------|-------|---|------------------|
| | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | REHAB / PEMEL. RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PESISIR SELATAN DAN KEP. MENTAWAI | 3.026.260.000,00 | 100,00 | 2.966.017.350 | 98,01 | | 60.242.650 |
| | | PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN | 1.200.000.000,00 | 100,00 | 1.160.823.471 | 96,74 | | 39.176.529 |
| | | REHAB / PEMEL. RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. AGAM | 2.249.905.000,00 | 100,00 | 2.249.685.540 | 99,99 | | 219.460 |
| | | REHAB / PEMEL. RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN | 3.177.291.000,00 | 100,00 | 3.165.501.089 | 99,63 | | 11.789.911 |
| | | REHAB / PEMEL. RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN BARAT | 2.813.732.000,00 | 100,00 | 2.809.913.940 | 99,86 | | 3.818.060 |
| | | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH I | 9.793.084.300,00 | 100,00 | 9.787.318.600 | 99,94 | | 5.765.700 |
| | | PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WILAYAH II | 10.857.289.700,00 | 100,00 | 10.851.023.450 | 99,94 | | 6.266.250 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | | KENDAI A FISIK DAN KELANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|---|---|------------------|--------------|---------------|-------|--|------------------|
| | | | | FISIK [%] | KEUANGAN | | | |
| | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN JALAN DAN JEMBATAN | 6.213.042.000,00 | 66,67 | 4.133.563.700 | 66,53 | Proses pengadaan yang sebelumnya direncanakan dengan pengadaan E-catalog dan perencanaan harga pun berdasarkan harga yang tertera pada website LKPP E-catalog harganya adalah sekitar Rp.480.000.000,- namun dikarenakan E-Katalog turun tayang pada bulan juli dan sampai akhir desember tetap belum tayang dan dilakukan pengadaan secara lelang rapat juga tidak diminat dikarenakan harga yang direncanakan bukan harga lelang. Maka pengadaan Roller 3 ton ini tidak bisa dilakukan | 2.079.478.300 |
| | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMPAKGAAN | 1.982.623.465,00 | 100,00 | 1.967.517.128 | 99,24 | | 15.105,730 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | FISIK (%) | REALISASI | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------|---------------|-------|---|---------------|
| | | | | | | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | PEMELHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN | 340.022.300,00 | 100,00 | 337.965.662 | 99,40 | | 2.056.608 |
| | | | PENCADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN | 1.371.757.275,00 | 100,00 | 1.371.569.881 | 99,99 | | 187.394 |
| | | | MONITORING PENGENDALIAN MUTU JPTD | 270.043.090,00 | 100,00 | 257.982.155 | 95,25 | | 12.061.735 |
| Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur serta Pelayanan Dasar Masyarakat | Persentase cakupan air minum | Rata-rata perbandingan jumlah penduduk terlayani di minimum di kabupaten/kota dibandingkan jumlah penduduk kabupaten/kota kali 100% | PROFAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 836.941.000,00 | 100,00 | 711.142.858 | 84,97 | | 125.798.141 |
| | | | PENDAMPINGAN PROGRAM SANIVAS EB DAN PPSP | 350.554.500,00 | 100,00 | 271.940.209 | 77,57 | Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi | 78.614.291 |
| | | | PEMBINAAN PENYIJSIINAN MASTERPLAN SANITASI KAB/KOTA | 305.386.500,00 | 100,00 | 271.181.650 | 88,81 | Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi | 34.204.850 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKJ) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|--|---|--|--|--------------------|-----------|-----------------|-------|---|----------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur serta Pelayanan Dasar Masyarakat | | | PENYUSUNAN PROFIL PENGELOLAAN SANITASI PROVINSI SUMATERA BARAT | 180.000.000,00 | 100,00 | 168.021.000 | 93,35 | | 11.979.000 |
| | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan (seperti: gedung negara dan rumah negara). | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA | 157.941.202.749,00 | 92,58 | 143.245.064.585 | 91,04 | | 14.096.138.158 |
| | | | PEMEANGUNAN STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 96.465.877.143,00 | 99,11 | 89.528.482.053 | 92,80 | | 6.541.395.088 |
| | | | PEMEANGUNAN GEDUNG KEDUDAYAN SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 34.764.471.000,00 | 100,00 | 31.389.253.100 | 89,48 | Selisih pagu dana dari harga terkontrak dan adanya addendum kontrak yang harganya turun | 3.675.217.900 |
| | | | PEMEANGUNAN GEDUNG UTAMA KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT | 376.610.000,00 | 100,00 | 358.622.110 | 94,77 | | 19.786.890 |
| | | | PEMEANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL SUMATERA BARAT (LANJUTAN) | 10.234.000.000,00 | 95,01 | 8.782.841.670 | 85,82 | Karena penambahan item / volume pekerjaan, realisasi keuangan mengikuti progress fisik | 1.451.158.330 |
| | | | PEMEANGUNAN GEDUNG BUNDO KANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 992.140.500,00 | 100,00 | 978.188.650 | 98,49 | | 14.951.850 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|--|--|------------------|-----------|---------------|-------|---|---------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan terbangun (siap ditempat), yang terdiri atas bangunan strategis, gedung negara dan | PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN TEKNIS (TPT) BANGUNAN NEGARA DI SUMATERA BARAT | 57.726.000,00 | 100,00 | 81.182.186 | 83,07 | Perjalanan dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BBM tidak terserap karena memakai kendaraan pribadi | 16.543.814 |
| | | | PENYELENGGARAAN HARI PERS NASIONAL | 290.182.700,00 | 100,00 | 272.190.730 | 93,80 | | 17.991.970 |
| | | | REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA | 2.083.676.800,00 | 100,00 | 1.869.771.290 | 91,05 | | 183.545.350 |
| | | | PEMBANGUNAN GEDUNG PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI SUMATERA BARAT | 3.458.789.300,00 | 100,00 | 3.480.545.920 | 99,48 | | 18.123.380 |
| | | | PENAMBAHAN GARASE RUMAH DINAS GUBERNUR | 748.170.500,00 | 100,00 | 646.560.415 | 86,47 | Terdapat tiang listrik di lokasi pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Proses pemindahan membutuhkan waktu | 101.230.085 |
| | | | PEMBANGUNAN TAMAN WISATA KELOK SEMBILAN | 1.161.820.000,00 | - | 172.092.000 | 14,81 | Tidak terlaksananya 2 (dua) pekerjaan karena mengusulkan Balai KSDA anggaran biaya untuk penyusunan rencana pengelolaan dan disain tapak melalui dana di Dians PURR untuk dilaksanakan oleh Balai KSDA. | 989.728.000 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|---|---|------------------|-----------|---------------|-------|---|---------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | PENDAMPINGAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA DI SUMATERA BARAT | 135.526.800,00 | 100,00 | 133.700.553 | 98,65 | | 1.826.250 |
| | | | PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSULTASI TEKNIS DAN ADVOKASI SERTA TERSEDIA NYA DATA INFORMASI TEKNIS BIDANG KEGIATAN KARYAAN | 214.950.000,00 | 100,00 | 165.255.700 | 76,88 | Kegiatan sosialisasi diselenggarakan dari tanggal 26 s/d 28 November 2016 di Bukittinggi. Target sasaran sosialisasi adalah para mandor mekanikal elektrikal dan mandor bangunan gedung dari gapensi, Gapensi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Minimnya kehadiran peserta sebagai akibat dari penyelenggaraan sosialisasi yang bertepatan dengan finalisasi penyelesaian pekerjaan dilapangan. | 49.693.300 |
| | | | PEMBINAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) | 571.970.000,00 | 100,00 | 528.385.408 | 92,38 | | 43.584.592 |
| | | | ASSESMEN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | 242.730.000,00 | 100,00 | 220.532.622 | 90,86 | | 22.197.378 |
| | | | REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA I | 4.232.751.200,00 | 100,00 | 4.230.508.000 | 99,95 | | 2.243.200 |
| | | | PEMBANGUNAN SHELTHER DI MUSHOLLA JABAL RAHMAH DI PAINAN (LANJUTAN) | 252.951.000,00 | 100,00 | 227.649.047 | 90,00 | | 25.301.953 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KELANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|--|---|------------------|-----------|---------------|--------|--|---------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEJANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT | 600.000.000,00 | 50,00 | 90.000.000 | 16,50 | Tidak terlaksananya 1 (satu) pekerjaan karea tidak mencukupi waktu pelaksanaan pekerjaan | 501.000.000 |
| | | | PEMBANGUNAN LAPANGAN TENNIS GUBERNURAN (LANJUTAN) | 250.000.000,00 | 100,00 | 236.424.920 | 95,37 | | 11.575.080 |
| | | | REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA II | 20.000.000,00 | 100,00 | 17.741.332 | 88,71 | Sisa anggaran senilai 11,29 % merupakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran | 2.258.668 |
| | | | PENYUSUNAN MASTERPLAN PASAR KOTO BARU | 30.000.000,00 | 100,00 | 123.516.920 | 95,01 | | 6.483.080 |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI | 1.463.638.965,00 | 100,00 | 1.232.310.365 | 84,18 | | 231.328.600 |
| | | | PENYUSUNAN RANPERDA SMM | 1.639.500,00 | 100,00 | 1.639.500 | 100,00 | | - |
| | | | BIMBINGAN TEKNIS / WORKSHOP JASA KONSTRUKSI | 586.501.110,00 | 100,00 | 516.822.250 | 88,12 | Terjadinya pergeseran rarasumber dari luar daerah ke dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan honoraria sesuai dengan Perjubo | 69.678.860 |
| | | | LOKAKARYA, SOSIALISASI DAN FORUM KOMUNIKASI JASA KONSTRUKSI | 387.337.865,00 | 100,00 | 317.701.350 | 82,02 | Terjadinya pergeseran rarasumber dari luar daerah ke dalam daerah sehingga tidak diperlukan transportasi dan honoraria sesuai dengan Perjubo | 69.636.515 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KFIANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|--|--|--|------------------|--------------|---------------|-------|--|------------------|
| | | | | FISIK (%) | KFIANGAN | | | |
| | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | KEGIATAN UPDATE PROFIL JASA KONSTRUKSI | 138.029.140,00 | 100,00 | 138.868.000 | 78,31 | Perjalanan dinas luar daerah bias dilaksanakan bila disertai undangan, sementara perjalanan dinas dalam daerah terlalu banyak maka terjad kelebihan begitu juga Masih belum dibuttkan penggandaan yang lebih banyak karena baru besifat draft ranperda | 30.151.140 |
| | | PENYUSUNAN RANPERDA SMK3 | 171.642.780,00 | 100,00 | 138.313.040 | 80,58 | | 33.329.740 |
| Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi | BERTIFIKAT AHLI MUDA | 177.888.670,00 | 100,00 | 118.966.225 | 83,84 | <ul style="list-style-type: none"> •Tidak tercapainya target jumlah peserta verifikasi dan target 80 peserta yang terealisasi 45 peserta •Tidak diperlukan perjalanan dinas luar daerah untuk mencari narasumber karena sudah diakomodir oleh asosiasi yang menjadi mitra pendamping | 28.722.345 |
| | | PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG | 4.928.252.510,00 | 100,00 | 4.140.183.131 | 83,99 | | 789.069.379 |
| | | PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS PROVINSI | 923.797.760,00 | 100,00 | 888.039.910 | 96,13 | | 35.757.840 |
| | | PROSES LEGALISASI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) | 522.914.950,00 | 100,00 | 485.269.588 | 92,80 | | 37.645.364 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN | |
|--|--|---|---|----------------|-----------|-------------|---|---------------|-----|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | | | (%) |
| Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya | Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTFW Provinsi | Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPIMD Provinsi Sumatera Barat | PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG | 377.811.950,00 | 100,00 | 316.217.662 | 83,70 | 61.596.288 | |
| | | | PENYUSUNAN DATABASE KEPUANCAAN | 944.666.750,00 | 100,00 | 859.794.623 | 91,07 | 74.872.127 | |
| | | | LEGALISASI PERDA REVISI RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT | 912.063.150,00 | 100,00 | 679.409.120 | 74,49 | 232.654.030 | |
| | | | KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 286.593.950,00 | 100,00 | 136.645.396 | 47,68 | 149.948.554 | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANCCARAN | REALIASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|--|---|----------------|-----------|---------------|-------|---|---------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN (Rp) | (%) | | |
| | | | PFNINNGKATAN PFMMAHALIAN PFMMAKIKLI (KPPFNNTINNGAN TFRHRADAP PFMNATAAN RUANG | 572.282.150,00 | 100,00 | 115.895.734 | 72,85 | Efisiensi belanja cetak buku pedoman perundang-undangan bidang penataan ruang dan cetak peta | 155.206.116 |
| | | | PENYESARLUASAN WIFORNASIDAN BAHAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG | 385.119.850,00 | 100,00 | 347.921.100 | 85,41 | Adanya sisa anggaran yang berasal dari sisa tender belanjau jasa even organizer ukuhu huri kuar muary sebesar Rp 30.496.000 | 41.99.700 |
| | | | PROGRAMPENCENDALIAN PEMANTAATAN RUANG | 475.701.250,00 | 100,00 | 325.963.700 | 67,96 | | 153.717.550 |
| | | | PENGAWASAN TEKNIK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DIDANS PENATAAN RUANG DI KABUPATENKOTA | 167.546.900,00 | 100,00 | 117.479.600 | 70,12 | sisa anggaran merupakan sisa belanja akumulasi | 50.067.100 |
| | | | PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT | 144.391.350,00 | 100,00 | 111.775.200 | 77,30 | Sisa anggaran merupakan efisiensi dalam pengurusan anggaran belanja perjalanan dinas dan sisa belanja akomodasi | 32.616.150 |
| | | | MONITORING PERYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 167.562.950,00 | 100,00 | 95.728.700 | 57,73 | Adanya perubahan target pelaksanaan kegiatan dan 3 kali menjadi 2 kali | 70.834.250 |
| | | | PROGRAMPENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENCULULAN KEUANGSWAERAH | 302.700.750,00 | 100,00 | 285.186.912 | 94,21 | | 17.511.783 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | | KENDARAAN FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|--|---------------------------------|--|--|------------------|--------------|---------------|--------|---|------------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum dan Aparatur serta Pelayanan Dasar Masyarakat | Persentase cakupan saniitasi | rata-rata perbandingan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi di kabupaten/kota dibandingkan jumlah rumah tangga kabupaten/kota tiali 100%. | INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI | 302.700.755,00 | 100,00 | 285.188.972 | 94,21 | 17.511.783 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM IRIGASIR KAWILAYAHAN PROVINSI | 638.335.750,00 | 100,00 | 630.330.148 | 98,75 | 8.005.602 | |
| | | | PEMBANGUNAN DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA | 5.318.000,00 | 100,00 | 5.318.000 | 100,00 | | |
| | | | SURVEY DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA | 177.017.750,00 | 100,00 | 172.080.148 | 97,22 | 4.037.602 | |
| | | | PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG | 228.000.000,00 | 100,00 | 226.235.000 | 99,23 | 1.765.000 | |
| | | | PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN SOLOK DAN KOTA SOLOK | 228.000.000,00 | 100,00 | 225.797.000 | 99,03 | 2.203.000 | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN | 2.771.215.000,00 | 80,00 | 1.402.645.594 | 50,61 | 1.368.569.406 | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA (IKU) | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | | KENDALA FISIK DAN KEUANGAN YANG DIBAWAH KEUANGAN 90 % | SISA ANGGARAN |
|-------------------|-------------------|--|--|------------------|--------------|-------------|-------|--|------------------|
| | | | | | FISIK (%) | KEUANGAN | | | |
| | | | | | | (Rp) | (%) | | |
| | | Rata-rata pertumbuhan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi di kabupaten/kota | PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT | 558.915.000,00 | 100,00 | 434.467.114 | 77,73 | Tidak terserapnya dana untuk honor para tenaga ahli/instruktur/marasumber karena kegiatan tidak rutin dilakukan | 124.457.886 |
| | | | PEMBINAAN KEGIATAN PAMSIMAS DI PROVINSI SUMATERA BARAT | 164.300.000,00 | 100,00 | 133.550.414 | 81,07 | | 30.749.586 |
| | | | PENYUSUNAN RENCANA SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL DI PROV. SUMATERA BARAT | 610.000.000,00 | 100,00 | 597.048.116 | 97,88 | | 12.951.884 |
| | | | PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) DI PROV. SUMATERA BARAT WILAYAH I | 268.000.000,00 | 100,00 | 215.584.350 | 80,44 | Pejalaran dinas tidak terserap karena minimnya kendaraan dinas dan BEM tidak terserap karena masalah kendaraan pribadi | 52.415.650 |
| | | | PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) KAWASAN PALANG- NYUJIF MELAWAI KABUPATEN PESISIR SELATAN | 1.170.000.000,00 | - | - | 0,00 | Tidak jadi dilaksanakan karena bukan kewenangan provinsi | 1.170.000.000 |

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LAKIP disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 16 (enam belas) program, meliputi: 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Pada tahun anggaran 2018 terdapat (dua) sasaran strategis Dinas yang seluruhnya dapat diukur berdasarkan target indikator kinerjanya masing-masing. Pada umumnya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja sebelumnya dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing program.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018 ini adalah sebesar 90,92% (Rp. 439.317.857.318,86,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 483.181.721.020,10,-.

2. Dari 16 (enam belas) program yang ada pada tahun 2018, capaian kinerja fisik pekerjaan terlaksana dengan kinerja sangat baik sebanyak 15 (lima belas) program dan 1 (satu) program berkinerja baik.

Kualitas pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program tahun 2018 yaitu: capaian kinerja keuangan terhadap 16 (enam belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program berkinerja sangat baik, 1 (satu) program berkinerja baik, 1 (satu) program berkinerja cukup, 1 (satu) program berkinerja kurang.

3. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada.
4. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2018 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2019
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

LAMPIRAN

Pembangunan Gedung Kebudayaan



PAKET PENINGKATAN JALAN MATUR- PALEMBAYAN (P.080)

